

Drs. Agus Pahrudin, M.Pd.  
Drs. Mansyur Hidayat, M.Ag.



# Budaya Lampung & Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan



Budaya Lampung  
& Penyelesaian Konflik  
Sosial  
Keagamaan

# Budaya Lampung & Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan

Drs. Agus Pahrudin, M.Pd.  
Drs. Mansyur Hidayat, M.Ag.

Alimron  
Pustaka Keluarga Pilihan

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**BUDAYA LAMPUNG DAN PENYELESAIAN  
KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN**

**Penulis**

Drs. Agus Pahrudin, M.Pd. (Ketua Peneliti)  
Drs. Mansyur Hidayat, M.Ag. (Anggota Peneliti)

**Desain Cover & Layout**  
PAI Creative

x + 256 hal : 14 x 20 cm  
Cetakan 2007

**ISBN: 978-602-5857-27-0**

Penerbit  
**Pustaka Ali Imron**

Perum Polri Haji Mena  
Natar Lampung selatan

HP. 0822 8003 5489  
email : pustakaaliimron@gmail.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga hasil penelitian yang berjudul : **“BUDAYA LAMPUNG DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN”**, dapat diselesaikan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada suri teladan umat manusia yakni Rasulullah Muhammad S.A.W yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar yakni Islam.

Fokus Penelitian ini adalah (1) Apa saja nilai budaya Masyarakat Lampung, baik yang fungsional maupun disfungsional sebagai peredam konflik sosial keagamaan ?. (2) Bagaimana peran nilai budaya Masyarakat etnis lampung yang fungsional sebagai peredam konflik sosial keagamaan? (3) Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial keagamaan? (4) Apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan budaya lokal?.

Penelitian ini terlaksana atas kerjasama Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandar Lampung dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama R.I. Yang tertuang dalam DIPA No. MA. 01.0039.0925.521114, Tahun Anggaran 2007.

Kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini dihaturkan terima kasih yang tak terhingga. Pada akhirnya, hasil penelitian ini dipersembahkan kepada masyarakat akademik, semoga menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang amat luas.

***Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.***

Bandar Lampung, Juli 2007  
Ketua Peneliti

Drs. Agus Pahrudin, M.Pd.

# KATA SAMBUTAN

## KETUA PUSAT PENELITIAN

### IAIN RADEN INTAN

### BANDAR LAMPUNG

Bagi suatu masyarakat pluralistik seperti halnya di Lampung, potensi konflik sangat dimungkinkan terjadi. Ragam konflik yang terjadi bisa berasal dari berbagai hal, seperti halnya: konflik antar agama, konflik antar etnis, konflik antar budaya, konflik antar suku, ataupun konflik kepentingan antar masyarakat dari daerah atau propinsi yang berbeda. Konflik antar pengikut agama yang berbeda, biasanya terjadi manakala norma dan nilai-nilai agama yang dianutnya dicampakkan atau dilecehkan oleh penganut agama lainnya.

Konflik sangat mungkin terjadi manakala tingkat toleransi antar agama tak terpelihara dengan baik. Kesepakatan antar pemuka agama untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam menjalankan agamanya masing-masing serta saling menghormati dan saling memahami satu sama lain merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi terhindarnya konflik yang berbasis agama dan budaya.

Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian dengan judul **“BUDAYA LAMPUNG DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN”**, yang dilakukan oleh Drs. Agus Pahrudin, M.Pd., dkk, patut memperoleh sambutan dan apresiasi yang baik.

Penelitian ini terlaksana atas kerjasama Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandar Lampung dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama R.I. Tahun Anggaran 2007. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini dapat dilanjutkan pada masa mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini dihaturkan terima kasih yang tak terhingga.

Bandar Lampung, Juli 2007  
Kapuslit,

Drs. Yukrim Latief, M.Ag.  
Nip: 150206300



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR PENELITI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA SAMBUTAN KAPUSLIT IAIN RADEN INTAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metodologi Penelitian .....	9
<b>BAB II. AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Agama .....	10
B. Pluralitas Agama dan Paham Keagamaan .....	13
C. Potensi Konflik Sosial Keagamaan .....	17
D. Sejarah dan Tipologi Adat Istiadat Masyarakat Lampung .....	18
E. Potret Masyarakat, Agama dan Budaya Lampung .....	29
F. Adat-Budaya, Agama dan Kehidupan Keagamaan Pada Masyarakat Lampung .....	36
G. Adat-Budaya Lampung Sebagai Alternatif Tawaran Solusi Konflik Keagamaan di Lampung .....	42

<b>BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG .....</b>	<b>44</b>
A. Kota Bandar Lampung .....	44
B. Kabupaten Tulang Bawang .....	55
C. Kabupaten Lampung Tengah .....	73
D. Kabupaten Lampung Timur .....	105
E. Kabupaten Lampung Barat .....	139
F. Kabupaten Way Kanan .....	150
G. Kabupaten Lampung Selatan .....	160
H. Kota Mero .....	169
I. Kabupaten Tanggamus .....	185
J. Kabupaten Lampung Utara .....	191
 <b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA PENELITIAN .</b>	 <b>215</b>
A. Budaya Lampung yang masih fungsional dan disfungsional .....	215
B. Budaya Lampung Dalam Meredam Konflik Sosial .....	229
C. Implementasi Nilai Kemuakhian (Persaudaraan) .....	236
D. Mekanisme Penyelesaian Konflik .....	238
E. Budaya dan Konflik Sosial Keagamaan .....	239
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	 <b>248</b>
A. Kesimpulan .....	248
B. Rekomendasi .....	250
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>252</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>256</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi historiografi Indonesia membagi *sejarah* ke dalam periodisasi yang langsung atau tidak langsung terkait dengan agama. Ada zaman kuno (pra sejarah) yang terkait dengan tradisi animisme-dinamisme; zaman Hindu/Budha yang terkait dengan bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu/budha: Pajajaran, Galuh, Mataram, Medang Kemulan, Kediri, Sriwijaya, Kutai, Majapahit, zaman Islam terkait dengan bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam: Pasei, Peurlak, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Goa, Ternate, Tidore, zaman modern (penjajahan) terkait dengan penyebaran agama Nasrani. Secara *demografis*, yang dibuktikan oleh hasil setiap sensus yang diadakan secara periodik, seluruh penduduk Indonesia menyatakan diri sebagai pemeluk salah satu agama: Islam (87,21%), Kristen (6,04%), Katolik (3,58%), Hindu (1,83%), Budha (1,03%), dan lain-lain (0,32%). Selanjutnya, secara *sosiologis* kita dapat melihat bukti-bukti empirik yang dapat diamati secara kasat mata tentang adanya umat yang aktif beribadat, adanya lembaga-lembaga dan organisasi agama, tokoh-tokoh agama dalam berbagai tingkatan beserta umatnya, upacara hari-hari besar agama, dll. Di bidang *politik*, kita juga menyaksikan adanya partai-partai politik berdasarkan agama. Sedangkan secara *kultural*, kita juga menyaksikan bukti-bukti

tentang hidupnya tradisi-tradisi keagamaan, kesenian, benda-benda agama, pranata-pranata agama, dan sebagainya.

Pada sebagian besar masyarakat Indonesia masih terus hidup dan berlaku kearifan-kearifan lokal (*local indigenous*), baik berupa adat-istiadat, tradisi, petatah-petitih maupun semboyan hidup yang sangat selaras dengan pesan perdamaian dan kerukunan berbagai agama seperti konsep-konsep: *dalihan natolu* (Tapanuli), *Rumah Betang atau rumah panjang* (Kalimantan Tengah), *Menyama Braya* (Bali), *Siro yo insun, insun yo siro* (Jawa Timur), *Alon-alon asal kelakon* (Jawa Tengah/DIY), *Basusun sirih* (Melayu/Sumatra), *Seloka* (Jambi), *Sipaka leppi dan sipakatau* (Bugis), *Solatta* (Toraja), *Kalosara dan Samaturru mepoko aso dan mendudulu* (Sulawesi Tenggara), *Kito samua basudara dan toraranga* (Sulawesi Tengah), *Kitorang basudara, Sulut sulit disulut* (Sulawesi Utara), dst<sup>1</sup>.

Bagi suatu masyarakat pluralistik seperti halnya Indonesia, potensi konflik sangat dimungkinkan terjadi. Ragam konflik yang terjadi bisa berasal dari berbagai hal, seperti halnya: konflik antar agama, konflik antar etnis, konflik antar budaya, konflik antar suku, ataupun konflik kepentingan antar masyarakat dari daerah atau propinsi yang berbeda. Konflik antar pengikut agama yang berbeda, biasanya terjadi manakala norma dan nilai-nilai agama yang dianutnya dicampakkan atau dilecehkan oleh penganut agama lainnya. Konflik sangat mungkin terjadi manakala tingkat toleransi antar agama tak terpelihara dengan baik. Kesepakatan antar pemuka agama untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam menjalankan agamanya masing-masing serta saling menghormati dan saling memahami satu sama lain merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi terhindarnya konflik antar agama yang berkepanjangan.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Damai di Dunia Damai untuk semua: Perspektif berbagai Agama*, Balitbang Depag RI, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Gejala religiusitas masyarakat yang bukti-buktinya terurai di atas berikut tradisi dan kearifan lokal yang masih ada dan berlaku di masyarakat berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai karena agama pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesama, dengan lingkungan dan dengan Tuhan.

Agama boleh saja secara ideal mengklaim diri sebagai pembawa pesan esensial tentang perdamaian. Namun dalam realitas kehidupan acapkali gejala yang nampak justru sebaliknya. Umat beragama malah tak segan mempermalukan diri dan Tuhannya dengan berkonflik atas nama perbedaan dan pembelaan terhadap agama. Nilai ideal yang dibawa agama memang menghadapi berbagai persoalan tatkala ia muncul dan bergelut dalam realitas proses sejarah kehidupan umat manusia.

Masyarakat Lampung termasuk tipikal masyarakat multikultural, keberagaman etnis, agama dan ragam budaya lokal menjadi aset bagi daerah yang dijuluki *bumi ruwa jurai*. Nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan kearifan lokal seperti *piil pasenggiri*, *sakai sambayan*, *puakhi* dan berbagai simbol lainnya yang menggambarkan khazanah budaya Lampung cukup kaya.

Masyarakat Lampung memiliki keanekaragaman budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan, yakni kekayaan nilai-nilai khasanah budaya masyarakat Lampung, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya dilihat secara objektif dengan nilai-nilai agama yang dianut. Dalam hal ini perpaduan nilai-nilai agama dan budaya dimana masyarakat Lampung sebagai masyarakat religius mampu memelihara nilai-nilai budayanya, sehingga sebuah tatanan masyarakat dalam kehidupan sosial keagamaannya mampu terwujud sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang mewarnai dinamika masyarakat secara umum. Adat Sai Batin merupakan sebuah lembaga yang telah melembagakan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat

Secara geografis Propinsi Lampung sangat strategis sebagai pintu gerbang sumatera yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Sumatra dengan areal dataran seluas 35.288.35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatra. Secara georafis Propinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur-Barat berada antara : 103.40 derajat -105.50 derajat Bujur Timur dan Utara-Selatan berada antara : 6.45 derajat - 3.45 derajat Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan : (1) Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara, (2) Selat Sunda, di sebelah Selatan, (3) Laut Jawa, di sebelah Timur, (4) Samudra Indonesia, di sebelah Barat.

Jadi, sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari bahwa bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang majemuk baik dari sisi etnis, budaya, suku, agama dan bahasa. Kemajemukan disatu sisi merupakan asset kekayaan khazanah budaya bangsa, namun disisi lain dapat menjadi potensi konflik tatkala warga bangsa gagal menyikapi kemajemukan secara arif dan proporsional. Beberapa kasus yang pernah terjadi berupa konflik antar etnis, antar agama, antar sekte (faham) internal agama, separatisme negara-masyarakat, konflik ekonomi, perkelahian antar desa, tawuran antar sekolah <sup>2</sup>merupakan salah satu eksese negative dari kemajemukan yang gagal difahami oleh warga bangsa. Sejalan dengan terus berlangsungnya perubahan ditingkat nasional dan global, maka kemajemukan dan keragaman akan semakin niscaya, dan bahkan nuansa kemajemukan yang ada akan mengambil bentuk yang lebih ekstrim.

Keragaman dan perbedaan yang muncul pada tataran kehidupan nasional terlihat semakin nyata seiring dengan perubahan system politik yang memberikan ruang yang luas bagi

---

<sup>2</sup> Fachruddin dan Suharyadi, *Falsafah Pi'il Pasenggiri Sebagai Norma Tata Krama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Arian Jaya, Bandar Lampung, 1986, hlm. 5

ekspresi kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi (berserikat) dan berkumpul, kebebasan menganut aliran pemikiran dan aliran keagamaan. Namun sebuah kenyataan memberikan pelajaran berharga bahwa kebebasan tanpa dibarengi dengan kearifan dalam bersikap kerap melahirkan keadaan yang kontra-produktif, yang membawa korban dan biaya Sosial (Sosial cost) yang tinggi, baik berupa kerusakan pada sarana fisik, trauma mental, bahkan berwujud pertikaian sosial.

Salah satu kebijakan politik yang mengiringi reformasi pengelolaan bangsa adalah pemberlakuan otonomi daerah yang disatu sisi memberikan penguatan bagi tumbuhnya kreatifitas dalam menggali sumber-sumber daya local guna memacu upaya percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat disegala bidang, baik fisik material maupun mental spiritual. Dampak positif yang segera terlihat dari pemberlakuan otonomi daerah adalah timbulnya spirit kompetisi untuk menggali sumberdaya dan khazanah kebudayaan lokal yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi maupun kekuatan pengendali dalam pembangunan. Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk baik dari sisi etnis, budaya dan agama, maka kekayaan khazanah budaya lokal merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri.

Budaya Lampung merupakan salah satu budaya domestik yang disamping memiliki sejarah yang panjang juga masih mampu bertahan bahkan mengaktualisasi diri dalam kehidupan masyarakat etnis Lampung berhadapan dengan perubahan-perubahan yang dialami. Kemampuan budaya Lampung untuk bertahan dari serbuan nilai-nilai budaya impor dimungkinkan karena relevansi kandungan budaya itu bagi kehidupan individu, keluarga bahkan kehidupan sosial dalam situasi yang berubah-ubah. Aspek lain yang menarik dari budaya Lampung adalah sikap penganutnya (etnis Lampung) untuk beradaptasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan konfigurasi penduduk Lampung dengan

keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Pada mulanya propinsi Lampung hanya didiami oleh masyarakat asli suku Lampung yang menggunakan bahasa Lampung, mempraktikkan nilai-nilai budaya Lampung dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun kemudian karena potensi alam yang dimiliki berupa tanah yang luas dan subur, maka terjadilah migrasi dari luar daerah, baik Jawa, Bugis, dan etnis lain dari pulau Sumatera. Migrasi ke Lampung ini terutama dilakukan oleh orang-orang dari Pulau Jawa melalui program transmigrasi yang digalakkan oleh Pemerintah pada 1960 an<sup>3</sup>. Kenyataannya kini wilayah Propinsi Lampung didiami oleh masyarakat dengan latar belakang etnik yang beragam. Masyarakat Lampung, sebagaimana ditunjukkan dalam Lambang daerah “*Sang Bumi Rua Jurai*” yang salah satu artinya adalah bahwa penduduk Propinsi Lampung terdiri dari penduduk asli (orang Lampung) dan penduduk pendatang. Orang Lampung sendiri secara garis besar terdiri dari dua kelompok masyarakat adat : yaitu Orang Lampung *Pepadun* dan Orang Lampung *Pesisir*. Orang Lampung jurai *Pepadun* pada umumnya bermukim disepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa dan Orang Lampung jurai *saibatin* bermukim di Pesisir pantai dan disepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia<sup>4</sup>. Menurut Hilman, “Orang Lampung *Pepadun* dicirikan oleh tutur *berdialek O*, sementara *Saibatin* dalam bertutur memakai *dialek A*, sekalipun tidak semua orang *Pepadun* berdialek *O*”.<sup>5</sup>

Sementara penduduk pendatang berasal dari berbagai macam suku : Jawa, Bugis, Minang, Batak, dan lain-lain. Keberadaan Pendatang disamping telah berhasil membangun

---

<sup>3</sup> Husin Sayuti, et.all., *Sejarah Pembentukan Provinsi Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 44.

<sup>4</sup> Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin dulu dan Sekarang*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi Press, 2002, hlm. 1

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1990.



kehidupan pribadinya, juga telah memberikan kontribusi bagi perkembangan daerah Lampung baik dari sisi ekonomi, Sosial bahkan budaya.

Realitas kemajemukan masyarakat Lampung sebagaimana tergambar diatas, disamping menjanjikan potensi kekuatan pembangunan daerah, juga potensial melahirkan kerawanan Sosial berupa konflik dan perselisihan, baik laten maupun manifest. Dalam sejarahnya beberapa konflik pernah terjadi di daerah lampung, seperti kasus Sara pada tahun 1975 dalam wujud pembakaran rumah tinggal yang dijadikan gereja oleh masyarakat dilingkungan transmigrasi Angkatan Darat, Kasus Sara 1985 dalam rupa pembakaran gereja di Kecamatan sukoharjo Lampung Selatan, Kasus Sara 1986 berupa pembakaran rumah tinggal di Pabelan Lampung Selatan yang diduga berfungsi ganda sebagai tempat ibadah, kasus sara tahun 1994 berupa pembakaran gedung yang dipergunakan sebagai gereja oleh masyarakat,<sup>6</sup> Demikian juga peristiwa geger nasional Kasus Kerusuhan Way Jepara yang banyak menelan korban berupa kehilangan tempat tinggal dan jiwa manusia. Kasus ini sampai saat ini belum juga terselesaikan karena persoalan yang rumit dan sarat dengan nuansa politik.

Dalam mengatasi konflik yang pernah terjadi maupun meredam potensi konflik yang tersimpan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, sederet upaya dilakukan, baik melalui pendekatan Sosial, politik, ekonomi budaya dan agama. Upaya-upaya akademis untuk merumuskan pendekatan ilmiah mengatasi dan meredam potensi konflik juga terus dilakukan, oleh perorangan maupun institusi-institusi swasta dan pemeintah. Seiring dengan kekayaan khazanah kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, maka penggalian nilai-nilai budaya

---

<sup>6</sup> Syahril Ali, *Peta Kerukunan di Lampung*, dalam Achmad Syahid, Zainuddin Daulay (ed) Riuhi di Beranda satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, Balitbang Depag RI, Jakarta, 2001

yang terkandung dalam kekayaan budaya etnis masyarakat Indonesia sepatutnya dilakukan.

Penelitian ini berusaha mengungkap nilai-nilai budaya Lampung dalam meredam konflik Sosial keagamaan.

## **B. Masalah Penelitian**

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja nilai budaya Masyarakat Lampung, baik yang fungsional maupun disfungsional sebagai peredam konflik sosial keagamaan ?.
2. Bagaimana peran nilai budaya Masyarakat etnis lampung yang fungsional sebagai peredam konflik sosial keagamaan?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial keagamaan?
4. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan budaya lokal ?.

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan secara utuh budaya Lampung yang masih fungsional dan disfungsional dalam kehidupan sosial.
2. Menjelaskan budaya Lampung yang dapat dipergunakan sebagai sarana menumbuh-kembangkan kehidupan sosial keagamaan yang harmonis dan dapat mencegah konflik.
3. Menggali akar permasalahan yang menjadi akar penyebab konflik sosial keagamaan.
4. Mendeskripsikan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan budaya lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik bagi dunia akademis maupun dalam perumusan kebijakan pembangunan Sosial keagamaan. Bagi dunia akademis hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori pencegahan konflik melalui pendekatan budaya local (*local indiginous*). Dan bagi instansi perumus kebijakan seperti Departemen Agama dan Pemerintah Daerah propinsi Lampung, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan masyarakat.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Lampung dengan fokus kegiatan pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh penduduk asli Lampung, meliputi kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Tengah, Way Kanan dan Kota Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan bersifat studi kasus. Data yang terkumpul meliputi data primer dan data sekunder. Data primer digali dan dihimpun dengan memakai tehnik wawancara mendalam (*in-dept interview*) dan observasi, kedua tehnik tersebut diperkuat oleh studi dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang menyangkut budaya Lampung. Data sekunder diperoleh melalui telaah sumber-sumber pustaka yang ada, utamanya yang menyangkut budaya Lampung dan dinamika masyarakat penganutnya.

## BAB II

# AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG

### A. Pengertian Agama

Untuk mencari dan mengetahui pengertian agama yang sesungguhnya dan dapat diterima oleh semua pihak atau penganut agama yang berbeda keyakinan sulit sekali ditemukan, karena setiap penganut agama tersebut akan memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang dari aspek mana yang dianggap urgen. Dengan demikian untuk mencari kesamaan dalam mendefinisikan agama adalah suatu yang tidak mungkin ditemukan. Maka tidak salah kalau James H. Leuha sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata<sup>7</sup> mengatakan bahwa usaha untuk membuat definisi agama itu tidak ada gunanya, karena merupakan kepandaian bersilat lidah. Sementara itu mantan Menteri Agama di era 70-an Mukti Ali<sup>8</sup> beranggapan bahwa yang paling sulit memberikan pengertian adalah tentang agama.

---

<sup>7</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

<sup>8</sup> A. Mukti Ali, *Universalitas dan Pembangunan*, IKIP Bandung, Bandung 1971

Pernyataannya tersebut didasari pada tiga alasan yakni: pertama, pengalaman agama adalah soal *batin*, *subyektif* dan sangat *individualis* sifatnya. Kedua, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada *emosi* yang melekat erat, sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. Ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut.

Sementara itu Mircea Eliade seperti yang dikemukakan K. Bertens dalam salah satu tulisannya di *Ulumul Qur'an*<sup>9</sup> mengatakan bahwa agama adalah dealektika (hubungan timbal balik) antara yang sakral dan yang profan. Sedangkan Harun Nasution<sup>10</sup> memberikan definisi tentang agama ialah ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari satu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan yang tak dapat ditangkap dengan pancaindera. Oxford Student Dictionary, mendefinisikan agama (religion) adalah, “the belief in the existence of supranatural ruling power, the creator and controller of universe” (Suatu kepercayaan tentang keberadaan supranatural yang mengatur suatu kekuatan yang menciptakan dan mengontrol alam semesta).

Dalam ajaran Islam kata agama dikenal dengan “ad-Diyn”. Kata “ad-Diyn” (الدِّين) dalam Islam dapat diartikan dengan “keberutangan, keta’atan/kepatuhan, kepercayaan”. Ad-dien dalam pengertian keberutangan ialah setiap individu yang sudah menyatakan dirinya sebagai penganut agama tertentu berarti ia harus melunasi utangnya yakni dengan melaksanakan aturan-aturan, hukum-hukum atau undang-undang yang terdapat dalam ajaran agama yang telah dianut atau diyakini tersebut seperti

---

<sup>9</sup>Jurnal *Ulumul Qur'an*, Volume III, NO.3 TH.1992, halaman 47,

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta, 1986

dalam agama Islam ada suruhan dan juga terdapat larangan. Yang bersifat suruhan harus dan wajib dilaksanakan seperti suruhan melaksanakan shalat, sedangkan yang bersifat larangan harus di jauhi atau ditinggalkan seperti membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Sedangkan ad-Dien dalam pengertian keta'atan /kepatuhan adalah setiap individu yang sudah meyakini agama yang dianutnya, ia harus patuh dan tunduk dengan ajaran yang terdapat dalam agama yang diyakini tersebut walaupun ajaran yang ada dalam agamanya tersebut bertentangan dengan rasionya. Seperti dalam agama Islam apabila anggota badan seseorang dijilat anjing, dalam tuntunan ajaran Islam harus disucikan dengan memakai air tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Cara menyucikan tersebut tidak boleh diganti dengan cara lain seperti dengan memakai deterjen ( rinso, sabun dan lain sejenisnya). Hal ini jika dihubungkan dengan kebersihan logika mengatakan bahwa dengan cara memakai deterjen lebih bersih, tapi tidak demikian halnya dengan ajaran Islam. Maka dalam ajaran Islam hal demikian itu disebut ta'abbudi, yakni suatu ajaran Islam yang harus dita'ati/dipatuhi walaupun aturan tersebut bertentangan dengan ratio. Sementara ad-Dien dalam pengertian kepercayaan yaitu, dalam setiap agama mempunyai suatu kepercayaan seperti mempercayai adanya Tuhan, Dewa dan lain sebagainya yang dianggap oleh penganutnya mempunyai kekuatan yang dapat mengantarkannya kesuatu tempat yang lebih baik dan lebih bermanfa'at.

Dalam agama Islam misalnya yang dianggap mempunyai kelebihan mutlak adalah Allah, sementara dalam agama Animisme yang mempunyai kelebihan adalah "Roh" atau lain sebagainya. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, sependapat atau tidak sependapat dengan definisi yang dikemukakan di atas, yang jelas agama adalah merupakan perekat antara pemeluknya, karena dalam agama terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh penganutnya.

## B. Pluralitas Agama dan Paham Keagamaan

Isu yang sangat sentral dan cepat menimbulkan konflik dikalangan masyarakat adalah isu masalah agama dan faham keagamaan. Dengan isu faham keagamaan ini penganutnya berani mengorbankan apapun yang ada pada dirinya bahkan nyawanya sekalipun H.M.Rasyidi<sup>11</sup> menyatakan bahwa bidang agama merupakan bidang yang *ultimate* dalam kehidupan manusia yakni soal hidup atau mati seorang. Potensi untuk berkembangnya konflik keagamaan dalam suatu masyarakat adalah penduduk yang beragam keyakinan faham dan faham keagamaan seperti di Indonesia pada umumnya dan Bandar Lampung pada khususnya. Hendro Puspito<sup>12</sup> mengatakan bahwa penyebab konflik sosial terjadi bersumber dari agama adalah perbedaan tingkat kebudayaan dan juga karena adanya masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama. Sementara itu Kafrawi, mengatakan sebab-sebab ketegangan dalam hubungan antar umat beragama adalah sifat misi dari masing-masing agama kurangnya pengetahuan terhadap agamanya sendiri dan agama fihak lain, kurang mampunya umat yang mendapat kelebihan dan fasilitas untuk menahan diri yang dapat diartikan dan meremehkan fihak lain, perbedaan yang menyolok tentang status sosial, ekonomi, politik antar mereka, dan kurang adanya komunikasi antara pemimpin masing-masing umat.

Implikasi globalisasi merupakan kreaksi dari perkampungan global (Global Village), dimana pluralisme keagamaan dalam masyarakat yang berasal dari satu kepercayaan atau agama yang hidup dalam perkampungan global, haruslah memiliki visi yang religius yang akan berlaku adil terhadap agama mereka sendiri dan juga agama orang lain serta faham yang dimiliki oleh komunitas lain.

---

<sup>11</sup> M. Rasyidi, *Filsafat Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986 hlm.10

<sup>12</sup> D. Hendropuspito. O.C, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Jakarta, 1983 hlm. 151

Menurut Nurcholis Madjid<sup>13</sup> dengan sebuah kesadaran yang positif tentang adanya perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok masing-masing komunitas yang mempunyai kepercayaan, sebaiknya memahami sejarah dalam kerangka yang sedemikian itu untuk secara serius mempertimbangkan kesadaran diri dari setiap komunitas dan keagamaan dari keseluruhannya.

Konflik dan ketegangan hubungan antar umat beragama tersebut sering terjadi ditengah-tengah masyarakat yang agama dan faham keagamaan pluralis sebagaimana kita saksikan informasinya melalui media cetak, media elektronik dan media masa lainnya seperti konflik yang berkepanjangan antara Amerika dengan Irak dan lain sebagainya dibelahan dunia lain.

Demikian juga di Negara Republik Indonesia, seperti Poso, Maluku atau Ambon, tampaknya isu agama merupakan titik sentral pemicu terjadinya konflik, walaupun isu tersebut masih perlu dibuktikan secara ilmiah.

Keadaan semacam ini jika tidak di atasi secara konprehensif akan menyebabkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan menjadi tidak stabil, sedangkan dalam kehidupan beragama di masyarakat akan terjadi konflik yang berkesinambungan atau dengan kata lain antara penganut agama satu dengan lainnya tidak terjalin hubungan yang harmonis.

Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa teori atau pemikiran yang biasa dikemukakan dalam hubungannya dengan kerukunan hidup beragama, seperti yang dikemukakan oleh Djohan Efendi<sup>14</sup> yakni dengan jalan: Sinkretisme, reconception, Synthesa, substitusi, agree in disagreement. Sinkretisme adalah selain cara membaurkan berbagai ajaran agama menjadi satu. Reconception yakni meyelami dan meninjau kembali agama

---

<sup>13</sup> Nurcholis Madjid, *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No. 3. Vol. VI, 1995 hlm. 62

<sup>14</sup> Djohan Efendi, Et.ab. (ads), *Masalah Hubungan antar Umat beragama di Indonesia: Monografi hasil dialog, Diskusi Panel Studi kasus di beberapa tempat di Jawa*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Departemen Agama RI, 1983, hlm. 13



sendiri dalam menghadapi konfrontasi dengan agama lain. Cara ini cenderung kepada penyusun unsur-unsur terbaik dari berbagai agama yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang dan bangsa.

Synthesa dimaksudkan untuk menciptakan satu agama baru yang elemen-elemennya dari berbagai agama. Kemudian dengan cara substitusi yaitu agama-agama yang diarahkan untuk berganti agama dan memilih suatu agama yang dianggap paling benar. Sedangkan Agree in disagreement adalah suatu sikap “setuju dalam perbedaan”. Teori yang diketengahkan oleh Johan Effendi tersebut di atas tidaklah sepenuhnya dapat diterima. Jika teori tersebut diterima sepenuhnya dapat membuat penganut satu agama menjadi skeptis terhadap agama yang diyakininya, bahkan dapat menjadikan penganut suatu agama murtad dengan agama yang dianutnya.

Di antara agama-agama tersebut diakui ada beberapa segi-segi perbedaan dan persamaan-persamaannya. Dengan dasar pandangan tersebut, maka masing-masing pemeluk agama dapat saling menghargai dan menghormati. Cara terakhir inilah sekarang ini semakin berkembang dalam hubungan antar umat beragama dan antar intern umat beragama (Islam). Dengan jalan ini pulalah dapat menghindari konflik dan ketegangan yang bersifat destruktif.

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh Peassen, dalam konteks hubungan antar umat beragama diantaranya; Toleransi, dialog, saling pengertian atau menghargai dan kerukunan. Toleransi dapat dilakukan antar umat beragama dengan cara menghormati agama yang diyakini oleh umat lain tanpa meminta legitimasi terlebih dahulu dari umat yang bersangkutan. Karena toleransi itu sendiri dalam pandangan Na'im, mengandung arti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.

Di samping toleransi juga diperlukan dialog antara pemimpin penganut berbagai agama dan faham keagamaan dalam Islam untuk mencari kesamaan dalam perbedaan. Dengan demikian masing-masing penganut agama dan faham keagamaan tersebut dapat mempertimbangkan dan berusaha untuk memahami pendapat orang lain. Yang terpenting dalam mengatasi konflik baik antar umat beragama maupun antar intern umat beragama (Islam) adalah menumbuhkan “Kerukunan Hidup Beragama” antar penganut agama dan antar intern faham keagamaan.

Sedangkan kerukunan antar intern umat beragama (Islam) dengan cara mencari kesamaan dalam memahami ajaran Islam, bahwa esensi dalam ajaran Islam pada prinsipnya adalah tauhid yakni mengesakan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang berhak untuk disembah serta menisbikan semua makhluk ciptaan-Nya. Dengan meyakini Allah sebagai Pencipta, maka dalam pandangan Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah. Maka mereka mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan merdeka, tanpa paksaan. Karena tanggung jawab seorang manusia pula hanya dapat berlaku dalam keadaan merdeka. Demikian pula halnya dengan hubungan dan kerukunan intern umat beragama, ia akan berlangsung dengan tanpa paksaan dan diskriminatif.

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (Q.S.Yunus:99).

Sedangkan dasar semua ajaran dan faham dalam agama Islam adalah al-Quran dan al-Hadis atau sunnah Rasulullah saw. Ajaran Islam juga menekankan untuk melakukan kerja sama kemanusiaan dengan berbagai golongan atau pemahaman dalam

agama (Islam) yang berbeda. Karena menurut Rahman<sup>15</sup> dalam pandangan Islam keanekaragaman dalam pemahaman agama dilihat dari segi aspek manfa'at dan positifnya untuk saling berlomba dalam kebajikan.

### **C. Potensi Konflik Sosial Keagamaan**

Kondisi kerukunan hidup beragama akan berubah menjadi konflik jika faktor-faktor penyebab konflik tidak diperhatikan oleh berbagai kelompok umat beragama maupun pemerintah. Konflik adalah sebuah kondisi yang berlawanan dengan integrasi yaitu suatu keadaan di mana warga bangsa atau masyarakat yang di dalamnya ada dua pihak atau lebih yang berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Kelompok keagamaan tertentu yang bersaing untuk memperebutkan jabatan politik secara paksa dalam suatu wilayah melahirkan reaksi dari kelompok keagamaan yang lain.

Untuk itu, kerangka teori yang dirancang-bangun dalam kaitannya dengan pemetaan kerukunan kehidupan umat beragama ini adalah mengatur bagaimana identitas agama dan kelompok keagamaan yang seluruhnya menggunakan simbol-simbol sebagai atribut atau identitas tidak diaktifkan sekehendak hati dalam hubungan sosial. Dalam kerangka ini, kerukunan kehidupan beragama adalah wujud masyarakat yang rukun dan integratif yang tidak menonjolkan identitas agamanya masing-masing pada transaksi sosial secara berlebihan.

Kondisi masyarakat Lampung yang multy etnis dan cultural ini di samping merupakan aset pembangunan bagi pemerintah, juga merupakan potensi konflik sosial yang perlu mendapat perhatian yang serius. Karena berbagai etnis sebagai sumber kekayaan budaya juga dapat menjadi sumber dan potensi

---

<sup>15</sup> Fazlur al-Rahman, *Tema Pokok al-Quran*, Pustaka, Bandung, 1983, hlm. 240

keragaman petaka, khususnya dalam hal keagamaan. Karena berbagai etnis masyarakat pendatang di Lampung lengkap dengan ragam agama dan keyakinan yang dibawa dari daerah asalnya. Sehingga di Lampung terdapat segala agama dan keyakinan yang umumnya ada dan diakui di seantero Nusantara. Untuk tindakan antisipasi kondisi masyarakat Lampung yang multi etnis dan agama serta keyakinan ini sebaiknya dilihat sebagai masyarakat yang berpotensi konflik sosial keagamaan, sehingga lebih cepat dapat disiapkan perangkat dan metode peredam dan pemecahannya serta dirumuskan teknis penyelesaiannya.

#### **D. Sejarah dan Tipologi Adat Istiadat Masyarakat Lampung**

##### **1. Sejarah Adat Istiadat Masyarakat Lampung**

Menyangkut sejarah Lampung dipastikan, bahwa sejarah kehidupan manusia di Lampung telah dimulai sejak masa prasejarah yang disebut masa *Megalitikum*–masa batu (*Paleolitikum*–masa batu kasar, dan *Neolitikum*–batu halus) serta masa *Perunggu* dan *Besi* dan telah melalui setiap tahapan priode sejarah sampai priode modern sekarang. Hal ini telah dibuktikan dengan ditemukannya situs-situs sejarah berupa bekas perkampungan (*Settlement*) masyarakat purbakala (masa *Paleolitikum*), yang umumnya di atas bukit yang dipagar oleh parit, tempat pemujaan berupa *pundan berundak* yang terbuat dari tanah dan dilengkapi dengan deretan batu berjajar pada setiap tingkatan. Di samping itu didukung pula dengan ditemukannya goresan-goresan berupa tulisan pada batu yang telah sulit diketahui makna dan artinya oleh masyarakat sekarang, mereka hanya dapat menyebutnya dengan sebutan *batu bersurat*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 2-3.

Bukti kehidupan masa *Megalitikum* telah ditemukan adanya *Kyokkenmodinger* yang diperkirakan bekas tempat tinggal manusia pada masa Megalitik. Gua-gua yang ditemukan seperti *Gua Tamiang*, *Gua Giham*, *Gua Napal Handak* di Ulu Semuwong, besar kemungkinan dahulunya merupakan tempat tinggal manusia priode Megalitik.<sup>17</sup> Penemuan serupa banyak didapatkan di *Sukarame* daerah Sekala Beghak Liwa Lampung Barat, dalam bentuk *dolmen* dan *menhir* (patung yang sudah tua usia).

Daerah lain yang banyak menyimpan peninggalan serupa adalah desa-desa Way Tenong, Mutar Alam, Purawiwitan dan Pura Jaya kecamatan Sumber Jaya Lampung Utara. Begitu juga di daerah Batu Bedil kecamatan Pulau Panggung dan daerah Atagh Beghak kecamatan Cukuh Balak Lampung Selatan, begitu juga di desa Pugung Raharjo kecamatan Jabung Lampung Tengah.<sup>18</sup>

Bukti adanya kehidupan manusia di Lampung masa *Neolitik* adalah ditemukannya guci yang terpendam dalam tanah di daerah *Walur* kecamatan Pesisir Utara Lampung Utara yang berisi 60 buah kampak terbuat dari batu mulia sejenis *Calchedon*, *Jaspis* atau jenis lainnya yang sering disebut masyarakat setempat dengan gigi petir.<sup>19</sup> Di lereng barat gunung Tanggamus tidak jauh dari Gisting kabupaten Tanggamus diketemukan pula sebuah kampak yang terbuat dari batu *obsidian* (batu kecubung).<sup>20</sup>

Bukti kehidupan manusia masa *perunggu* dan *besi* di Lampung yaitu ditemukannya *kampak*, *sepatu* dan *nekara* tipe Heger I dari Kuta Agung Tanggamus dan *Arca Bojong* yang terselip pisau belati dari perunggu di pinggangnya ditemukan di Bojong kabupaten Lampung Tengah.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 11-12

<sup>19</sup> *Ibid.* 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Mengenai asal-usul masyarakat Lampung terdapat beberapa teori. Di-antaranya teori sejarah yang lebih umum sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu berasal dari Yunan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk di-antaranya etnis Lampung sekarang.

Teori lainnya adalah teori yang mengkaitkan sejarah asal-usul dengan sebutan identitas masyarakat yang bersangkutan, misalnya sebutan istilah *Lampung*. Teori ini banyak mengungkap cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat dalam bentuk legenda, di-antaranya:

- Legenda masyarakat dimuat dalam tulisan Dr. R. Broesma yang berjudul *De Lampongsche Districten* menjelaskan bahwa Residen Lampung yang pertama, J.A. Du Bois (1829-1834) pernah membaca buku sejarah Majapahit milik penduduk di Teluk Betung. Dalam buku itu diuraikan bahwa Tuhan menurunkan manusia pertama ke bumi bernama *Sang dewa Senembahan* dan *Widodari Simuhun*. Dijelaskan bahwa mereka itulah yang menurunkan *Si Jawa* (Ratu Majapahit), *Si Pasundayang* (Ratu Pajajaran) dan *Si Lampung* (Ratu Balau). Sampai sekarang sebagian masyarakat etnis Lampung masih percaya mitos, bahwa nenek-moyang mereka berasal dari poyang *Si Lampung* dan dari nama inilah diyakini sebutan *Lampung* berasal.<sup>22</sup>
- Legenda lain konon diceritakan adalah yang beredar di kalangan masyarakat Tapanuli Sumatra Utara. Menurut cerita rakyat dimaksud, pada masa yang telah lama silam meletuslah anak gunung Merapi yang mengakibatkan munculnya Danau Toba sekarang. Ketika itu ada empat orang bersaudara yang berusaha menyelamatkan diri dengan sebuah rakit, berlayar meninggalkan daerah Tapanuli. Salah seorang dari keempat saudara itu konon bernama *Ompung Silamponga* yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 5.

terdampar di Kekhui, kemudian naik ke dataran tinggi Belalau (Sekala Bekhak sekarang). Dari tempat ini dilihatnya daerah yang terhampar luas menawan hatinya, dengan rasa haru diteriakkannyalah kata “*Lappu.....ng*” yang berarti luas dalam bahasa Tapanuli.

Sampai saat ini di kalangan etnis Lampung, khususnya Belalau, Menggala maupun Abung masih mengucapkan *Lappung* untuk menyebut *Lampung*.<sup>23</sup> Teriakan inilah yang dijadikan oleh sebagian kalangan pengamat sejarah sebagai latar-belakang sebutan *Lampung* untuk wilayah ini.

Pengamat lain memastikan latar belakang wilayah ini disebut *Lampung* adalah nama pelaku dalam legenda, yaitu *Silamponga*.<sup>24</sup> Namun demikian kedua kesimpulan itu sama-sama menjadikan legenda masyarakat Tapanuli inilah yang menjadi latar belakang sebutan *Lampung* untuk wilayah paling selatan pulau Sumatra.

- Menurut teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hilman Hadikusuma, S.H., bahwa orang Lampung berasal dari Sekala Bekhak, yaitu suatu daerah yang dihuni oleh suku Tumi penganut kepercayaan *Dinamisme* yang dipengaruhi ajaran *Hindu Bairawa*, mereka menyembah pohon *Lemasa* (Melasa) *Kepampang* dibawah kepemimpinan Ratu *Sekakhmong*. Suku Tumi itu selanjutnya dipengaruhi oleh 4 orang penyebar ajaran Islam dari *Pagaruyung* Sumatra Barat masing-masing mereka bernama Indar Gajah dengan gelar Umpu Bujalan Diway menduduki daerah Puncak, Pak Lang dengan gelar Umpu Pekhnong menduduki daerah Hanibung, Sikin dengan gelar Umpu Nyekhupa menduduki daerah Sukau dan Belunguh dengan gelar Umpu Belunguh menduduki daerah Kenali. Keempat Umpu tersebut merupakan cikal bakal Paksi Pak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 6.

*Sekala Bekhak* yang bersahabat dengan *Indarwati* yang bergelar *Putri Bulan* berkedudukan di daerah *Ganggiring*. Perkembangan selanjutnya menurut Hilman, *Umpu Nyekhupa* menurunkan *Jelma Daya*, *Umpu Bujalan Diway* menurunkan *Orang Abung*, *Umpu Pekhnong* menurunkan *Orang Pubian*, *Umpu Belunguh* menurunkan *Orang Pesisir* dan *Putri Bulan* menurunkan *Orang Tulang Bawang*.

## **2. Tipologi Masyarakat Adat Lampung**

Masyarakat Lampung secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung khususnya sub-suku *Lampung Peminggir* umumnya berdomisili di sepanjang pesisir pantai, seperti di kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung, Padang Cermin dan Kedondong. Penduduk sub-suku Lampung yang lain tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Besarnya penduduk Lampung yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, yaitu desa Bagelen Kecamatan Gedung Tataan merupakan daerah kolonisasi pertama di Indonesia. Dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, di samping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Dengan beraneka ragamnya suku bangsa, warganya mempunyai masing-masing adat istiadat sendiri-sendiri, yang secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu kelompok penduduk asli (suku Lampung) dan kelompok penduduk pendatang (dari luar daerah Lampung). Kelompok masyarakat suku asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat, yang secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat *Lampung Peminggir* yang merupakan mayoritas suku



Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat *Lampung Pepadun*.

Masyarakat Lampung terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya yang terjadi karena adanya migrasi penduduk yang mobilitasnya semakin tinggi. Ragam budaya dipengaruhi adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan, di antaranya sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan dan pola perkawinan. Dalam masyarakat adat penduduk asli Lampung terdiri dari dua *jurai*, yakni *jurai Pepadun* dan *jurai Saibatin*. Masyarakat Lampung *jurai Pepadun* lebih banyak bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa (daerah pedalaman) dan masyarakat Lampung *jurai Saibatin* bermukim di sepanjang pesisir pantai.

Dalam masyarakat *Lampung Peminggir* tidak mengenal istilah *pepadun* tetapi dengan istilah *saibatin*. *Saibatin* ini secara turun temurun dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh pada suatu kelompok atau lingkungan besar. Sedangkan masyarakat yang termasuk kelompok adat *Pepadun* berkediaman di daerah pedalaman seperti masyarakat adat *Abung*, *Pubian*, *Telusuku*, *Migow Pak/Tulang Bawang* (Menggala), *Sungkai/Way Kanan* yang merupakan pendatang dari wilayah Lampung Utara. Dalam masyarakat sudah lazim dilakukan upacara-upacara adat, yang umumnya ditandai dengan adanya upacara adat perkawinan atau pernikahan. Sementara kelompok masyarakat pendatang yang berasal dari luar Lampung, yang membawa budaya dan sistem adat masing-masing, tetapi antara yang satu dengan lainnya saling hormat menghormati. Bahkan terdapat asimilasi baik dari aspek adat maupun keseniannya. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, orang tidak merasa canggung apabila di suatu tempat umum, seperti di pasar ada yang mendengar beragam bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena itu merupakan karakteristik yang membedakan daerah Lampung dengan daerah lainnya di Indonesia.

Kelompok penduduk suku asli dalam masyarakat adat *Pubian* memiliki struktur hukum adat tersendiri. Dalam implementasi adatnya terdapat perbedaan antara adat yang satu dengan lainnya, yang secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat *Lampung Peminggir* dan masyarakat adat *Pepadun Pubian*. Satu hal yang membedakan dua kelompok penduduk asli itu, dimana masyarakat *Lampung Peminggir* tidak mengenal istilah *pepadun*; tetapi dengan istilah *Saibatin*. *Saibatin* secara turun temurun dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh pada suatu kelompok atau lingkaran besar. Dan masyarakat adat *Pepadun* terdiri atas masyarakat adat *Pubian*, *Abung*, *Menggala/Tulang Bawang*, *Sungkai/Way Kanan*. Upacara-upaca adat pada umumnya ditandai dengan adanya upacara perkawinan, khitanan dan kematian, yang dilakukan menurut tradisi setempat.

Dalam keluarga *Lampung*, mulai dari suatu keluarga rumah kecil sampai kerabat besar, *buwai*, *suku*, *tiyuh* dan *marga* atau *paksi* berstatus sebagai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki yang disebut *Punyimbang* artinya orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau *kebuwaian*. Dikenal *punyimbang adik warei* (*muakhi*; *muwaghi*), *punyimbang nuwou* balak, *punyimbang suku*, *punyimbang tiyuh*, dan *punyimbang buwai* atau *punyimbang paksi*. Tanpa adanya *punyimbang*, maka kerabat itu akan berantakan tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan untuk mengatur, membimbing dan mengarahkan anggota keluarga inti, keluarga luas, kerabat dan tetangga. Jika tidak ada yang mengatur atau tidak ada yang dituakan dalam musyawarah akan sulit membina dan menata keluarga, terlebih lagi ketika menyelesaikan persoalan yang krusial dalam pergaulan kehidupan keseharian.

Hubungan kekerabatan orang *Lampung* terjalin dikarenakan adanya hubungan pertalian darah, pertalian perkawinan, pertalian adat yang berporos pada garis keturunan laki-laki (*patrelineal*).

Adanya tutur bertutur dengan menggunakan istilah panggilan, maka dapat diketahui jauhnya hubungan kekerabatan dan kedudukan seseorang dalam hubungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab kekerabatan. Begitu pula yang secara tidak langsung menempatkan tugas dan peranan dalam pembagian kerja terhadap sesuatu kegiatan bersama, baik dalam upacara adat maupun kehidupan sehari-hari. Orang Lampung mewarisi sifat perilaku dan pandangan hidup yang disebut *Pi-il Pesenggiri*. Filosofi atau pandangan hidup itu masih nampak mendalam sebagai pegangan hidup di kalangan kerabat *Punyimbang* di lingkungan masyarakat beradat *pepadun*. Sementara di kalangan masyarakat *Pesisir* atau *Saibatin* sudah mulai lemah, karena pengaruh adat budaya Islam atau pandangan hidup Islam.

Istilah *Pi-il* menurut Hadikusuma mengandung arti rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan *Pesenggiri* mengandung arti nilai harga diri. Jadi *Pi-il pesenggiri* berarti perangai yang keras, yang tidak mau mundur terhadap tindakan dengan kekerasan, lebih-lebih yang menyangkut tersinggungnya nama baik keturunan, kehormatan pribadi dan kerabat, atau rasa harga diri. *Pi-il Pesenggiri* itu dalam versi *Lampung Pesisir* mengandung prinsip-prinsip: *Khepot delom mufakat* (prinsip persatuan); (2) *Tetengah Tetanggah* (prinsip persamaan); (3) *Bupudak waya* (prinsip penghormatan); (4) *Khopkhama delom bekehja* (prinsip kerja keras); (5) *Bupiil bupesenggiri* (prinsip bercita-cita dan keberhasilan). *Pi-il Pesenggiri* dalam versi adat *Lampung Pepadun* memiliki unsur-unsur yang sama hanya saja rumusannya adalah sebagai berikut: (1) *Pesenggiri* (prinsip kehormatan); (2) *Julukadek* (prinsip keberhasilan); (3) *Nemui nyimah* (prinsip penghargaan); (4) *Nengah nyappur* (prinsip persamaan); dan (5) *Sakai sambayan* (prinsip kerjasama).

*Pi-il Pesenggiri* itu mencerminkan sifat watak orang Lampung yang karenanya ada istilah: “ulah *Pi-il* (karena *pi-il*)

yaitu : *ulah pi-il jadei wawai-ulah pi-il menguwai jahel*; karena pi-il menjadi baik-karena pi-il membuat jahat”. Contoh kasus, karena cara penyelesaiannya baik, maka tanah dapat diberikan pada pendatang dengan ikhlas dan mudah. Tetapi karena penyelesaian itu tidak baik, maka demi secepat tanah tidak akan mau menyerah. Adapun yang dikatakan cara penyelesaian yang baik, ialah cara penyelesaian yang diterima oleh semua pemuka adat kampung, baik dari *kepunyimbang suku*, *tiyuh*, dan tua-tua masyarakat yang berpengaruh, yang berasal dari persekutuan hukum adat yang bersangkutan.

Kelompok penduduk Pendatang adalah masyarakat yang berasal dari luar wilayah/daerah Lampung, yang membawa sistem adat masing-masing. Dengan pola pemukiman yang mengelompok dan adanya keinginan untuk hidup dengan orang yang berasal dari daerah yang sama, maka adat istiadat daerah asalnya cenderung tetap dipertahankan. Meskipun demikian antara yang satu dengan lainnya saling hormat menghormati, bahkan terdapat asimilasi baik dari adat maupun budaya keseniannya.

Etnis Lampung, Jawa dan Sumatra selatan merupakan etnis terbesar, yang bukan saja menghuni wilayah perkotaan dan daerah sekitarnya, tetapi juga memenuhi daerah-daerah pedalaman sebagai petani yang mengelompok dalam komunitas etnisnya. Masing-masing membentuk perkampungan yang menyatu dalam satu wilayah kecamatan atau kabupaten tertentu, serta menjalin hubungan kerjasama antar etnis. Hal ini menjadi asset bagi pembangunan daerah *Sang Bumi Ghuwa Jughai* ini dengan kearifan lokalnya.

Secara garis besar Masyarakat adat Lampung dapat dibedakan kepada dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung beradat *Pepadun* yang disebut *Lampung Pepadun* dan masyarakat Lampung beradat *Saibatin* yang populer dengan sebutan *Lampung Pesisir*. Kedua kelompok masyarakat dimaksud

pada dasarnya berkembang diatas landasan dasar budaya yang sama, seperti bahasa, tulisan, filsafat pandangan hidup, namun berbeda pada pengembangan praktek yang dipengaruhi oleh kebiasaan lokal yang melingkarinya.

#### 1. Masyarakat Lampung Beradat Pepadun

Masyarakat Lampung beradat Pepadun ditandai dengan upacara adat pengambilan gelar kedudukan adat dengan menggunakan alat upacara yang disebut *Pepadun*. Pepadun merupakan singgasana yang digunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar adat. Oleh karena itu upacara ini disebut *Cakak Pepadun*. Kelompok masyarakat ini pada umumnya mendiami daratan wilayah Lampung yang jauh dari pantai laut seperti daerah Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang dan Gunung Sugih.

Secara kekerabatan masyarakat ini terdiri dari empat klan besar yang masing-masing dibagi lagi kedalam empat kelompok kerabat yang disebut *Buay*, dengan uraian dan rinciannya sebagai berikut:

##### a. Abung Siwo Megou, meliputi :

- 1) Buay Nunyai berlokasi di daerah Kota bumi
- 2) Buay Nuban, berlokasi di daerah Sukadana
- 3) Buay Subing, berlokasi di daerah Terbanggi Besar
- 4) Buay Selagai, berlokasi di daerah Terbanggi Besar
- 5) Buay Kunang, berlokasi di daerah Abung Barat
- 6) Buay Selaga, berlokasi di daerah Abung Barat
- 7) Buay Nyekhupa, berlokasi di daerah Gunung Sugih
- 8) Buay Unyi, berlokasi di daerah Gunung Sugih
- 9) Buay Tuha, berlokasi di daerah Padang Ratu

##### b. Mego Pak Tulang Bawang, meliputi :

- 1) Buay Balau, berlokasi di daerah Menggala
- 2) Buay Umpu, berlokasi di daerah Tulang Bawang Tengah
- 3) Buay Tegamoan, berlokasi di daerah Tulang Bawang Tengah

- 4) Buay Aji, berlokasi di daerah Tulang Bawang Tengah
- c. Buay Lima, meliputi :
  - 1) Buay Barasakti, berlokasi di daerah Barasakti
  - 2) Buay Semenguk, berlokasi di daerah Belambangan Umpu
  - 3) Buay Baradatu, berlokasi di daerah Baradatu
  - 4) Buay Pamuko, berlokasi di daerah Pakuan Ratu
  - 5) Buay Bahuga, berlokasi di daerah Bahuga
- d. Pubian, meliputi :
  - 1) Buay Manyarakat, berlokasi di daerah Kedaton, Gedong tataan dan Pagelaran
  - 2) Buay Tambapupus, berlokasi di daerah Gedong tataan dan Pagelaran
  - 3) Buay Bukujadi, berlokasi di daerah Natar

## 2. Masyarakat Lampung Beradat Saibatin

Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga Lampung Pesisir, karena pada umumnya mereka tinggal didaerah pesisir pantai. Masyarakat Lampung yang termasuk dalam ikatan adat Lampung Saibatin adalah sebagaimana berikut :

- a. Sekala Bekhak berlokasi di daerah Liwa, Kenali, Pesisir Tengah, Utara dan Selatan
- b. Semaka berlokasi di daerah kota Agung, Wonosobo, Cukuh Balak, Pardasuka, Kedondong, Waylima, Talang Padang
- c. Teluk berlokasi di daerah Teluk Ratai
- d. Melinting berlokasi di daerah Labuhan Maringgai dan Kalianda
- e. Khanau berlokasi di daerah pesisir Danau Ranau

Kedua kelompok masyarakat adat Lampung tersebut memiliki sistem adat yang berbeda. Kelompok masyarakat Saibatin dalam masalah kepemimpinan, proses penobatannya berbeda dari masyarakat adat Pepadun. Bagi masyarakat Lampung beradat Saibatin seorang yang diangkat sebagai pemimpin adat adalah berdasarkan hak waris yang diperoleh seara turun temurun. Jadi

pemimpin adat berlaku secara hierarki dalam lingkungan keturunan bangsawan. Pewaris pimpinan adat dan keluarga sebagai keturunan bangsawan memperoleh kedudukan adat yang berbeda dari warga masyarakat lainnya. Kedudukan dimaksud ditandai dengan gelar adat yang dinobatkan kepada masing-masing. Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat beradat Pepadun, dalam hal kepeimpinan adat mulanya hak kepemimpinan berada pada kerabat pendiri kampung dan selanjutnya dapat diperoleh oleh setiap orang yang mampu memenuhi syarat pengesahan dan pengakuan yang ditetapkan oleh pimpinan adat untuk dapat *Cakak Pepadun*.

#### **E. Potret Masyarakat, Agama dan Budaya Lampung**

Penduduk Lampung sebahagian besar adalah menganut agama Islam, selebihnya menganut agama Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Meskipun agama yang dianut masyarakat Lampung beragam, namun tidak pernah terjadi gangguan pada kelompok-kelompok agama yang berbeda, atau konflik di kalangan penduduk yang bersumber dari perbedaan paham atau agama. Toleransi antar umat beragama di kalangan penduduk nampaknya telah terwujud dengan baik, meski diakui masih ada hal-hal tertentu yang masih memerlukan pembinaan. Kondisi yang harmonis dan dinamis ini nampak pula dalam hubungan antara penganut agama dengan pemerintah. Ini terwujud dalam bentuk kerjasama dan saling pengertian secara timbal balik. Walaupun demikian pada awal tahun 2002 di Kalianda pernah terjadi kasus penolakan pendirian gereja HKBP oleh umat Islam Desa Lubuk Agung Kalianda, penolakan tersebut setelah ditelusuri lantaran pihak HKBP belum memperoleh izin ataupun persetujuan masyarakat Islam setempat. Akhirnya setelah di pindahkan lokasinya gereja HKBP dimaksud dapat didirikan atas rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Lampung Selatan.

Di lihat dari latar belakang etnis dan kelompok agama yang dianut, untuk beberapa suku tertentu sukar untuk menarik garis hubungan mengingat sudah sedemikian beragamnya kelompok-kelompok penganut agama setempat dengan latar belakang suku yang berbaur pula. Hanya dari kalangan penduduk yang ber-etnis Lampung, Banten, Bugis dan Padang dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya menganut agama Islam; sedangkan dari kalangan penduduk yang ber-etnis Timor seluruhnya beragama Katholik; suku Batak dan Menado kebanyakan beragama Kristen; pendatang dari Bali umumnya beragama Hindu, dan etnis Cina umumnya beragama Budha.

Keberadaan rumah ibadah sangat diperlukan sebagai sarana pembinaan umat dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan pengamalan ajaran agama secara benar dan konsisten. Sarana ibadah demikian besar fungsinya bagi tokoh-tokoh agama yang memainkan peran pentingnya dalam pembinaan dan pemberdayaan umat beragama, sehingga dapat memberikan kedamaian dan rasa sejuk terhadap umatnya.

Dinamika kehidupan masyarakat beragama dapat dikaji dari perkembangan sarana ibadah yang cenderung meningkat baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Dewasa ini di Lampung terdapat masjid, langgar atau musholla yang jumlah jamaahnya dari tahun ke tahun cenderung menurun. Kecenderungan itu dapat terjadi karena adanya alih fungsi dari langgar dan mushola menjadi masjid, dan di antara masjid juga ada yang sudah tidak berfungsi dikarenakan rusak dimakan usia. Berbeda dengan gereja Kristen Protestan maupun Katolik, tampak jumlahnya dari tahun ke tahun bertambah. Kondisi itu tidak berbeda dengan Pura, Vihara dan Klenteng. Sedangkan Kapel terjadi penambahan cukup mencolok pada tiga tahun terakhir ini.

Peran tokoh agama dalam masyarakat cukup strategis, baik sebagai pemimpin umat maupun pemimpin masyarakat. Keberadaan tokoh agama diakui dan berpengaruh besar dalam



menggerakkan laju pembangunan di daerah. Tokoh agama tidak saja mampu mempengaruhi kelompok jama'ahnya masing-masing, tetapi kenyataan menunjukkan mereka berpengaruh juga terhadap penguasa di bidang pemerintahan. Jika dikaji secara mendalam dan lebih luas, mereka mempunyai peran penting dalam pembangunan di tingkat daerah dan bahkan ada juga di tingkat nasional. Pengakuan itu sangat meyakinkan di bidang spiritual keagamaan, terutama dalam hal penumbuhan semangat toleransi dan memelihara sikap saling menghormati, sehingga pembinaan kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud. Meski dalam perkembangannya dewasa ini tampak berbagai kekurangan dan kelemahan.

Untuk mengembangkan dan memelihara eksistensi masing-masing agama, diakui bahwa setiap agama memiliki tokoh agama yang disebut ulama, da'i, mubaligh, pastor, pendeta, bikhu dan lain sebagainya. Adapun jumlah pastor saat ini belum dapat dihitung secara pasti. Sedangkan untuk tokoh agama Islam yang ada yaitu mubaligh, khotib, da'i dan ulama, jumlahnya cenderung meningkat.

Dalam kehidupan masyarakat, terlebih masyarakat yang terdiri atas berbagai macam etnis dengan latar sosial budaya dan agama yang dianut, akan berbeda pula adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungannya, sehingga untuk terwujudnya integrasi, konsensus atau harmoni adalah merupakan suatu keharusan. Apabila adaptasi itu tidak ada dalam suatu masyarakat, maka akan terjadi konflik. Sebab, konflik dan integrasi pada dasarnya merupakan dua sisi dari suatu kenyataan yang sama: konflik dan integrasi adalah merupakan dua gejala yang melekat bersama-sama di dalam setiap masyarakat.

Realitas geografis dan kemajemukan Lampung, pada prinsipnya juga menjadi aset dan representasi peta kerukunan umat Beragama di Indonesia. Meskipun kekerasan atas nama agama tidak menonjol di daerah ini seperti kasus Ambon dan

Poso, tetap daerah ini tetap memiliki potensi konflik dan karenanya perlu dilakukan pemetaan kerukunan umat beragama untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadi disintegrasi bangsa yang dilatari konflik atas nama agama.

Kenyataan pada satu dasawarsa terakhir, menunjukkan pada berbagai permasalahan sangat besar atau multi dimensional. Hal paling menonjol, misalnya, konflik horizontal atas nama agama. Kekerasan atas nama agama itu kini tetap menjadi ancaman dan dari berbagai kasus dipelbagai wilayah telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat maupun pemerintah, yaitu rusaknya/hancurnya infrastruktur masyarakat, seperti rumah tinggal, rumah ibadah, pasar, toko, panti asuhan, pabrik, gedung pengadilan, kantor polisi dan kantor pemerintah lainnya. Di samping itu juga rusaknya barang, seperti kendaraan bermotor, dan peralatan pabrik.

Lebih lanjut, konflik sosial dalam bentuk kerusuhan berdarah itu juga berdampak sosio-psikologik dan sosio-kultural yang memprihatinkan bagi masyarakat yang daerahnya dilanda kerusuhan. Tumbuhnya depresi sosial, traumatik, keinginan balas dendam, dan menguatnya fenomena *Sosial tension*, *cultural disintegration* dan rendahnya *Sosial trust* masyarakat terhadap Pemerintah merupakan contoh riil dari akibat konflik berdarah itu.

Secara teoretik, terdapat beberapa faktor penyebab konflik sosial. *Pertama*, pada tataran makroskopik, konflik sosial disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam segala bidang yang sentralistik dengan dampak ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan.

*Kedua*, pada tataran mikroskopik, konflik sosial bernuansa agama sebagaimana di Ambon dan Poso adalah akibat adanya kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial keagamaan masyarakat lokal.

Secara empirik, cukup banyak faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial. *Pertama*, pada tataran makroskopik, konflik sosial disebabkan oleh adanya kesenjangan yang nyata dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya. Kasus pemberian kredit tanpa agunan kepada effis tertentu (Cina) sementara etnis pribumi harus menggunakan agunan dan persyaratan lain yang berbelit-belit adalah contoh adanya ketidakadilan ekonomi.

*Kedua*, pada tataran mikroskopik, terlihat adanya pengabaian masyarakat lokal untuk dapat mengembangkan multikulturalisme dengan model yang sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, telah berakibat pada terhentinya pengembangan toleransi antarkelompok etnis dan agama yang digantikan oleh kebijakan keseragaman yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika kran kebebasan dibuka, masyarakat lokal bingung mendefinisikan kebebasan itu yang akhirnya banyak mendefinisikan kebebasan secara keliru.

Realitas inilah yang dapat dijadikan argumen empirik di atas kiranya dapat dijadikan dasar akan perlunya penyusunan peta yang menggambarkan potensi konflik dan kerukunan kehidupan umat beragama di Lampung, sebagaimana misalnya dengan belahan wilayah lain seantero Indonesia. Pemetaan kerukunan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi kondisi kehidupan beragama, hubungan antar umat beragama, potensi-potensi konflik, kecenderungan hubungan antar umat beragama, institusi-institusi lokal yang berperan dalam menjaga kerukunan, usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga integrasi sosial, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung lahirnya kondisi integrasi sosial masyarakat di Lampung yang memiliki karakter multikultural.

Pemetaan kerukunan kehidupan beragama ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membangun dan merawat harmoni sosial yang telah ada selama ini, sekaligus mencari alternatif-

alternatif baru yang lebih mengena dan lebih berbasis pada realitas sosial. Agar pengkajian ini lebih dapat melihat realitas sosial dalam masyarakat, maka akan dilakukan di daerah yang masyarakatnya mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi dari segi suku, etnik dan agama. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan diperkuat dengan metode kuantitatif. Dengan demikian, analisis terhadap hasil pengamatan, wawancara, dan data kualitatif akan diperkuat dengan hasil angket sehingga semua argument kualitatif akan didukung dan diperluas.

Secara empiris, adat merupakan budaya yang secara umum ada dalam setiap tatanan hidup masyarakat, dimanapun mereka berada.

Berdasarkan teori Koentjoroningrat “Adat sebagai bagian dari sebuah kebudayaan yaitu berperan sebagai penggerak untuk menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya hidup berkelompok dan mendorong kerjasama agar tujuan tercapai”<sup>25</sup>

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa adat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan, yang menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat<sup>26</sup>.

Demikian halnya dengan Adat, baik dalam pengertiannya sebagai bagian dari kebudayaan maupun sebagai lembaga kemasyarakatan, secara terstruktur terdapat pada kehidupan manusia, dimana masyarakatnya terikat dengan norma-norma bertingkah laku dalam kehidupan individu, keluarga, bertetangga, bermasyarakat dan menjadi pegangan masyarakat dalam sistem pengendalian sosial.

---

<sup>25</sup> Hasan Sadly, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1983.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

Dengan demikian adat itu ada dalam kehidupan manusia karena kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok.

Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Agama berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan dan alam ghaib. Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan bagian yang inherent dalam diri manusia atau disebut juga fitrah kemanusiaan.<sup>27</sup> Menurut *William James*, selama manusia memiliki naluri cemas dan harap, selama itu pula ia beragama.<sup>28</sup>

Agama menjadi kebutuhan hidup manusia, karena lewat agama dapat menggantikan rasa cemas dengan tawakkal dan rasa harap dengan sabar. Karena diyakini bahwa Tuhan akan melindungi hamba-Nya dengan sifat Maha Penyayang-Nya dan memenuhi harap dan pintanya dengan sifat Maha Kasih-Nya.

Dalam pandangan ahli psikologi, agama merupakan kebutuhan apa yang ada di dalam diri dan interaksi dengan lingkungan di luar dirinya.<sup>29</sup> Sedangkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan berinteraksi dalam komunitasnya. Dengan demikian agama juga merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat.

Dengan demikian agama itu ada dalam kehidupan manusia untuk mengatur kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok.

---

<sup>27</sup> Suryana Af, A. Toto dkk., Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara, Bandung, 1997., h. 26.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid., h. 24.

## **F. Adat-Budaya, Agama dan Kehidupan Keagamaan Pada Masyarakat Lampung**

### **1. Adat-Budaya**

Secara empiris, adat merupakan budaya yang secara umum ada dalam setiap tatanan hidup masyarakat, dimanapun mereka berada.

Berdasarkan teori Koentjoroningrat “Adat sebagai bagian dari sebuah kebudayaan yaitu berperan sebagai penggerak untuk menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya hidup berkelompok dan mendorong kerjasama agar tujuan tercapai”<sup>30</sup>

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa adat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan, yang menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat.<sup>31</sup>

Demikian halnya dengan Adat, baik dalam pengertiannya sebagai bagian dari kebudayaan maupun sebagai lembaga kemasyarakatan, secara terstruktur terdapat pada kehidupan manusia, dimana masyarakatnya terikat dengan norma-norma bertingkah laku dalam kehidupan individu, keluarga, bertetangga, bermasyarakat dan menjadi pegangan masyarakat dalam sistem pengendalian sosial.

Dengan demikian adat itu ada dalam kehidupan manusia karena kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok.

Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Agama berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan dan alam ghaib. Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hal

---

<sup>30</sup> Hasan Sadly, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1983.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

ini menunjukkan bahwa agama merupakan bagian yang inherent dalam diri manusia atau disebut juga fitrah kemanusiaan.<sup>32</sup> Menurut *William James*, selama manusia memiliki naluri cemas dan harap, selama itu pula ia beragama.<sup>33</sup>

Agama menjadi kebutuhan hidup manusia, karena lewat agama dapat menggantikan rasa cemas dengan tawakkal dan rasa harap dengan sabar. Karena diyakini bahwa Tuhan akan melindungi hamba-Nya dengan sifat Maha Penyayang-Nya dan memenuhi harap dan pintanya dengan sifat Maha Kasih-Nya.

Dalam pandangan ahli psikologi, agama merupakan kebutuhan apa yang ada di dalam diri dan interaksi dengan lingkungan di luar dirinya.<sup>34</sup> Sedangkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan berinteraksi dalam komunitasnya. Dengan demikian agama juga merupakan kebutuhan manusia dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat.

Dengan demikian agama itu ada dalam kehidupan manusia untuk mengatur kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok.

## **2. Nilai Dasar Filsafat Budaya Masyarakat Lampung**

Suku Lampung adalah etnis pribumi yang sejak berabad-abad telah membangun suatu sistem kehidupan sosial tertentu yang dicirikan oleh keunikan tradisi adat budaya lokalnya yang cukup menarik. Kekhususan dan keunikan tradisi adat budaya Lampung, di samping tercermin dalam keunikan bahasa dan tulisan yang telah ada dan digunakan sejak adanya suku Lampung itu sendiri, juga oleh filsafat hidup dan pandangan hidup sosial yang dianutnya yaitu *Pi'il Pusenggighi* yang sarat nilai keagamaan,

---

<sup>32</sup> Suryana Af, A. Toto dkk., Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara, Bandung, 1997., h. 26.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., h. 24.

melekat dan menyatu dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Nilai dasar filsafat sosial masyarakat adat Lampung yang termuat dalam pandangan hidup *Pi'il Pusenggighi* ada 4 butir, yaitu:

1. *Nemui Nyimah* adalah nilai dasar filsafat keterbukaan dan saling memberi dalam praktek kehidupan bermasyarakat
2. *Bejuluk Buadok* adalah nilai dasar filsafat saling menghargai dan toleransi dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
3. *Nengah Nyampokh* adalah nilai dasar filsafat partisipasi, turut serta dan membaur dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
4. *Sakai Sembaian* adalah nilai dasar filsafat tolong menolong dan gotong-royong dalam praktek sosial kehidupan bermasyarakat

Dari segi bahasa, suku Lampung memiliki bahasa lisan (Bahasa Lampung) yang khusus dan berbeda dari rumpun bahasa yang ada di nusantara. Demikian pula dari segi budaya tulis-menulis, suku Lampung mempunyai dan menggunakan jenis tulisan khusus, yaitu Aksara Lampung (*Ka-Ga-Nga*)<sup>35</sup> dan berbeda dari jenis aksara lokal lainnya yang ada di nusantara misalnya Aksara Jawa (Ho-No-Co-Ro-Ko), Aksara Batak (A-Ha-Na) dan Aksara Bugis (Ka-Ga-Nga-Kak).

Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat adat Lampung memiliki struktur kepemimpinan adat yang baku dan melembaga sebagai panutan masyarakat yang dijunjung dan ditaati. Struktur kepemimpinan lembaga adat dimaksud secara hierarkhis melambangkan 4 unsur pokok pemerintahan adat secara turun menurun menggambarkan tekad dan semangat kebersamaan yang dinyatakan dalam semboyan *Panji pak Sekala Bekhak*, yaitu tegaknya kepemimpinan masyarakat dengan empat unsur penyangga. Seorang pemimpin pemerintahan adat yang sah dan

---

<sup>35</sup> Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978, h. 3.



diakui, apabila didukung oleh minimal 4 pimpinan perwakilan secara berjenjang. Misalnya seorang pimpinan adat yang disebut Sebatin menjadi sah dan diakui apabila telah membawahi minimal 4 orang Raja, begitu pula Raja, sah sebagai Raja apabila telah membawahi minimal 4 orang Raden dan seterusnya seorang Raden harus ditopang minimal oleh 4 orang Minak dan seorang Minak menjadi sah dan diakui apabila ditopang oleh minimal 4 orang Kimas. Secara hererkhis pimpinan kesatuan adat tersusun sebagai berikut:

Pangikhan / Sutan minimal memiliki 4 Sebatin

Sebatin minimal memiliki 4 Raja

Raja minimal memiliki 4 Raden

Radin minimal memiliki 4 Minak

Minak minimal memiliki 4 Kimas

Kimas minimal memiliki 4 Mas

Mas minimal memiliki 1Kuta, 1 Jaga, 1 Layang dan 1 Bunga

Kuta, Jaga, Layang dan Bunga adalah kedudukan terakhir dalam struktur kepemimpinan adat Lampung.

4 kedudukan adat yang menopang keabsahan kedudukan di atasnya disebut *Pak Pendia Paku Sakha* yang mempunyai tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing sesuai kedudukannya dalam komposisi adat, yaitu Penetop Embokh, Suku Kikhi, Suku Kanan dan Lamban Lunik.

### **3. Kehidupan Keagamaan Pada Masyarakat Lampung**

Masyarakat adat Lampung dalam kehidupan sosial keagamaan sangat kental dengan nuansa keislaman yang taat dan fanatik. Sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari terkesan Lampung adalah Islam dan Islam adalah Lampung, yang berarti tidak ada orang Lampung yang menganut agama selain Islam dan nilai-nilai ajaran Islam menyatu dengan standar nilai adat budaya Lampung. Sehingga nilai-nilai ke-Islaman dan adat terintegrasi

dalam perilaku sosial kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung. Hal ini tampak dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari dan pelaksanaan berbagai prosesi adat, misalnya dalam acara pengarakan pengantin dari rumah kediaman pimpinan adat ke rumah shahibul hajat, sepanjang jalan pasangan pengantin diiringi dengan regu arak-arakan yang melantunkan Shalawāt Rasul dan sya'ir-sya'ir keislaman. Penobatan Gelar Adat pada acara puncak prosesi pernikahan yang dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Qur`ān oleh kedua pengantin dan para pendampingnya masing-masing, dilengkapi dengan pesan-pesan keagamaan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian agar dapat memelihara prestise kelompoknya, para remaja di tiap-tiap kelompok desanya masing-masing menyiapkan diri agar kelak dapat pentas melantunkan ayat suci Al-Qur`ān pada saat prosesi pernikahannya.

Begitu juga dalam praktek adat pergaulan pada setiap lapisan masyarakat penuh dengan praktek simbol-simbol keislaman, misalnya dalam acara Muli-Maghanai (pergaulan bujang-gadis) seperti acara Nyaghak Hibos (memisahkan lidi daun aren dari daunnya), Nutu Geghepung (menumbuk beras menjadi tepung) dan Buasagh-asaghan (mencuci dan membersihkan peralatan) yang digunakan dalam acara prosesi puncak hajatan seperti tikar, ambal dan lain-lain, disyaratkan harus mengenakan kopiah, baju lengan panjang, celana panjang berlapis kain sarung setengah lutut bagi para bujang, serta mengenakan baju kebaya panjang, kerudung panjang dan sarung bagi para gadis.

Demikian juga halnya sebuah kesuksesan hasil usaha sudah menjadi adat kebiasaan untuk mengadakan acara dalam bentuk syukuran. Misalnya untuk memulai musim tanam senantiasa dimuali dengan acara Ngebabali untuk memohon perlindungan dari petaka dan hama tanaman dan kesehatan. Demikian pula seusai panen diadakan apa yang disebut dengan Ngumbai yang

juga merupakan bentuk syukur atas hasil panen yang didapatkan. Ngebabali atau Ngumbai ini biasanya dilaksanakan di ladang atau sawah atau di tempat berladang atau panen itu sendiri.<sup>36</sup>

Dalam segi pendidikan pada kalangan generasi awal kemerdekaan hingga akhir angkatan Orde Lama masih sangat kental dengan sebutan ngaji atau mondok bagi para pemuda yang keluar menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan model pendidikan yang membudaya di kalangan masyarakat Lampung saat itu. Bahkan seorang tokoh nasional asal Lampung, yaitu Alamsyah Ratu Perawiranegara, seorang mantan Mentri Agama R.I. pada era Orde Baru, menurut pengakuannya di depan para santri Pondok Modern Darussalam Gontor dalam kunjungan resminya sebagai Mentri Agama adalah salah seorang arbituren Pondok Pesantren Sri Bandung Sumatra Selatan. Pada periode awal kemerdekaan dan sebelumnya, di Lampung telah terdapat beberapa lembaga pendidikan pesantren yang cukup dikenal untuk wilayah Sumatra bagian selatan. Misalnya Pondok Pesantren Kiayi Ghalib di Bambu Seribu (Peringsewu sekarang) adalah salah-satu pesantren yang turut andil mengkader dan mendidik seorang ulama dan pimpinan keagamaan yang cukup terkenal, yaitu Prof. Syafi'i Abdul Karim seorang mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya yang pertama. Sebelumnya telah didapatkan juga Pondok Pesantren Banding Agung yang terdapat di desa Banding Agung Kecamatan Kedondong Lampung Selatan, salah-satu alumninya adalah Kiayi Ghalib pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Kiayi Ghalib Bambu Seribu. Kedua pondok pesantren dimaksud dikunjungi oleh para santri dari berbagai pelosok Lampung dan bahkan Sumatra Selatan, karena tidak sedikit para santri yang berasal dari daerah Komring Sumatra selatan.

---

<sup>36</sup>Fachruddin dan Suharyadi, *Falsafah Pi'il Pasenggiri Sebagai Norma Tata Krama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Arian Jaya, Bandar Lampung, 1986.

## **G. Adat Budaya Lampung Sebagai Alternatif Tawaran Solusi Konflik Keagamaan di Lampung<sup>37</sup>**

Kembali mencoba mengingat apa yang telah diuraikan terdahulu mengenai Adat Budaya dan Agama dalam kehidupan masyarakat dijelaskan bahwa adat budaya itu ada dalam kehidupan manusia untuk kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok, sedangkan agama itu ada dalam kehidupan manusia untuk mengatur kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok. Atau dapat dijelaskan bahwa adat budaya tumbuh untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan agama ada untuk menstabilkan kebutuhan hidup manusia. Jadi adat budaya merupakan fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan agama merupakan fasilitas pengendalian kebutuhan hidup agar lebih mashlahat baik secara individu maupun kolektif.

Memperhatikan pengertian dan fungsi antara *adat budaya* dan *agama* dalam konteks kehidupan, sementara ego keagamaan yang sering menimbulkan konflik sosial keagamaan dalam interaksi antar masing-masing pemeluk agama, maka sangat mungkin sekali apabila *adat budaya* ditawarkan sebagai alternatif baik bentuk, teori maupun teknis penyelesaian konflik sosial keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Karena apabila sudah terjadi konflik antar pemeluk agama maka itu merupakan masalah yang mengganggu keamanan, harta-benda dan ekonomi. Itu semua merupakan kebutuhan hidup manusia baik secara individu ataupun kelompok.

Adapun bentuk penyelesaiannya adalah mengadopsi bentuk penyelesaian konflik yang mengadopsi dalam budaya Lampung,

---

<sup>37</sup>Bunyana Sholihin, "*Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Keagamaan*" (makalah Seminar), Puslit IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007.

yaitu memerankan kedudukan, tugas dan tanggung-jawab masing-masing *Jakhu Suku Pendia Paku Sakha* secara silang. Dalam praktek adatnya penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Lampung, apabila konflik terjadi inter masyarakat *Jakhu Suku Kikhi*, maka yang bertugas dan bertanggung-jawab menyelesaikannya adalah anggota masyarakat *Jakhu Suku Kanan* yang ditugaskan oleh pimpinan *Jakhu Sukunya*, begitu sebaliknya. Apabila konflik terjadi antar anggota masyarakat adat *Jakhu Suku Penetop Embokh*, maka yang bertugas dan bertanggung jawab menyelesaikan konflik adalah anggota masyarakat adat *Jakhu Suku Lamban Lunik (Jakhu Suku Daging Batin)*. Badan yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik melaksanakan tugasnya menggunakan ungkapan-ungkapan filsafat maupun pantun-pantun penyejuk yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang tercakup dalam 4 norma dasar filsafat sosial masyarakat adat Lampung, yaitu *Pi'il Pusanggikhi*. Upaya semacam ini dilakukan dengan target bertahap, apabila tidak selesai satu kali, maka diulang dua atau tiga kali. Ternyata sebesar apapun konflik masyarakat yang terjadi ditengah masyarakat adat Lampung umumnya terselesaikan dengan bentuk dan teknis penyelesaian adat.

# BAB III

## GAMBARAN UMUM

### KABUPATEN DAN KOTA

### DI PROVINSI LAMPUNG

Pada bab ini dideskripsikan gambaran umum Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung meliputi aspek historis, geografis, demografis, kehidupan sosial ekonomi, sosial politik , kehidupan beragama, adat dan Budaya.

#### **A. Kota Bandar Lampung**

##### **1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung**

Sebelum tanggal 18 maret 1964 provinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang No.14 tahun 1964 Keresidenen Lampung ditingkatkan menjadi provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 Kecamatan 30 Kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 Kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dengan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan dalam kota Bandar Lampung, kota Bandar Lampung memiliki 13 Kecamatan dengan 98 kelurahan.

Sejak berdirinya tahun 1965 sampai dengan saat ini, kota Bandar Lampung telah dipimpin oleh Walikota/KDH Tingkat II Bandar Lampung berturut-turut sebagai berikut :

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Sumarsono                   | Priode 1956–1957 |
| 2. H. Zainal Abidin PA         | Priode 1957–1963 |
| 3. Alimudin Umar, SH           | Priode 1963–1969 |
| 4. Drs.HM. Thabrani Daud       | Priode 1969–1976 |
| 5. Drs. H. Fauzi Saleh         | Priode 1976–1981 |
| 6. Drs.H. Zulkarnain Subing    | Priode 1981–1986 |
| 7. Drs.H. A. Nurdin Muhayat    | Priode 1986–1995 |
| 8. Drs. H. Suharto             | Priode 1996–2004 |
| 9. Drs. H. Eddy Sutrisno, M.Pd | Priode 2005–2010 |

## **2. Aspek Geografis dan Demografis Kota Bandar Lampung**

Daerah Propinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288.35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatra. Secara georafis Propinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur-Barat berada antara : 103.40 derajat -105.50 derajat Bujur Timur dan Utara-

Selatan berada antara : 6.45 derajat– 3.45 derajat Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan :

- a) Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara
- b) Selat Sunda, di sebelah Selatan
- c) Laut Jawa, di sebelah Timur
- d) Samudra Indonesia, di sebelah Barat

Propinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota propinsi Lampung. Oleh karena itu kota Bandar Lampung selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak pada tempat yang strategis karena sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatra dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada  $5^{\circ} 20'$  sampai  $5^{\circ} 30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ} 28'$  sampai dengan  $105^{\circ} 37'$  bujur timur. Letak tersebut berada pada teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatra.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah  $192 \text{ km}^2$  terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Secara administratif batas daerah kota Bandar Lampung adalah :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan



- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 70 meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang terdiri atas :

- (1) Daerah Pantai, yaitu sekitar Teluk Betung Bagian Selatan dan Panjang
- (2) Daerah Perbukitan, yaitu sekitar Teluk Betung Bagian Utara
- (3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan.
- (4) Teluk Lampung dan Pulau-Pulai kecil di bagian selatan.

Di tengah-tengah mengalir sungai-sungai, yaitu sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur di Wilayah Tanjung Karang, Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di Wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada di bagian barat, sedangkan daerah hilir berada di selatan, yaitu pada dataran pantai. Luas wilayah yang datar sampai landai 60%, landai sampai miring 35%, sangat miring sampai curam 4%.

Wilayah kota Bandar Lampung sebagian merupakan perbukitan, yang diantaranya bernama Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing dan Gunung Kapuk.

Kecamatan-kecamatan di Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan sebagai berikut :

TABEL : NAMA-NAMA KECAMATAN DI BANDAR LAMPUNG

Kecamatan	Ibukota	Luas wilayah (km2)
Teluk Betung Barat	Bakung	20,54
Teluk Betung Selatan	Sukaraja	8,63
Panjang	Panjang Selatan	23,99
Tanjung Karang Timur	Kota Baru	21,10
Teluk Betung Utara	Kupang Kota	9,95
Tanjung Karang Pusat	Palapa	5,67
Tanjung Karang Barat	Gedong Air	17,43
Kemiling	Sumberejo	22,89
Kedaton	Kampung Baru	8,88
Rajabasa	Rajabasa	13,02
Tanjung Seneng	Tanjung Seneng	12,62
Sukarame	Sukarame	16,87
Sukabumi	Sukabumi	10,59
Jumlah		192,18

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, 2006

TABEL 3 : NAMA IBU KOTA KECAMATAN DAN KETINGGIANYA,  
DAN JUMLAH KELURAHAN DI KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2007

KECAMATAN	IBU KOTA	TINGGI PUSAT (M)	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Teluk Betung Barat	Bakung	10	8
Teluk Betung Selatan	Sukaraja	2	11
Panjang	Panjang Selatan	5	7
Tanjung Karang Timur	Kota Baru	400	11
Teluk Betung Utara	Kupang Kota	300	10
Tanjung Karang Pusat	Palapa	400	11
Tanjung Karang Barat	Gedong Air	100	6
Kemiling	Sumber Rejo	147	7
Kedaton	Kampung Baru	700	8
Rajabasa	Rajabasa	500	4
Tanjung Seneng	Tanjung Seneng	700	4
Sukarame	Sukarame	700	5
Sukabumi	Sukabumi	700	6
Jumlah			98

TABEL 4 : BANYAKNYA KELURAHAN MENURUT LETAK GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2007

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LETAK GEOGRAFI		TOPOGRAFI	
		PANTAI	BUKAN PANTAI	DATAR	BERBUKIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Teluk Betung Barat	8	3	5	7	1
Teluk Betung Selatan	11	4	7	7	4
Panjang	7	5	2	-	7
Tanjung Karang Timur	11	-	11	10	1
Teluk Betung Utara	10	-	10	8	2
Tanjung Karang Pusat	11	-	11	10	1
Tanjung Karang Barat	6	-	6	2	4
Kemiling	7	-	7	2	5
Kedaton	8	1	7	8	-
Rajabasa	4	-	4	4	-
Tanjung Seneng	4	-	4	4	-
Sukarama	5	-	5	5	-
Sukabumi	6	-	6	5	1
Jumlah	98	13	85	72	26

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2006 sebesar 767.036 jiwa, yang tersebar di 13 Kecamatan, terdiri dari 386.042 laki-laki atau 50,33 persen dan 380.994 perempuan atau 49,64 persen dengan laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2002-2006 rata-rata 1,61 persen.

Kepadatan penduduk rata-rata 3.991,24 jiwa per Km<sup>2</sup>, dengan persebaran tidak merata. Terpadat pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan 13.336,68 jiwa per Km<sup>2</sup>, terjarang pada Kecamatan Tanjung Seneng dengan kepadatan 2.160,22 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Jika ditinjau dari umur penduduk, maka pada umumnya penduduk berusia muda, yaitu di bawah 18 tahun berjumlah 38,37 persen sedangkan yang berusia 60 tahun ke atas hanya 4,57 persen, sehingga penduduk usia produktif berkisar 57,06 persen.

Masyarakat yang berada di Kota Bandar Lampung ini terdiri dari masyarakat Lampung sendiri dan masyarakat pendatang yang terdiri dari beragam suku. Suku pendatang yang mendominasi adalah suku Jawa, selanjutnya Padang, keturunan Cina, Batak, Bugis, Palembang, Bengkulu, Sunda (Banten), keturunan Arab dan beberapa suku lain dalam jumlah yang kecil. Dari 13 kecamatan di Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat kemajemukan yang tertinggi adalah kecamatan Teluk Betung Barat.

### **3. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Bandar Lampung**

Sebagian besar penduduk Kota Bandar Lampung bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Jika ditinjau dari jenis usaha yang dikembangkan, maka komposisi tenaga kerja dan lapangan usaha sampai pada tahun 2006, sebagai berikut :

Tabel : Jenis Usaha di Kota Bandar Lampung

Jenis Usaha	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase (%)
1. Pertanian	26.268	8,20
2. Pertambangan & Galian	696	0,22
3. Industri	22.788	7,11
4. Listrik, gas dan air	2.784	0,86
5. Konstruksi	23.148	7,22
6. Perdagangan	103.080	32,16
7. Komunikasi	29.064	9,07
8. Keuangan	17.004	5,30
9. Jasa-jasa	95.700	29,86

Sumber : Profil Potensi Kota Bandar Lampung, 2007

Masyarakat Lampung mendominasi posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan di instansi pemerintah lainnya. Masyarakat pendatang (Jawa, Padang, Batak, Sunda dan beberapa suku lainnya) ada juga yang menduduki jabatan strategis pada instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung, namun dalam jumlah yang kecil.

Masyarakat pendatang lebih banyak bekerja sebagai wiraswasta, menguasai sektor perdagangan dalam jumlah besar dan kecil, berkebun atau bertani, masyarakat di sekitar pantai menjadi nelayan, dan bidang usaha swasta yang lain. Sehingga penguasaan sumberdaya ekonomi strategis banyak dikuasai oleh masyarakat pendatang (Padang, Jawa, Batak dan keturunan Cina). Seperti pengusaha di bidang transportasi didominasi oleh suku Jawa. Perdagangan maupun bidang peragenan dan retail, pengusaha rumah makan didominasi suku Padang, keturunan Cina dan Jawa. Pengusaha di bidang otomotif (dealer kendaraan bermotor) didominasi keturunan Cina. Sedangkan pengusaha di bidang pertanian dan perindustrian didominasi oleh suku Jawa dan Sunda (Banten).

#### **4. Kehidupan Sosial Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung**

##### **a. Kondisi Sosial Politik**

Berdasarkan aspirasi politik, penduduk didominasi oleh Partai Golongan Karya selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan partai-partai lainnya dalam jumlah partisan yang relatif kecil. Organisasi kepemudaan *onderbaw* partai politik didominasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Sedangkan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh suku Lampung yang beragama Islam. Pemegang jabatan strategis didominasi suku Lampung yang juga beragama Islam. Di lingkungan pemerintahan, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2006 adalah berjumlah 10.630 orang dengan jumlah pegawai dengan golongan I berjumlah 130 orang (1 persen), pegawai dengan golongan II berjumlah 2.194 orang (21 persen), pegawai dengan golongan III berjumlah 7.050 orang (66 persen) dan pegawai dengan golongan IV berjumlah 1.256 orang (12 persen).

Dengan komposisi pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2006 berjumlah 1.190 orang dengan pegawai Eselon II berjumlah 26 orang (2 persen), pegawai Eselon III berjumlah 151 orang (13 persen) dan pegawai Eselon IV berjumlah 1.013 orang (85 persen).

##### **b. Kondisi Sosial Budaya**

Bahasa daerah tidak dipergunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Bahasa Lampung sebagai bahasa daerah dipelajari di sekolah-sekolah pada tingkat dasar, namun dalam keseharian, Bahasa Lampung dipergunakan hanya dalam komunitas suku Lampung sendiri. Bahasa yang mendominasi adalah bahasa

Indonesia, walaupun demikian bahasa daerah Jawa dan Sunda Banten tidak asing terdengar dalam percakapan sehari-hari.

Tradisi masyarakat yang berkembang lebih banyak dalam nuansa keagamaan, dalam bentuk perayaan hari-hari besar keagamaan, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Ada perkembangan baru, sejak beberapa tahun terakhir ini tradisi Barong-sai dari masyarakat keturunan Cina sudah mulai hidup kembali dimana ketika hari raya Cina, masyarakat keturunan Cina mempertunjukkan tradisi Barong-sai dan mengadakan perjalanan berkeliling Kota Bandar Lampung.

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur dan hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung.

Secara umum struktur hukum adat tersebut dapat dibedakan dalam dua kelompok besar.

- a) Masyarakat adat Peminggir, yang berkediaman di sepanjang pantai pesisir termasuk adat Krui, Ranau, Komering sampai Kayu Agung.
- b) Masyarakat adat Pepadun yang berdiam di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari masyarakat adat Abung (Abung Siwo Mego), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala/Tulang Bawang (Mego Pak) dan Buay Lima.

Upacara-upacara adat pada umumnya ditandai dengan adanya perkawinan/pernikahan yang dilakukan menurut tata cara adat tradisional disamping hukum Islam yang menurut keyakinan merupakan bagian dari Tata cara adat itu sendiri.

Tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan Jujur dengan menurut garis keturunan Patrilenial, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada mempelai perempuan untuk menyiapkan sesan

berupa alat-alat keperluan rumah tangga. Sesan tersebut diserahkan kepada pihak laki-laki pada waktu upacara perkawinan berlangsung sekaligus sebagai penyerahan formal (secara adat) si mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki. Dengan demikian secara hukum adat maka putuslah hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orang tuanya. Upacara perkawinan tersebut dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dengan cara adat Ibal, serbo, Bumbang Aji, Intar Padang, Antar Manok, dan seabambahan.

Dalam banyak hal suatu ciri yang disebut dengan Geneologis sangat dominan pada masyarakat Lampung, dimana suatu ikatan masyarakat hukum adat dengan anggota-anggota didasarkan atas suatu pertalian keturunan, baik karena ikatan maupun hubungan darah.

Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian penduduk masyarakat Lampung disimpulkan dalam 5 (lima) Prinsip, yaitu :

1) **Pi'il Pesenggikhi,**

Pi'il Pesenggikhi, diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu, seseorang dapat mempertahankan apa saja (termasuk nyawanya) demi untuk mempertahankan pi'il pesenggikhi tersebut. Selain dari itu dengan pi'il pesenggikhi seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak, kendatipun hal itu akan merugikan dirinya sendiri secara materi.

2) **Sakai Sambayan**

Sakai Sambayan, meliputi berbagai pengertian yang luas didalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya



materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan fikiran dan sebagainya.

3) **Nemui Nyimah**

Neui Nyimah, berarti bermurah hati dan beramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja pihak yang berhubungan dengan mereka. Jadi bermurah hati dalam bertutur kata serta sopan santun dan ramah tamah terhadap tamu mereka.

4) **Nengah Nyapur**

Nengah Nyapur, adalah sebagai tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesedian membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan masyarakat dengan perkembangan zaman.

5) **Bejuluk Beadek**

Bejuluk Beadek, adalah didasarkan pada Titie Gemetti yang diwariskan turun temurun dari zaman dahulu. Tata ketentuan pokok yang selalu diikuti (Titi Gemetti) tersebut antara lain menghendaki agar seseorang disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan terhadapnya. Bagi orang yang belum berkeluarga diberi Juluk (bejuluk) dan setelah ia menikah maka ia akan diberi adek (beadek) melalui acara-acara perkawinan adat Lampung.

## **B. Kabupaten Tulang Bawang**

### **1. Aspek Historis**

Berdasarkan peta sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang merupakan salah satu keraiaan tertua di Indonesia, di samping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan

Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang peziarah agama Budha yang bernama Fa-Hien, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya yang bernama : *To-Lang p'o-Hwang* (Tulang Bawang) di pedalaman Chrqse (pulau emas Sumatera). Meski hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan di mana letak pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu sungai Tulang Bawang ( antara Menggala dan Pagardewa ) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan *Che-Li-Po Chie* (Sriwijaya), nama dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini.

Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang marak dengan aneka komoditi, mulai kembali dikenal Eropa. Menggala, dengan komoditi andalannya lada hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang di dapat VOC dari Bandar Banten. Karena perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi Sungai Tulang Bawang semakin kencang, sehingga kota Menggala dijadikan dermaga "BOOM", tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara termasuk Singapura.

Perkembangan politik Pemerintah Belanda yang terus berubah, membawa dampak dengan ditetapkannya Lampung berada di bawah pengawasan Langsung Gubernur Jenderal Herman William Deadles mulai tanggal 22 november 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa, sehingga terbentuk pemerintahan Marga (*ke-buayan*) yang dipimpin oleh Kepala Marga. Wilayah Tulang Bawang sendiri dibagi dalam 3

kebuayan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamo'an dan Buay Umpu (Tahun 1914, menyusul dibentuk Buay Aji).

Sistem Pemerintahan Marga tidak berjalan lama, karena pada tahun 1864, sesuai dengan Keputusan Residen Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864, sistem ini digantikan dengan sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasuk di wilayah Tulang Bawang. Kondisi yang demikian ini terus berlangsung hingga pendudukan Jepang, dan tidak banyak mengalami perubahan hingga proklamasi kemerdekaan didengungkan.

Sesudah Proklamasi kemerdekaan RI, saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan wilayah Kewedanaan. Setelah Lampung memisahkan diri dari Propinsi Sumatera Selatan, dan membentuk Provinsi tersendiri dengan nama provinsi Lampung, maka status Menggala selanjutnya ditetapkan sebagai kecamatan di bawah naungan Kabupaten Lampung Utara.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan efisiensi, maka sesepuh dan tokoh masyarakat bersama pemerintah merencanakan mengembangkan Propinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten/Kota. Rencana ini telah dicanangkan sejak tahun 1972 namun baru mulai terwujud pada tahun 1981, dengan dibentuknya 8 Lembaga Pembantu Bupati, yang salah satunya adalah Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala. Pembentukan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara, Wilayah Propinsi Lampung.

Sejak itu, dalam kurun waktu dari tahun 1981 sampai dengan 1997, pemerintahan Menggala dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati, yang secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. Drs. Hi. M. Yusup Nur (masa bhakti 1981 s.d : 1985)
2. Kardinal, BA (masa bhakti 1985 s.d. 1989)
3. Drs. Hi. Somali Saleh (masa bhakti 1989 s.d. 1993)
4. Drs. Rukhyat Kusumayudha (masa bhakti 1993 s.d. 1994)
5. Drs. Tamanuri (masa bhakti 1994 s.d. 1996)
6. Hi. Santori Hasan, SH. (masa bhakti 1996 s.d. 1997)<sup>38</sup>

Pada tahun 1997 dibentuklah Sekretariat Persiapan Kabupaten Tulang Bawang, dengan sekretaris merangkap pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, SH. Sebagai Plt. Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui surat keputusan Keputusan Gubernur No. 821.2/11/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang Penunjukkan Plt Bupati Kabupaten Daerah Tingkat 11 Persiapan Tulang Bawang,.

Melalui serangkaian proses yang cukup melelahkan, akhimya Kabupaten Tulang Bawang lahir dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut dari ditetapkan UU no. 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Seiring dengan telah definitifnya Tulang Bawang menjadi Kabupaten, selanjutnya pada tanggal 24 November 1997 dipilihlah Hi. Santori Hasan SH sebagai Bupati Tulang Bawang pertama untuk periode tahun 1997-2002 dan dilantik pada tanggal 9 Desember 1997. Pada periode selanjutnya, melalui proses pemilihan Bupati Tulang Bawang pada tanggal 12 November 2002 estafet kepemimpinan

---

<sup>38</sup> Selayang Pandang, Kabupeten Tulang Bawang

beliau diteruskan oleh Drs. H. Abdurrahman Sarbini SH, MM. dan AA Sofandi yang terpilih untuk memangku jabatan Bupati dan wakil Bupati Tulang Bawang untuk masa bakti 2002-2007.<sup>39</sup>

Di bidang pemerintahan, sampai dengan bulan Agustus 2003 perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari I Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan 3 Assisten, 9 bagian, 3 badan, 16 dinas dan I kantor serta I sekretariat DPRD dengan 3 bagian. Perangkat daerah ini juga didukung dengan 16 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 220 Kampung.

Selanjutnya, karena tuntutan situasi dan kondisi sekaligus untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maka pada bulan Desember 2003, sesuai dengan amanat PP No. 8 Tahun 2003 perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami perubahan sesuai dengan Perda.

Pada pemerintahan di tingkat kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada sebelumnya yaitu : Kecamatan Menggala, Gedung Meneng, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumijajar, Banjar Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang, Gedung Aji, Penawar Tama, Mesuji, Tanjung Raya, Way Serdang, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Utara dan Simpang Pematang, dikembangkan menjadi 18 Kecamatan dengan diresmikannya 2 kecamatan baru berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang no. 4 Tahun 2004, yaitu Kecamatan Pagar Dewa yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah (diresmikan pada tanggal 21 Juli 2004) dan Kecamatan Rawa Jitu Timur yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kecamatan Rawa Jitu Selatan (diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2004). Tahun 2005, pemekaran pemerintahan kecamatan dikembangkan lagi hingga menjadi 24 kecamatan dengan diresmikannya 6 kecamatan baru yakni : Kecamatan Way Kenanga, Banjar Margo, Penawar Aji, Rawa Jitu Timur, Rawa Pitu dan Gunung Agung. Sehingga saat ini

---

<sup>39</sup> Ibid

jumlah kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang adalah 24 Kecamatan.

Untuk pemerintahan di tingkat kelurahan, 4 kelurahan yang ada dan saat ini hanya berada di wilayah Kecamatan Menggala direncanakan juga akan ditambah dengan beberapa kelurahan yang akan dimekarkan, di antaranya di kecamatan Banjar Agung, Tumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Gedung Meneng. Sedangkan pada pemerintahan di tingkat Kampung saat ini jumlah kampung di Kabupaten Tulang Bawang telah menjadi 234 Kampung definitif dan 1 Kampung persiapan serta direncanakan masing ada beberapa kampung lagi yang akan dimekarkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kondisi wilayah.<sup>40</sup>

## 2. Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Tulang Bawang terletak di bagian timur laut propinsi Lampung dan berada pada daerah Utara-Selatan 3° 45'-105° 55'. Ibukota Kabupaten ini adalah Menggala, yang berjarak kurang lebih 120 km dari Ibukota Propinsi.

Batas-batas Wilayah kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Propinsi Sumatera Selatan

Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Utara

Luas wilayah kabupaten ini tercatat seluas 7.770,84 km atau 22 % dari wilayah Lampung, dan merupakan kabupaten terluas di Propinsi Lampung.

---

<sup>40</sup> Ibid

Secara topografi daerah Tulang Bawang terbagi atas 4 bagian :

- 1) Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk pertanian.
- 2) Daerah rawa, terdapat sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0-1 m, yang merupakan daerah rawa pasang surut.
- 3) Daerah River Basin; terdapat dua River Basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang, dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya.
- 4) Daerah Alluvial, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (down steem dari sungai-sungai besar yaitu Tulang Bawang, dan Mesuji), dimanfaatkan untuk pelabuhan.
- 5) Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, daerah Kabupaten Tulang Bawang beriklim Tropis, dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 31° C. Curah hujan rata-rata 2.000-2.500 mm/tahun.<sup>41</sup>

### **3. Aspek Perekonomian Daerah dan Prasarana**

#### **a. Aspek Perekonomian**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan cukup menggembirakan. Hal ini diindikasikan dengan adanya puluhan perusahaan besar, ratusan perusahaan kecil dan koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten yang memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ekonomi wilayah. Belum lagi ditambah dengan aktivitas di berbagai sektor yang potensial yaitu sektor industri, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagaimana digambarkan secara berikut ini :

---

<sup>41</sup> Ibid

## (1) Sektor Industri

Dari berbagai sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian di Tulang Bawang, sektor industri memegang peranan yang sangat penting. Saat ini di Kabupaten Tulang Bawang terdapat kurang lebih 36 perusahaan besar, ratusan perusahaan kecil dan koperasi. Perusahaan besar (PMA-PMDN), disamping perusahaan-perusahaan kecil lainnya, sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah ini. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini diharapkan akan mampu menekan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Antar perusahaan yang ada diharapkan akan terbentuk suatu Bussines Network, yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis, yaitu antara perusahaan besar, dan kecil, yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keharmonisan antar perusahaan yang ada.

Pesatnya perkembangan industri yang ada, akan digiring untuk mengarahkan karyawan industri berbelanja ke pusat-pusat perdagangan yang ada. Dengan demikian terbuka peluang usaha retail untuk berkembang yang selanjutnya dapat meningkatkan perputaran uang dan roda perekonomian di daerah ini.

Pengembangan sektor industri, diantaranya diarahkan pada pembinaan industri kecil dengan cara :

- Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan SDM Pengrajin
- Peningkatan Mutu dan Disain Produk
- Pengenalan Teknologi tepat guna melalui bantuan Stimulan
- Promosi dan Pameran Usaha Industri secara tetap dan berkala

## (2) Bidang pertanian

Di bidang pertanian, potensi wilayah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikatakan cukup menjanjikan. Dengan luas lahan yang cukup besar, sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga bisa menjadi salah satu andalan pemerintah dalam upaya memantapkan/



meningkatkan swasembada pangan. Dari berbagai usaha pertanian yang dilakukan di Tulang Bawang, komoditas Padi, Jeruk, Salak, Jagung, Ubi Kayu, dan Kedelai adalah produk pertanian yang potensial untuk terus dikembangkan di daerah ini. Pada tahun 2003, Kabupaten Tulang bawang memperoleh panen padi sejumlah 279.602 ton dari luas lahan sebesar 61.497 Ha. Produksi ini terus meningkat di tahun 2004 hingga mencapai 344.579 ton dari luas lahan sebesar 67.537 Ha. Pada tanggal 16-19 Oktober 2003, dimotori oleh Tim Penggerak PKK, Kabupaten Tulang Bawang meraih prestasi gemilang dengan menjuarai lomba Ketahanan Pangan Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Semanggi Ekspo Centre Jakarta. Prestasi yang diperoleh ini sudah barang tentu tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang terus menerus melakukan pengembangan dan pembinaan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, sejak dari kegiatan pembibitan, penanaman/budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>42</sup>

### (3) Perkebunan

Upaya-upaya yang dilakukan bagi pengembangan perkebunan di Tulang Bawang, ditempuh melalui budidaya industri perkebunan, dan pengembangan usaha investasi perkebunan dengan cara Pola Perusahaan Besar Swasta (PBS), Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), serta Pola Kemitraan (kemitraan melalui KUD dalam berbagai usaha dengan perkebunan besar). Secara statistik, potensi pengembangan perkebunan di Tulang Bawang tercatat seluas kurang lebih 298.943 Ha. Untuk komoditi Jeruk, pada tahun 2003 dari luas areal sebesar 4.142 Ha dengan luas panen sebesar 2.440 Ha diperoleh produksi sebanyak 43.437 ton. Tahun berikutnya, yakni pada tahun 2004, total

---

<sup>42</sup> Ibid

produksi meningkat drastis, hal mana dari luas areal 8.645 Ha dengan luas panen 3.571 Ha diperoleh hasil produksi 78.562 ton.<sup>43</sup>

#### (4) Peternakan

Bidang usaha peternakan di Tulang Bawang, meliputi Usaha Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas, serta penyediaan sarana produksi (bibit makanan ternak usaha budidaya, usaha pasca panen, dan pemasaran). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilaksanakan kegiatankegiatan :

- Penerapan bio-teknologi Inseminasi Buatan (IB) dalam pembibitan hewan ternak.
- Melakukan program penggemukan ternak potong.
- Pencegahan penyakit dan penyuluhan.

Potensi peternakan yang potensial dikembangkan di wilayah Tulang Bawang antara lain :

- Sapi (Penggemukan Sapi) Lokasi : Kecamatan Tumi Jajar
- Kerbau Lokasi : Kecamatan Menggala
- Kambing Lokasi : 18 Kecamatan.
- Ayam ras Lokasi : Kecamatan Tumi Jajar, dan Lambu Kibang
- Ayam Buras, Lokasi : 18 Kecamatan.<sup>44</sup>

#### (5) Perikanan

Wilayah Tulang Bawang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan. Sejak jaman dahulu, nenek moyang daerah ini telah dikenal sebaga penghasil ikan dengan jumlah yang cukup besar. Pembangunan di bidang perikanan, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para nelayan, dengan berbagai usaha peningkatan kualitas, dan kuantitas roduksi, melalui pengembangan keramba apung di perairan sungai dan rawa, pengembangan kolam dan tambak,

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

pembina nelayan umum, nelayan laut, serta petani tambak udang. Pengembangan dan pembinaan sektor perikanan di Tulang Bawang tersebut, tersebar di seluruh kecamatan di daerah ini, dengan fokus pembinaan diarahkan mulai dari kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan termasuk kegiatan mengangkut, menyimpan, dan mengawetkan, sampai pemasaran hasil.

Sejak tahun 2002, hasil-hasil produksi perikanan Tulang Bawang telah mampu menembus pasar internasional, dengan melakukan ekspor ke negara Amerika, Hongkong, dan Jepang. Total volume ekspor ke 3 negara tersebut (tahun 2002) adalah sebesar 8.734,40 ton, dan nilai ekspor sebesar 96.078.400 US Dolar.

Kabupaten Tulang Bawang juga pernah tercatat sebagai sentra budidaya udang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Tercatat ada dua perusahaan besar yang bergerak di bidang budidaya udang, yaitu : PT. Dipasena Citra Dharmaja, yang berlokasi di Kec. Rawa Jitu timur dan PT. Centra Pertiwi Bahari, saat ini juga terus dikembangkan budidaya Man Bandeng, cumi-cumi dan kepiting.

Guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam memasarkan hasil produksi perikanan, telah dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap beberapa Tempat Pelelangan Wan (TPI), yaitu diantaranya Kuala Teladas Kecamatan Gedong Meneng, yang makin diperlancar dengan telah dibangunnya jalan tembus sejauh 3 km, yang menghubungkan daerah tersebut dengan Kampung Kekatung.

Sedang dirintis kembali kejayaan masa lalu sebagai penghasil udang terbesar di Asia Tenggara yang pernah diukir oleh PT. Dipasena Citra Dharmaja pada era tahun 90-an. Upaya-upaya yang dilaksanakan adalah mengoptimalkan kembali produktivitas PT. Dipasena Citra Dharmaja dengan mewujudkan normalisasi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi

selama ini. Saat ini upaya tersebut telah menampakkan hasil positif, yang ditandai dengan membaiknya situasi di Bumi Dipasena dan berproduksinya kembali PT. Dipasena<sup>45</sup>

#### (6) Kehutanan dan Konservasi Tanah

Luas seluruh hutan daerah Tulang Bawang yaitu 1 19.924,01 Ha, terdiri dari :

- Kawasan Register 44, seluas 11.473,12 Ha
- Kawasan Register 45 ; seluas 42.762,09 Ha
- Kawasan Register 47, seluas 65.688 Ha.

Sayangnya dengan potensi hutan yang sedemikian luas itu, di masa lalu tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hutan, sehingga hampir 80 % dari luas areal hutan yang ada kini musnah dan berganti lahan-lahan kosong dan kritis akibat maraknya kegiatan penebangan-penebangan kayu secara liar di masa lampau. Kini Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk melakukan pembangunan kehutanan dan konservasi tanah di Kabupaten Tulang Bawang, terutama pada lahan kritis yang dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Penghijauan.

#### (7) Sarana dan Prasarana

##### 1) Transportasi

Pembangunan sektor perhubungan di Tulang Bawang diarahkan untuk memperlancar arus lalu lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, darat, laut, serta sungai. Di samping itu pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, secara khusus ditujukan untuk membuka isolasi dan membuka keterpencilan wilayah, guna menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pusat distribusi, serta

---

<sup>45</sup> Ibid

daerah pemasaran. Upaya ini sekaligus dalam rangka mendukung sistem transportasi lintas propinsi, bahkan termasuk transportasi lintas ASEAN, melalui jalur lintas Timur (Jalintim) yang merupakan salah satu akses yang menghubungkan wilayah Lampung dengan wilayah-wilayah lain di Sumatera. Tidak dipungkiri adanya Jalintim ini, sangat berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat di daerah ini. Ditinjau dari perkembangannya, jasa transportasi darat, angkutan penumpang dan barang di dalam Kabupaten Tulang Bawang, maupun antar kota berkembang sangat baik.

Selain daripada itu, dalam upaya untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Tulang Bawang yang dahulu pernah dikenal sebagai Paris Van Lampung, maka dengan memanfaatkan sungai Tulang Bawang sebagai sarana transportasi air yang potensial, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan berupaya untuk menghidupkan aktivitas perairan di Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk transportasi perairan, sungai-sungai yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang sangat potensial dan memungkinkan untuk dijadikan sarana transportasi. Adapun panjang sungai-sungai di Tulang Bawang, adalah Way Tulang Bawang ; 136 km, Way Kanan ; 51 km dan Way Kiri ; 35 km. Transportasi ini, juga didukung beberapa dermaga darat, yang tersebar di Tulang Bawang, yaitu dermaga sungai Menggala, Gunung Tapa, Bina Indonesia, Gedung Aji, Rawajitu, Kuala Teladas, Wiralaga, Sindang, serta dermaga Perairan Daratan gedung Karya jitu, dan 2 unit Pelabuhan Pendaratan Ikan (TPI). Di samping melalui jalan darat dan sungai, akses ke Kabupaten Tulang Bawang bisa dilakukan melalui laut. Untuk kelancaran transportasi laut tersebut, Kabupaten Tulang Bawang telah melengkapinya dengan 3 pelabuhan laut yang terdapat di daerah Menggala, Mesuji, dan Sungai Burung.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid

## 2) Fasilitas Umum

Selama kurun waktu tahun 2003-2006, berbagai fasilitas umum yang bernilai strategis dan dibutuhkan di Kabupaten Tulang Bawang telah juga dibangun. Meskipun seluruhnya belum dapat terealisasi tetapi sebagian telah dapat dipenuhi dan telah dimanfaatkan oleh seluruh elemen yang berada di daerah ini. Secara fisik/infrastruktur berbagai fasilitas umum yang saat ini telah dan sedang dibangun diantaranya Gedung Musyawarah Mufakat (telah beroperasi dan diresmikan Mendagri Hari Sabarno bersamaan dengan peresmian 50 unit Perumahan Pegawai pada tanggal 18 Mei 2004), Masjid Agung Baiturrahman dan Islamic Centre Kabupaten Tulang Bawang (telah dipergunakan sebagai arena utama kegiatan MTQ ke-32 Tingkat Propinsi Lampung 2004), pembangunan Gedung Sesat Agung, penyediaan lahan dan membantu pembangunan Markas Kodim Tulang Bawang (peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Danrem 043 Garuda Hitam pada tanggal 11 Juni 2004 dan saat ini pengelolaannya pun telah diserahkan kepada Korem 043 Garuda Hitam) dan upaya pengadaan Taman Makam Pahlawan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan beberapa Kantor Polsek yang sebagian besar dilaksanakan dengan pola Swadaya Murni Masyarakat.

Di bidang kesehatan, sarana kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang semakin lengkap dengan telah diresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala pada bulan Januari 2006.. Hal ini sesuai dengan visi "Menuju Tulang Bawang sehat 2010" dengan misi peningkatan pelayanan dan sarana kesehatan serta peningkatan kesehatan lingkungan. Hingga akhir tahun 2006, jumlah sarana kesehatan yang ada di Tulang Bawang saat ini adalah sebagai berikut :

- Rumah Sakit Umum Daerah : I Unit
- Rumah Sakit Swasta : 7 Unit
- Puskesmas Perawatan : 3 Unit

- Puskesmas Non Perawatan : 21 Unit
- Puskesmas Pembantu : 82 Unit
- Puskesmas Keliling : 23 Unit
- Dokter : 44 Orang
- Perawat : 64 Orang
- Mantri : 161 Orang<sup>47</sup>

#### **4. Aspek Pendidikan dan Kultural**

##### **a. Pendidikan**

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang senantiasa konsisten dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang salah satunya melalui pendidikan. Pada sektor ini kebijakan yang dilakukan difokuskan pada upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memadai, terjangkau dan berkualitas pada setiap jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA. Mengenai seberapa jauh perkembangan/hasil yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten lewat kebijakan di bidang pendidikan, hal ini dapat difahami dari tabel tabel yang memuat data perkembangan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana terlampir.

Selain dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, saat ini di Kabupaten Tulang Bawang juga sedang dikembangkan berbagai sekolah kejuruan guna memenuhi tuntutan kerja yang sesuai dengan potensi daerah. Salah satunya yang telah terealisasi pada tahun 2003 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Perikanan yang berlokasi di Kecamatan Menggala.

Di bidang pendidikan tinggi, data yang ada di Kabupaten Tulang Bawang juga menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik. Untuk tingkat Perguruan Tinggi, sebanyak 3 perguruan tinggi telah membuka kelas jauh di daerah ini dan

---

<sup>47</sup> Ibid

melaksanakan kuliah perdana pada tanggal 25 November 2004, yaitu STIBUN Bandar Lampung, AMIK Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Sebelumnya telah ada 3 perguruan tinggi lainnya di daerah ini, yaitu STIE Muhammadiyah di Kecamatan Tumi Jajar, STAI Al-Ma'arif di Kecamatan "Tulang Bawang Tengah, dan STIH Muhammadiyah di Menggala. Kemudian pada tahun 2005 disusul dengan Universitas Tulang Bawang yang membuka Kelas B di Menggala. Pada tahun 2006 ini pun direncanakan Kabupaten Tulang Bawang akan memiliki sebuah perguruan tinggi yang bernama Universitas Megow Pak.<sup>48</sup>

b. Budaya dan Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang memiliki berbagai objek wisata budaya/sejarah yang dapat diandalkan. Misalnya Kota Menggala (ibukota Kabupaten Tulang Bawang) yang merupakan kota tertua, dan beberapa obyek wisata budaya yang tak kalah menarik, seperti makam-makam kuno di Pagar Dewa, Gedong Aji, Bakung Ilir/Udik, serta sanggar-sanggar seni/budaya (di antaranya Sanggar Tari Besapen, binaan Dra. R.Ay Sri Adiyanti Rachman.) sebagai pelestarian seni/budaya warisan nenek moyang yang siap memberikan paparan dan sajian tentang adat istiadat masyarakat Tulang Bawang. Sanggar Tari Besapen telah mengukir Prestasi-prestasi gemilang di antaranya :

- a) Juara Umum Festival Krakatau 3 kali berturut-turut, yaitu Juara Umum festival Krakatau tahun 2003, 2004, dan tahun 2005.
- b) Meraih Predikat 10 penampil terbaik Parade Tari Daerah di TMII yang diikuti seluruh propinsi se-Indonesia pada tahun 2003 (Kabupaten Tulang Bawang mewakili Propinsi Lampung)
- c) Meraih Juara Umum Karnaval Prajurit Tradisional Nusantara dalam rangka Pekan Budaya Taman Mini Indonesia Indah

---

<sup>48</sup> Ibid



Tanggal 3 Oktober 2004 dan 25 September 2005 (Kontingen Tulang Bawang mewakili Propinsi Lampung)

- d) Juara Parade Lagu Daerah Nasional di TMII pada bulan Desember 2005.

Di samping potensi-potensi tersebut, Tulang Bawang masih menyimpan berbagai potensi pariwisata yang layak dikembangkan, antara lain River Tour di sungai Tulang Bawang dan Mesuji, perkampungan di atas air di Kuala Teladas, areal konservasi Rawa Pitu yang unik dengan keberadaan burung-burung yang bermigrasi antar benua. Potensi pariwisata lainnya adalah Rawa Pacing yaitu lahan basah yang masih tersisa saat ini, seluas 12.000 Ha, yang kaya akan ragam flora dan fauna seperti beberapa jenis ikan lokal dan burung yang dilindungi. Kawasan Bujung Tenuk di daerah Menggala, juga menyimpan pesona pariwisata yang terpendam. Keindahan alamnya sangat unik dimana di musim hujan terlihat seperti danau, sementara pada musim kemarau terlihat seperti padang rumput yang kaya dengan burung-burung spesies langka di dunia.

Sebagai penunjang pariwisata, saat ini di Tulang Bawang terdapat banyak hotel (kelas Melati) serta penginapan-penginapan di tiap kecamatan yang cukup representatif, restoran dan rumah makan, serta warung-warung makan kecil lainnya juga banyak terdapat di daerah ini dengan aneka masakan, mulai dari masakan khas Lampung (seruit) sampai dengan masakan, Palembang, Padang, dan lain sebagainya, yang higienis, murah, terjamin dan representatif.

## **5. Beberapa Kebijakan Pokok di Bidang Keagamaan**

Tidak dapat diingkari bahwa peranan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan sesuatu hal yang amat penting demi menunjang peningkatan taraf hidup dan aspek-

aspek sosial warga masyarakat setempat. Khusus, di bidang agama, peranan pemerintah selaku pengawas dan pembina umat beragama, amat menentukan bagi terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk kerukunan antar kelompok-kelompok penganut yang ada.

Bahwa kendati pun Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara struktural tidak memiliki seksi khusus yang membidangi urusan agama, namun melalui kerja sama yang intens dengan instansi terkait khususnya yang bernaung dibawah Departemen Agama, beberapa kebijaksanaan pokok telah berhasil dibuat dan dilaksanakan, yang di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalankan dan mengamankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dibuat oleh instansi yang lebih tinggi di bidang agama yang mengarah pada pembinaan prilaku umat beragama agar lebih tertib, sejalan dengan ideologi Pancasila.
2. Membentuk Tim Pengawas dan Pembinaan Rumah Ibadah, yang merupakan pelayanan dan konsultasi terhadap masalah-masalah tertentu khususnya yang berkaitan dengan soal pendirian tempat ibadah .
3. Membentuk dan mengaktifkan satkar Ulama, yang merupakan mitra pemerintah setempat dalam membahas persoalan-persoalan etika, hokum, moral dan teologis.
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat menambah syi'ar keagamaan dan membangkitkan semangat beragama yang dinamis, antara lain seperti : Perayaan Hari Besar Beragama, Lomba Cerdas Cermat Agama,MTQ,Safari Ramadhan, dll.
5. Memberikan dukungan berupa bantuan, maupun rekomendasi terhadap permohonan bantuan sarana ibadah/keagamaan yang di ajukan oleh masyarakat kepada instansi atau lembaga sosial tertentu.
6. Memberikan pelayanan administrasi surat-surat yang menyangkut masalah umum atau agama, seperti: surat

keterangan tanah wakaf, izin penyelenggaraan da'wah terbuka, izin pembangunan rumah ibadah, pendirian yayasan/ organisasi keagamaan, dan lain-lain.

7. Mengadakan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya kelompok/aliran-aliran baru dalam masyarakat yang bersifat eksklusif dan ekstrim, baik yang tergolong ekstrim kiri maupun kanan, yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidak tenteraman dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Demikianlah beberapa kebijaksanaan pokok yang telah dilaksanakan oleh unsur pimpinan daerah Kabupaten Tulang Bawang beserta jajarannya dalam upaya pembinaan kehidupan beragama, yang kesemuanya ini tidak lain ditujukan untuk menciptakan ketenteraman, kedamaian, ketertiban dan kerukunan di kalangan warga masyarakat, khususnya umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang.

### **C. Kabupaten Lampung Tengah**

#### **1. Aspek Geografis dan Demografis**

Kapubaten Lampung Tengah adalah salah satu Kabupaten diantara 10 daerah Kabupaten dan Kota yang berada di Propinsi Lampung. Kabupaten ini secara Administratif telah terbentuk sejak tahun 1945 yakni sejak diberlakukannya Peraturan Peralihan Pasal 2 UUD 1945. Wilayah Kabupaten ini terbentuk seluas 4789, 82 KM<sup>2</sup>, terletak pada koordinat 104<sup>0</sup> 35<sup>c</sup> Bujur Timur sampai 105<sup>0</sup> 50 Bujur Timur dan 4<sup>0</sup>30–4<sup>0</sup>15 Lintang Selatan. Dilihat dari bentangan wilyah Kabupaten Lampung Tengah terhitung memiliki bentangan wilayah yang cukup luas untuk ukuran sebuah Kabupaten. Posisi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan 5 Kabupaten lainnya : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, sebelah Timur

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H Hairuddin, Kasi Penalis Tulang Bawang tgl 16 Juni 2007

berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung, Barat.

Secara Topografi Daerah Kabupaten Lampung Tengah terbagi dalam 5 unit Topografi yakni: Daerah Topografi Berbukit sampai bergunung, Daerah Topografi berombak sampai bergelombang, daerah daratan Aluvial, Daerah rawa pasang surut, serta daerah bergelombang ditandai oleh adanya Bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit dengan kemiringan antara 8% sampai 15 %, berada pada ketinggian 300 m sampai 500 m dari permukaan air laut. Daerah Dataran Aluvial meliputi Lampung Tengah sampai mendekati Pantai seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Daerah Rawa Pasang Surut terletak di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Lampung Tengah dimana genangan air tergantung pada pasang surut air laut dengan ketinggian wilayah antara 0,5 sampai 1 m diatas permukaan air laut. Sedangkan Daerah Sungai (River Basin) berada sekitar aliran Sungai Way Seputih dan aliran Sungai Way Sekampung. Berdasarkan data Statistik tahun 2004, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.109.884 yang tersebar pada 26 Kecamatan. Dengan luas wilayah 4789.82 Km<sup>2</sup>, maka rata-rata kepadatan Penduduk di Lampung Tengah adalah 238 orang/km<sup>2</sup>. Kosentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Terbangi Besar dalam jumlah 98.616 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Bandar Mataram dengan jumlah 64092 serta Padang Ratu dengan jumlah penduduk 62985 orang. Kosentrasi penduduk di Kecamatan Terbangi Besar diduga karena Kecamatan ini merupakan daerah sentral perdagangan yang telah dilengkapi berbagai fasilitas bisnis modern.

## Tabel

### Luas Areal, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan District	Luas/Area Km <sup>2</sup>	Penduduk Population	Kepadatan/Km <sup>2</sup> Density Km <sup>2</sup>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang Ratu	272.83	62.985	231
2.	Selagai Lingga	308.52	31.665	103
3.	Pubian	173.88	40.126	231
4.	Anak Tuha	161.64	32.853	203
5.	Kali Rejo	101.31	60.163	594
6.	Sendang Agung	108.89	34.192	314
7.	Bangun Rejo	132.63	5.169	392
8.	Gunung Sugih	130.12	58.812	452
9.	Bekri	93.51	24.309	260
10.	Bumi Ratu Nuban	65.14	26.127	401
11.	Trimurjo	68.43	47.197	690
12.	Punggur	118.45	33.396	282
13.	Kota Gajah	68.05	30.601	450
14.	Seputih Raman	146.65	43.860	299
15.	Terbagi Besar	208.65	98.616	473
16.	Seputih Agung	122.27	42.028	344
17.	Way Pengubuan	210.72	32.008	152
18.	Terusan Nunyai	302.05	45.004	149
19.	Seputih Mataram	120.01	43.904	366
20.	Bandar Mataram	1.055.28	54.092	61
21.	Seputih Banayk	145.92	39.063	268
22.	Way Seputih	77.84	15.556	200
23.	Rumbia	201.11	47.905	238
24.	Bumi Nabung	108.94	30.167	277
25.	Seputih Surabaya	144.60	42.926	297
26.	Bandar Surabaya	142.39	30.316	213

Lampung Tengah			
2006	4.789.82	1.109.884	238
2005	4.789.82	1.097.947	236

Sumber: Lampung Tengah dalam Angka Tahun 2006

## 2. Kehidupan Sosial Ekonomi

Data statistik yang ada menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat terdistribusi dalam kelompok yang beragam, namun mayoritas merupakan petani (49%), menyusul mereka yang hidup dari industri pengolahan (14%), bisnis dan perdagangan di sektor real 13%, di sektor jasa-jasa lainnya 10%, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor jasa bangunan (konstruksi) 5%, di sektor pertambangan dan penggalian 2%, angkutan dan komunikasi 2%, serta 1% di sektor listrik dan air bersih.

Sekalipun pertanian belum memberikan kesejahteraan secara maksimal namun sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian tersedia secara memadai. Di beberapa tempat sarana irigasi untuk mengairi persawahan penduduk tersedia, apalagi kapasitas Lampung Tengah memiliki beberapa sungai yang relatif besar serta puluhan sungai-sungai kecil. Sungai Way Pengubuan mengalir sepanjang 120 km, Way Seputih mengalir sepanjang 143 km, Sungai sekampung sepanjang 94 km, tentu saja ketiga sungai besar di atas memberikan dampak ekonomi, baik dalam penyediaan air persawahan maupun manfaat ekonomi lainnya. Demikian juga keberadaan sungai-sungai kecil yang jumlahnya puluhan. Budaya pertanian masyarakat di sisi lain sudah sedikit banyak di sertai wawasan agrobisnis sehingga pilihan komoditas yang di tanam disesuaikan dengan permintaan pasar. Di samping menanam padi pada areal persawahan basah, tanaman singkong dan jagung merupakan pilihan komoditas yang menguntungkan, karena tersedianya puluhan pabrik tapioka dan makanan ternak yang bisa menampung produksi jagung dan

singkong hasil pertanian masyarakat. Hanya saja lahan yang semakin menyempit, baik karena pertambahan jumlah penggarap maupun karena alih fungsi lahan menjadi lokasi industri dan perumahan merupakan tantangan bagi efektivitas dan produktivitas pertanian. Di samping dukungan dana produksi, sektor pertanian juga di dukung oleh infrastruktur jalan dan pasar dalam kondisi dan jumlah yang mencukupi. Lahan-lahan pertanian masyarakat umumnya di lalui oleh sarana jalan yang pada umumnya dalam kondisi baik. Sarana infrastruktur yang tersedia ini tentu saja sngat menopang kemudahan untuk mengangkut hasil produksi pertanian menuju sentra-sentra pemasaran maupun menuju pabrik-pabrik pengolahan. Demikian pula pasar-pasar tradisional tersedia di hampir semua kecamatan, di samping pasar Ban Jaya yang relatif besar. Dan bisa di akses oleh penduduk dari semua wilayah kecamatan di Lampung Tengah. Sejumlah industri baik yang berskala kecil menengah, maupun berskala besar, ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Keberadaan industri-industri ini, di samping menopang perekonomian masyarakat juga menopang angkatan kerja sehingga mengatasi pengangguran. Sekalipun jumlah angkatan kerja serta masyarakat Lampung Tengah yang bekerja di sektor industri manufaktur masih relatif kecil (14%).

Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor jasa (*service*) memperlihatkan kecenderungan semakin bertambah. Dengan perkembangan kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan baik kecamatan induk maupun hasil pemekaran, maka jasa angkutan (angkutan pedesaan) maupun jasa ojek semakin banyak di butuhkan dan inipun di respon oleh masyarakat dengan menyediakan layanan di bidang ini.

## Tabel

### Distribusi Penduduk Lampung Tengah Menurut Pekerjaan

No	Sektor Pekerjaan	Prosentase
27.	Petani	49%
28.	Industri Pengolahan	14%
29.	Jasa	10%
30.	Perdagangan	13%
31.	Bangunan	5%
32.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	4%
33.	Angkutan dan Komunikasi	2%
34.	Listrik dan Air Bersih	1%

Sumber : Lampung Tengah dalam Angka 2006

### 3. Kehidupan Sosial Politik

Reformasi politik yang menjadi bagian dari gerakan dan program reformasi di Indonesia umumnya menjadikan demokratisasi di segala bidang berjalan, baik secara struktural maupun secara kultural. Secara struktural, jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak bisa menghindari keharusan untuk melakukan keterbukaan (transparansi) khususnya pada proses-proses politik di daerah. Pemerintah kabupaten Lampung Tengah dengan segenap jajarannya sebagai komponen eksekutif di daerah terikat dengan keharusan untuk melakukan demokratisasi politik sejalan dengan kebijakan politik nasional. Karena itu dalam proses-proses politik di daerah Lampung Tengah iklim demokrasi itu berjalan sejalan dengan koridor struktural. Kebijakan struktural pemerintah di daerah itu mendapatkan respon positif dari masyarakat yang memang pada beberapa sisi memiliki kultur demokratis dan terbiasa berhadapan dengan proses demokrasi dalam lingkungan sosial politik mereka. Sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia, masyarakat Lampung Tengah telah terbiasa dengan proses politik



pemilihan kepada desa yang kerap diwarnai oleh kompetensi politik antar calon yang sedikit banyak menyebabkan fragmentasi kelompok, namun keadaan tersebut kenyataan selalu terjadi dalam waktu yang tidak berkepanjangan. Setelah proses pemilihan kepala desa selesai, kehidupan sosial masyarakat kembali berjalan normal. Karena itu ketika iklim demokrasi itu semakin terbuka, politik masyarakat tidak sampai mencederai kehidupan sosial masyarakat pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2004 terbilang cukup memadai (76%), yang sekalipun hal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan adanya kesadaran politik secara esensial. Hal itu karena dalam banyak kasus partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga didorong oleh faktor-faktor pragmatis seperti ingin memilih calon anggota legislatif yang memiliki kedekatan dengannya, atau karena fanatisme kepala tokoh politik tanpa di barengi dengan pertimbangan-pertimbangan kritis.

Pada peristiwa pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih bupati Lampung Tengah periode 2005 – 2009 , dinamika sosial politik yang terjadi di kabupatyeen Lampung Tengah menjadi sesuatu yang menarik, sekalipun dinamika sosial politik merupakan hal yang tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi di daerah ini.

Dalam perspektif sosial ada beberapa hal yang menjadi sebuah realitas historis, *pertama*, primordialisme merupakan suatu hal yang masih melekat. Isu putra daerah atau pendatang masih merupakan isu yang digiring untuk menjadi sebuah komoditas politik para kandidat yang bersaing. Masing-masing kandidat menjadikan basis primordialismenya sebagai modal suara utama. Kandidat yang berasal dari suku Bali dan beragama Hindu menjadikan masyarakat Hindu Lampung Tengah sebagai basis primordialnya, sebagai modal suara utama, dan dalam kenyataannya jumlah perolehan suaranya juga bebanding lurus

dengan besarnya prosentase masyarakat yang menganut agama Hindu di daerah Lampung Tengah, ditambah dengan dukungan pendukung partai dalam jumlah yang tidak signifikan.

Dengan kata lain bahwa faktor primordial masih menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan politik. *Kedua*, bahwa isu agama secara signifikan masih menjadi faktor yang cukup berpengaruh, kandidat yang maju dalam pilkada yang kebetulan menganut agama yang dianut oleh masyarakat dalam jumlah yang minoritas diprediksi sejak awal tidak akan memperoleh dukungan suara secara signifikan, dan itu kemudian menjadi sebuah kenyataan ketika hasil pemilihan diumumkan. Sekalipun kandidat tersebut didukung oleh partai yang dalam pemilu Legislatif memperoleh suara terbesar. *Ketiga*, bahwa ikatan ideologis kepartaian belum menjadi sebuah ikatan yang permanen.

Pengaruh kepentingan pragmatis primordial lebih besar mengikat perilaku warga dan pendukung partai. Konflik internal yang melibatakan pengurus dan pendukung partai Golkar Lampung Tengah menjelang Pilkada Lampung Tengah tahun 2005 memperlihatkan fenomena tersebut.

Konflik yang terjadi begitu tajam sampai berakibat bentrokan fisik justru terjadi di internal Partai, karena konflik kepentingan yang tidak menemukan titik temu pada tataran pengembalan keputusan resmi pada musyawarah partai, menyebabkan salah satu anggota atau pendukung partai menciderai pendukung partai yang sama secara fisik, dan bentrokan fisik itu justru terjadi di kantor partai itu sendiri. Peristiwa ini menyiratkan sebuah kenyataan betapa konflik kepentingan bukan saja bisa menyebabkan konflik antar partai, namun juga bisa menyebabkan konflik antar individu atau kelompok di internal parta.

## **Tabel**

### **Prosentase Hasil Pemilu Tahun 2004 oleh Masing-masing Partai Lampung Tengah**

No	Partai	Prosentase
1.	PNI	4,58%
2.	PBB	2,40%
3.	PPP	4,25%
4.	PDK	0,87%
5.	PNBK	1,80%
6.	DEMOKRAT	6,01%
7.	PAN	5,01%
8.	PKPB	4,30%
9.	PKB	11,78%
10.	PKS	4,5%
11.	PBR	1,40%
12.	PDIP	20,16%
13.	PDS	05,46%
14.	GOLKAR	24,67%
15.	PP	1,30%

Sumber : Hasil Pemilu Tahun 2004 dari 10 Kecamatan Terbesar (KPU Lampung Tengah)

## **4. Gambaran Umum Kehidupan Umat Beragama**

### **a. Jumlah Penganut Agama**

Menurut data di Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007, Secara kuantitatif mayoritas penduduk Lampung Tengah merupakan penganut agama Islam (89%), 5% menganut agama Hindu, 2, 22% menganut agama Budha, sedangkan penganut agama Kristen berada pada besaran jumlah yang hampir sama yaitu Kristen 1, 88% dan Katolik 1, 87%. Penganut agama Islam sebagai mayoritas penduduk tersebut bertempat tinggal di semua wilayah Kecamatan secara relatif

merata. Penganut agama Hindu umumnya hidup secara mengelompok, jumlah terbesar penganut Agama Hindu ada di Kecamatan Seputih Mataram, Sepuith Banyak dan di Kecamatan Rumbia. Hal tersebut bisa terlihat dari tabel yang disajikan berikut ini :

Tabel

## Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2006

No	Kecamatan	Agama Yang Dianut					Jum. Penddk
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1.	Padang Ratu	60.371	384	900	225	506	62.386
2.	Kali Rejo	56.456	747	1.332	582	306	59.423
3.	Bangun Rejo	49.152	968	653	673	168	51.614
4.	Gunung Sugih	56.027	845	710	15	12	57.609
5.	Trimurjo	45.027	1.612	563	1.006	312	48.834
6.	Punggur	31.177	815	1.292	1.011	1.808	36.103
7.	Seputih Raman	32.685	370	607	9.983	2.847	46.492
8.	Terbagi Besar	83.665	6.375	1.375	1.544	4.230	97.189
9.	Seputih Mataram	32.773	1.180	1.576	7.897	8.934	52.360
10.	Seputih Banyak	48.320	270	1.595	9.813	21	60.019
11.	Rumbia	45.376	626	1.176	7.731	2.450	57.359
12.	Seputih Surabaya	41.080	753	888	1.837	2.252	46.810
13.	Terusan Nunyai	39.721	416	718	3.121	170	44.146
14.	Bumi Ratu Nuban	24.028	383	388	1.316	310	26.425
15.	Bekri	28.371	348	517	546	214	29.996
16.	Seputih Agung	40.924	649	619	1.214	104	43.510

17.	Way Pengubuan	2.573	175	581	1.017	317	34.663
18.	Bandar Mataram	34.491	751	672	523	97	37.534
19.	Pubian	37.645	433	1.340	515	-	39.9333
20.	Selagai Lingga	33.834	341	598	910	-	35.683
21.	Anak Tuha	32.927	267	689	470	-	34.353
22.	Sendang Agung	33.658	958	831	573	93	36.113
23.	Kota Gajah	31.152	1.216	720	2.157	91	35.326
24.	Bumi Nabung	33.821	195	480	1461	15	35.972
25.	Bandar Surabaya	30.218	365	508	1.529	54	32.674
26.	Way Seputih						
27.	Anak Ratu Aji						
	Jumlah	1.012.726	21.442	21.328	58.729	25.301	1.139.526

Sumber: Lampung Tengah dalam Angka Tahun 2006

## **b. Sarana Peribadatan**

Secara Simbolik masing-masing kelompok penganut agama terikat dengan aturan formal dan kewajiban ritual agama masing-masing. Kebutuhan untuk melaksanakan peribadatan bagi umat Islam mendorong penganut agama Islam untuk membangun sarana peribadatan berupa Masjid, Musholla dan Langgar. Demikian juga bagi penganut agama lainnya. Umat Hindu disamping secara berkelompok memiliki sarana peribadatan bersama, juga masing-masing mendirikan sarana peribadatan di depan rumah kediaman keluarga, sehingga dengan mudah orang yang datang bisa mengenal dan membedakan penganut agama Hindu di sebuah tempat. Masyarakat penganut agama Budha terkesan seolah tidak terlalu mementingkan sarana peribadatan. Walaupun secara kuantitatif jumlah penganut agama Budha di daerah ini lebih besar dari Protetstan dan Katolik, namun jumlah sarana peribadatan yang mereka miliki jauh lebih kecil. Ini terjadi karena kesulitan bagi mereka untuk mencari lokasi pendirian rumah ibadah, disamping perilaku budaya mayoritas penganut agama Budha disini yang tidak terlalu mempedulikan keberadaan rumah ibadah, mereka lebih terikat pada kepentingan-kepentingan pengembangan ekonomi pribadi maupun kelompok yang mayoritas berasal dari warga keturunan (cina).

Tabel

jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006

No	Kecamatan	Tempat Peribadatan					
		Masjid	Mushala/Langgar	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pure	vihara
1.	Padang Ratu	145	167	4	2	1	2
2.	Kali Rejo	82	99	7	8	9	2
3.	Bangun Rejo	63	75	1	2	1	1
4.	Gunung Sugih	68	51	2	5	-	-
5.	Trimurjo	56	52	2	2	2	-
6.	Punggur	43	61	3	1	1	-
7.	Seputih Raman	28	66	1	4	7	3
8.	Terbagi Besar	62	82	5	2	3	1
9.	Seputih Mataram	31	62	3	3	7	-
10.	Seputih Banyak	61	64	4	2	5	-
11.	Rumbia	19	39	4	1	4	1
12.	Seputih Surabaya	52	43	5	3	1	1
13.	Terusan Nunyai	39	46	5	2	1	-
14.	Bumi Ratu Nuban	31	58	1	1	3	-



15.	Bekri	29	48		2	1	1	3
16.	Seputih Agung	46	79		3	1	2	-
17.	Way Pengubuan	31	54		1	2	1	-
18.	Bandar Mataram	29	59		2	1	6	-
19.	Pubian	62	79		3	1	2	-
20.	Selagai Lingga	71	64		1	1	-	-
21.	Anak Tuha	65	79		1	-	-	-
22.	Sendang Agung	67	85		3	1	2	1
23.	Kota Gajah	40	46		2	3	-	1
24.	Bumi Nabung	36	35		1	1	1	-
25.	Bandar Surabaya	32	75		2	3	4	2
26.	Way Seputih	-	-		-	-	-	-
27.	Anak Ratu Aji	-	-		-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.288</b>	<b>1.668</b>		<b>68</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>3.141</b>

Sumber: Lampung Tengah dalam Angka Tahun 2006

Pembangunan sarana peribadatan ini sebagian besar merupakan hasil swadaya masyarakat penganut agama masing-masing, dan hanya sebagian kecil merupakan bantuan Pemerintah Pusat maupun daerah. Kondisi sarana tersebut sebegini besar terawat dan, terpelihara termanfaatkan sekalipun umunya baru terbatas pada keperluan pelaksanaan ibadah ritual. Hampir semua Masjid difungsikan untuk kegiatan sholat lima waktu, sholat Jum'at, shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan sekali-kali difungsikan juga sebagai sarana sosial, seperti kegiatan rembug atau musyawarah untuk kepentingan bersama, dan kegiatan lainnya. Demikian juga halnya dengan Gereja. Pada hari-hari Minggu dan hari-hari peribadatan umat Nasrani selalu terlihat pengunjung yang melakukan kegiatan peribadatan di tempat-tempat tersebut. Pelaksanaan ritual umat beragama nampaknya masih menjadi simbol utama religiusitas masyarakat.

Keinginan untuk merealisasikan ajaran agama juga tercermin pada kegiatan sosial keagamaan. Ini terutama dilakukan melalui kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan. Kualitas lembaga-lembaga keagamaan yang ada mencerminkan tingginya keinginan untuk mengaktualisasikan ajaran agama pada masing-masing kelompok pemeluk agama. Masyarakat muslim mempunyai 1503 temuan pengujian Al-Qur'an 1274 Majelis Ta'lim yang dijadikan kelompok informal dalam kegiatan pendidikan agama. Pada tataran pendidikan formal terdapat 78 buah Pesantren.

### **c. Organisasi/Kelompok Keagamaan.**

Implementasi ajaran agama oleh masyarakat pemeluk agama pada umumnya memang masih lebih banyak pada wilayah aktifitas yang bernuansa peribadatan (ritual), yang dilakukan di tempat-tempat peribadatan masing-masing agama seperti masjid dan musholla, Gereja, Pure maupun vihara.

Namun bagi pemeluk agama yang memahami bahwa agama yang dianutnya tidak hanya menuntut pelaksanaan aktifitas ritual, implementasi ajaran agama juga diwujudkan dalam wilayah-wilayah kegiatan sosial. Dalam rangka tersebut organisasi sosial keagamaan banyak dibentuk. Disamping sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok keagamaan yang dalam hal-hal tertentu juga dipandang memiliki kekhasan dibandingkan kelompok lain.

Sebagai umat yang secara kuantitatif terhitung mayoritas, masyarakat muslim memiliki organisasi sosial keagamaan yang lebih banyak dibanding kelompok masyarakat yang beragama lain. Dikalangan internal umat Islam, ekspresi keagamaan antara satu kelompok aliran dengan kelompok aliran lain terkadang memiliki perbedaan, sekalipun hanya pada hal-hal yang dipandang tidak substantif (*furu'iyah*).

Demikian juga halnya dikalangan penganut agama kristen dan katolik, juga terdapat sekte-sekte dan aliran yang memandang perlu untuk membentuk komunitas tersendiri sehingga juga membentuk perkumpulan keagamaan yang bernuansa sektarian tersendiri. Sebagian dari sekte-sekte dalam kristen dan katolik tidak terpantau oleh para elit organisasi secara struktural.

Demikian juga kelompok yang dimiliki oleh agama lain. Tabel berikut menggambarkan organisasi/kelompok yang ada di Kabupaten Lampung Tengah .

**Tabel**  
**Organisasi/ Kelompok Keagamaan**  
**Di Kabupaten Lampung Tengah**

No	Islam	Kristen Dan Katolik	Hindu	Budha
1	NU	HKBP	Parisada Hindu Dharma	Walubi
2	Muhammadiyah	Immanuel		
3	Persis	Advent		
4	Perti	Pantekosta		
5	PITI			
6	DDII			
7	LDII			

Wawancara Dengan Staf KUA Kecamatan Terbangi Besar<sup>50</sup>

**d. Aktifitas ummat beragama**

Seperti diuraikan diatas bahwa aktifitas yang bernuansa peribadatan (ritual), kenyataannya memang masih menjadi ekspresi keberagaman masyarakat berbagai agama yang dominan, baik pada tataran pribadi maupun kelompok. Karena itu sarana preribadatan berupa masjid dan musholla, Gereja, Pure dan Vihara, merupakan sarana utama kehidupan beragama yang dianggap penting oleh semua kelompok pemeluk agama. Pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh penduduk yang masyoritas beragama Islam, sarana peribadatan berupa masjid dan musholla bisa ditemukan disemua sudut desa. Bahkan di beberapa desa jumlah masjid dan musholla melebihi yang ada di desa lain. Masjid dan musholla dikunjungi oleh warga muslim pada waktu-waktu pelaksanaan sholat lima waktu. Pada waktu maghrib jumlah masyarakat muslim yang beribadah di mesjid meningkat di banding waktu-waktu sholat lainnya. Khusus pada hari jum'at dimana muslim harus melaksanakan ibadah sholat jum'at, masjid dipenuhi oleh kaum laki-laki muslim yang akan melaksanakan sholat jum'at., Demikian juga sarana peribadatan umat yang

<sup>50</sup> Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Terbangi Besar, 1 Juni 2007

beragama lain. Gereja-gereja ramai dikunjungi jema'atnya pada hari minggu dan hari-hari peribadatan lainnya. Orang-orang kristen dan katolik pemukimannya tidak mengelompok, sehingga pengunjung sebuah gereja belum tentu penduduk kristen yang tempat tinggalnya berdekatan dengan gereja tempatnya beribadat. Pure-pure bagi penganut agama Hindu terdapat di beberapa tempat di wilayah yang penganut hindunya terhitung cukup banyak. Mereka mengunjungi dan melaksanakan aktifitas peribadatan di pure-pure besar atau di tempat-tempat peribadatan yang ada di depan rumah tempat tinggal masing-masing keluarga. Sesekali ada mobilisasi massa Hindu, terutama pada hari-hari raya keagamaan. Selain dalam aktifitas yang bernuansa ritual, implementasi ajaran agama yang berdimensi sosial dilakukan dalam aktifitas- aktifitas sosial pendidikan dan sosiasal ekonomi. Umat Islam banyak mendirikan lembaga-lembaga Pendidikan Agama (Islam) dan lembaga pendidikan umum yang bernuansa keagamaan.

Organisasi Muhammadiyah dan NU menyelenggarakan aktifitas pendidikan yang terlihat di beberapa tempat. Muhammadiyah mengelola sebuah perguruan yang terhitung cukup besar yang terletak di Kelurahan Bandar Jaya Terbanggi Besar, Kota Gajah dan di beberapa tempat lainnya. Disamping aktifitas pendidikan, orang-orang Muhammadiyah juga mengelola lembaga-lembaga ekonomi seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT), Koperasi, dll, sekalipun masih dalam tahap perkembangan. Sebuah Toko Satu Harga (multi M) yang terletak di Pasar Bandar Jaya dikelola oleh para aktifis muda Muhammadiyah. Demikian juga orang-orang NU. Aktifitas sosial NU lebih nampak pada pengelolaan Pesantren yang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah terlihat di hampir setiap Kecamatan. Setiap Pesantren diasuh dan dipimpin oleh seorang Kiyai yang dibantu oleh para guru pengajar (ustadz), yang umumnya santri senior Kiyai pengasuh. Dikalangan penganut kristen dan katolik aktifitas sosial

tampak dalam pengelolaan lembaga-lembaga Pendidikan umum yang bernuansa keagamaan, sekalipun siswa-siswi yang belajar di lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mereka yang beragama kristen. Dibeberapa tempat terdapat lembaga-lembaga pendidikan bernuansa Kristen, sekalipun lembaga-lembaga tsb belum terhitung besar.

## **5. Sikap Masyarakat Tentang Pola Hubungan Kehidupan Umat Beragama**

### **a. Hubungan Intern Penganut Agama**

Kemajemukan (Pluralitas) sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan dalam masyarakat yang semakin dinamis dan mengalami mobilitas sosial yang semakin tinggi. Di Kecamatan Terbanggi Besar yang menjadi wilayah fokus penelitian, pluralitas itu menjadi kenyataan yang membawa implikasi positif dan negatif sekaligus. Dipandang dari perspektif budaya, mayoritas masyarakat Terbanggi Besar merupakan masyarakat yang berasal dari suku jawa yang dalam kesehariannya memperlihatkan dan menggunakan simbol-simbol kejawaan seperti bahasa jawa sebagai bahasa pergaulan. Namun dipandang dari sisi agama, mayoritas masyarakat Terbanggi Besar adalah muslim (menganut agama Islam). Antara satu suku dengan suku lain melakukan interaksi sosial dan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di kelurahan Bandar Jaya khususnya terdapat masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan yang berbeda-beda. Orang-orang yang berasal dari suku Minang yang umumnya pedagang yang merupakan activist dan paling tidak simpatisan organisasi Muhammadiyah, berinteraksi dengan para pembeli dan pelanggan dari suku-suku lainnya dengan tidak melihat dari kelompok Islam mana ia berasal. Interaksi intensif dan terkadang diwarnai oleh suasana kompetisi terselubung antara berbagai kelompok

keagamaan Islam terjadi di arena peribadatan dan aktifitas sosial yang diwadahi *masjid Istiqlal* pasar Bandar Jaya.

Masjid ini mulai dibangun sejak beberapa tahun silam, namun pemakaiannya baru diresmikan oleh Bupati Lampung Tengah lebih kurang 2 tahun yang lalu. Sekalipun inisiatif pembangunannya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari suku Minang yang nota-bene Muhammadiyah, namun kini kepengurusannya sudah majemuk dari berbagai kelompok. Pola peribadatannya netral dan demokratis, tergantung dari imam yang bertugas. Kalau imam yang bertugas orang Muhammadiyah maka terlihat ia menerapkan simbol-simbol peribadatan Muhammadiyah, demikian juga ketika orang NU yang memimpin sholat, ia akan membawa simbol-simbol peribadatan ala NU seperti membaca do'a qunut ketika sholat shubuh, membaca zikir dan do'a dengan suara yang dikeraskan, dll.<sup>51</sup> Interaksi antar berbagai kelompok agama intern Islam disini berlangsung tanpa masalah yang berarti, kecuali konflik kepentingan antar kelompok yang menginginkan simbol-simbol kelompoknya lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Namun menurut informan yang sama, di masjid lain pernah terjadi keributan kecil yang mengundang campur tangan pemerintah untuk penyelesaiannya. Peristiwa tersebut terjadi akibat kesalah-pahaman. Suatu kelompok keagamaan Islam yang melakukan kegiatan dakwah keliling (*jaulah*) dari masjid ke masjid, ditolak kehadirannya disebuah masjid karena dianggap aliran baru yang dikhawatirkan mengotori bangunan fisik masjid. Apalagi kelompok ini melakukan aktivitas, istirahat dan memasak untuk keperluan makan mereka selama melakukan aktifitas itu di masjid.

Dari informasi yang disajikan di atas terlihat gambaran bahwa sekalipun belum terjadi konflik yang berarti, namun potensi konflik intern umat beragama umumnya dipicu oleh

---

<sup>51</sup> Padli SH, MM, (Lurah Bandar Jaya Barat), wawancara dicatat pada tanggal 8 Juli 2007

perbedaan faham atau aliran agama. Potensi konflik dapat berkembang dan menimbulkan masalah ketika masing-masing kelompok ingin menonjolkan egoisme kelompoknya. Namun demikian kedewasaan serta kadar pemahaman terhadap agama yang memadai menjadi faktor tumbuhnya sikap toleran dan menghargai perbedaan yang ada.

#### **b. Hubungan Antar Penganut Agama**

Hubungan antar penganut agama umumnya terjadi di arena-arena diluar arena peribadatan formal, seperti arena ekonomi. Di kecamatan Terbanggi Besar, khususnya di Kelurahan Bandar Jaya, sebagian pedagang (umumnya pedagang besar) adalah warga keturunan Cina yang menganut agama Budha dan sebagian lainnya Kristen dan Khatolik. Pada pedagang keturunan ini, sehari-hari berhubungan dengan warga muslim di arena perdagangan, Interaksi pedagang dan pembeli dalam wadah kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatis.

Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan tradisional lain yang masih melekat dalam kehidupan sosial pada aneka suku yang ada. Pada suku Jawa yang mayoritas di Kecamatan Terbanggi Besar, kegiatan gotong royong dilakukan baik untuk mewujudkan sarana atau fasilitas yang menyangkut kepentingan bersama maupun pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat kehidupan pribadi. Kerjasama seluruh komponen masyarakat biasanya terjadi tanpa melihat perbedaan agama. Seperti penuturan Bapak Santari seorang penganut Khatolik, disamping ikut bergotong royong bersama-sama warga yang berbeda agama dalam memperbaiki dan membangun sarana desa, warga yang beragama Khatolik pun tak segan untuk datang membantu atau ikut berpartisipasi pada acara-acara keluarga yang diadakan oleh warga desa lain, sekalipun beragama yang berbeda<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Sulastris, Wawancara dicatat pada tanggal 1 Juni 2007



Demikian juga sikap warga muslim terhadap warga yang beragama lain, dalam acara-acara warga yang beragama lain, kalau memang diundang dan diharapkan ikut serta warga muslim juga tidak sungkan-sungkan untuk menghadiri acara tersebut, meskipun kalau dalam hal menikmati hidangan agak berhati-hati khawatir kalau ada hidangan yang berupa makanan yang tidak dibolehkan menurut ajaran Islam.<sup>53</sup> Pendirian yang masih umum ditemukan ditengah masyarakat bahwa dalam hal makanan mereka berprinsip lebih baik tidak makan dari pada makanan yang dihidangkan meragukan kehalalannya.

Pada peristiwa kematian, saling mengucapkan rasa berbelas sungkawa antar warga yang keluarganya mengalami musibah kematian adalah fenomena sosial yang biasa terjadi, Sunkono seorang warga Kelurahan Yukum Jaya yang beragama Kristen menjelaskan bahwa kadang-kadang ia dan kawan-kawan Kristen lainnya hadir pada acara-acara *slametan* kematian warga muslim, apalagi kalau hubungan dengan keluarga yang ditimpa musibah sedah terjalin dengan baik. Kenyataan yang tergambar di atas merefleksikan betapa kerukunan memang telah menjadi kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang kadar pengetahuan terhadap ajaran agamanya memadai, terdapat sikap hati-hati dan pemilahan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekalipun atas alasan ingin bertoleransi dan saling tenggang rasa. Secara garis besar terlihat bahwa perbedaan agama tidak membuat sekat-sekat yang mengelompokkan masyarakat dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi. Interaksi antar masyarakat lintas agama terjadi balik secara individu maupun kelompok tanpa melihat agama sebagai pembatas apalagi penghalang.

---

<sup>53</sup> Sarkani, Wawancara dicatat pada tanggal 1 Juni 2007

### **c. Hubungan Antar Umat Beragama Pada Tataran Pribadi**

#### **1) Hubungan Pertemanan**

Secara teoritik normatif manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah bisa menghindari dari kerjasama, interaksi dan menjalin relasi sosial dengan sesama. Apa yang telah menjadi naluri tersebut pada kenyataannya semakin mengkristal ketika berhadapan dengan realitas empirik yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan terhadap kerjasama bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat psikologis yang bemuara pada ketenangan yang bernuasa psikologis, tapi juga acap kali didorong oleh kebutuhan pragmatis ekonomis, dalam rangka memenuhi hajat kebutuhan ekonomi. Fakta yang ditemukan memperlihatkan beberapa kenyataan tersebut. 100% responden mengakui bahwa manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, suku dan budaya. Pengakuan responden diatas sekaligus juga menyiratkan keinginan untuk menghilangkan eksklusifitas individual dan kelompok, baik atas dasar agama atau atas dasar sekat-sekat simbolis primordial yang acapkali menjadi halangan bagi terciptanya harmonitas sosial. Keinginan untuk menghilangkan segala bentuk eksklusifitas tersebut dipertegas dengan pernyataan 100% responden yang setuju bahwa bergaul dengan siapapun termasuk yang berbeda agama, suku, budaya dan bahasa harus dijalin dengan baik.

Keinginan masyarakat Lampung Tengah untuk mewujudkan harmonitas pada tataran pergaulan individu tanpa melihat batas-batas agama dan budaya diperkuat oleh utuk memupuk tali hubungan kekerabatan melalui acara-acara tradisional yang dirasakan berfungsi memperkuat kekerabatan. Dalam hubungan tersebut mayoritas responden (90,9%) yang menyatakan setuju untuk menghadiri undangan hajatan dari teman sekalipun berbeda agama. Perbedaan agama nampaknya tidak menjadi kendala psikologis dalam menjalin hubungan pertemanan yang

harmonis. Sekalipun pada sisi yang lain sebagian responden terkesan tidak memperdulikan norma-norma ajaran agama dalam membina hubungan sosial lintas agama. Hal tersebut dapat dipahami dari pernyataan 59% responden yang menyatakan setuju jika undangan acara keagamaan dari penganut agama lain harus dihadiri, dengan kata lain bahwa kebanyakan responden lebih mengedepankan kepentingan menjaga harmonitas hubungan persahabatan dibanding pertimbangan apakah hal tersebut melanggar norma yang diatur dalam ajaran agama masing-masing atau tidak. Semangatt persahabatan yang relatif tinggi terebut ditopang oleh semangat sosial yang terekspresi dalam keinginan untuk saling tolong menolong antara anggota masyarakat meskipun berbeda agama. 95% responden setuju pada pernyataan keharusan untuk melaksanakan kegiatan tolong menolong dengan tidak membedakan agama. Sekat-sekat wilayah, atau dominasi penghunian suatu wilayah hanya oleh suatu agama tertentu merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh semua anggota masyarakat di wilayah penelitian, hal terebut ditandai oleh ketidaksetujuan seluruh responden (100%) jika suatu wilayah dihuni oleh satu kelompok umat beragama atau satu suku tertentu saja. Artinya hidup berdampingan dan berbaur antar pemeluk berbagai agama dengan damai merupakan kondisi ideal yang diharapkan masyarakat pemeluk agama manapun. Sekalipun demikian juga oleh semua individu dalam masyarakat, suatu hal yang dipandang wajar dan seringkali menjadi kebiasaan yang membudaya dikalangan masyarakat pemeluk suatu agama, jika hal terebut bertentangan dengan norma agama pemeluk agama lain maka hal tersebut harus diwaspadai agar tidak menimbulkan masalah. Seperti memelihara Babi, Anjing yang menjadi kebiasaan penganut agama suatu agama bisa ditolerir sepanjang hewan terebut tidak dibiarkan berkeliaraan. 100% responden menyatakan ketidaksetujuan mereka jika hewan tersebut

dibiarkan berkeliaran. Sekalipun hal ini bisa jadi tidak didasarkan atas pandangan yang terbentuk oleh pengaruh agama semata, dan bisa jadi hal tersebut didasarkan oleh keinginan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari polusi kotoran-kotoran hewan, dsb.

## **2) Hubungan Pertetanggaan**

Hidup bertetangga merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin plural baik dari sisi agama, budaya dan bahasa, menyebabkan keragaman dan perbedaan perilaku dalam bertetangga. Konflik serta potensi konflik bisa diukur dan dipahami melalui ekspresi sedemikian rupa. Mayoritas responden dalam wilayah penelitian menghendaki suasana harmonis dalam kehidupan bertetangga yang karena itu seluruh anggota masyarakat harus melakukan upaya untuk mewujudkan dan menjaga harmonitas itu, dalam berbagai aktifitas sosial. Hampir semua responden menginginkan agar pergaulan individu atau kelompok tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama. 99% responden berpendapat bahwa sebaiknya pergaulan antar tetangga tetap terjalin sekalipun berbeda agama, 91% menginginkan untuk tetap saling menghadiri undangan tetangga dalam kegiatan yang bernuansa adat istiadat. Dalam peristiwa duka seperti kematian, 90% berpendapat setuju jika tetangga yang berbeda agama menampakkan rasa simpati, bahkan dalam peristiwa kematian yang dialami oleh tetangga yang berbeda agama, tetangga yang lain seharusnya tidak berkeberatan untuk terlibat dalam pengurusan jenazah (79%) dan hanya sebagian kecil (21%) yang menyatakan keberatan untuk melakukan hal itu. Bahkan pada umumnya (60%) responden setuju untuk memberikan dukungan fasilitas bagi kepentingan pelaksanaan ibadah bagi tetangga yang berbeda agama. Hanya saja masih terjadi kontroversi pendapat yang seimbang dikalangan responden, jika kegiatan menjaga harmonitas

pertetanggan itu dipandang sudah menyentuh wilayah keyakinan yang dianggap mendasar. Terhadap keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong membangun rumah ibadah agama lain, 50% responden menyatakan setuju dan 50% lainnya menyatakan tidak setuju.

### **3) Hubungan Kekkerabatan**

Pada umumnya masyarakat menginginkan agar hubungan kekerabatan dijaga dan dilakukan dengan tetap berpegang pada norma-norma agama, apalagi pada aspek-aspek yang dipandang merupakan hal yang mendasar dalam ajaran agama. Namun satu hal yang pada umumnya disepakati responden adalah bahwa perbedaan agama dalam suatu keluarga tidak menjadi faktor yang mengganggu hubungan kekerabatan. Dengan kata lain tali kekerabatan tetap terjaga tanpa terhalangi oleh perbedaan agama.

Namun demikian kebanyakan responden (59%) memandang persaudaraan atas dasar kesamaan agama lebih sempurna dan lebih utuh serta tidak memungkinkan timbulnya masalah dalam melaksanakan ajaran atau ketentuan agama. Ini tidak berarti sebuah keharusan untuk melakukan pemutusan hubungan kekerabatan dengan anggota keluarga yang tidak seagama. Hanya saja sikap kehati-hatian terhadap anggota keluarga yang berbeda agama juga tetap perlu diterapkan terutama dalam hal-hal yang menyangkut makanan. Hal tersebut terlihat pada sikap hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh famili yang berbeda agama (64%), dan ketidaksetujuan dengan pernikahan dengan orang yang berbeda agama (65%). Sikap tegas responden masih nampak pada penolakan terhadap sikap longgar terhadap ajaran agama semata-mata didasari atas alasan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan anggota keluarga yang berbeda agama (64% menolak sikap longgar tersebut).

#### **d. Hubungan Pada Tataran Peribadatan**

Persoalan relasi antar pemeluk agama yang menyangkut acara seremonial keagamaan sampai saat ini masih tersisa sebagai persoalan yang krusial dan dikalangan penganut agama tertentu dipandang sebagai hal yang mengganggu. Dalam Islam umpamanya, seremoni keagamaan dipandang sebagai wilayah substansi agama yang karena itu hanya boleh dimasuki oleh penganut ajaran agama itu, tanpa keterlibatan penganut agama lain dengan alasan apapun. Namun tidak demikian halnya menurut agama lain. Ajaran normatif agama dimaksud secara teoritik berimbas pada sikap penganut agama terhadap acara serimoni yang bernuansa peribadatan pada agama lain. Realitas yang ditemukan dilapangan memperlihatkan kenyataan yang berbeda dari norma-norma ideal diatas, namun pada sisi lain menampakkan kenyataan betapa budaya toleransi dan harmonitas hubungan antar pemeluk agama memang sudah mewujud sampai pada tingkat yang meyimpang dalam perspektif substansi ajaran agama.

Terhadap acara-acara peringatan hari besar agama lain, atas dasar keinginan untuk menjaga kerukunan antar penganut agama, mayoritas responden (68%) memandang kegiatan menghadiri peringatan hari besar agama lain dibenarkan. Demikian juga halnya dengan mengucapkan salam, 54% responden memandang dibolehkan untuk mengucapkan salam untuk penganut agama lain. Sekalipun jumlah tersebut tidak signifikan karena 46% lainnya memandang salam bukan sekedar sebuah simbol sapaan biasa yang boleh diucapkan dihadapan semua agama, namun ia merupakan sapaan yang bernilai sakral dan mengandung nilai ibadah (ritual).

#### e. **Aspek hubungan Antar Kelompok Agama**

Hubungan antar umat beragama tidak hanya dalam bentuk interaksi individual namun juga terlihat dalam bentuk hubungan antara kelompok atau organisasi keagamaan. Kesadaran berkelompok (berorganisasi) dikalangan kelompok-kelompok keagamaan dalam realitasnya cukup tinggi yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa hampir setiap komunitas agama mempunyai wadah organisasi sosial keagamaan yang salah satunya berfungsi sebagai wadah kolektif memperjuangkan kepentingan komunitas agama. Setiap organisasi keagamaan biasanya dipimpin oleh para tokoh agama yang oleh komunitasnya dianggap memiliki pengaruh yang cukup dalam kelompok atau komunitasnya. Secara sosiologis peran tokoh agama ini ternyata sangat penting, demikian juga halnya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Keseluruhan responden (100%) mengakui peran penting tokoh agama dalam menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Nilai ketokohan para tokoh agama ternyata menjadi *guidance* (penunjuk arah) bagi warganya dalam hubungan dengan umat lain, 91% responden menyatakan bahwa kerukunan pada tokoh agama di tingkat nasional perlu diikuti oleh tokoh agama di daerah, artinya perilaku para tokoh agama masih menjadi barometer bagi umat dibawahnya. Pertemuan rutin para tokoh agama dalam suasana akrab dan penuh keterbukaan merupakan merupakan sebuah sarana kerukunan yang keberadaannya juga diharapkan oleh 91% responden yang dihubungi. Dengan demikian harmonitas hubungan antar umat beragama yang tersealisasi dalam bentuk komunikasi antar para tokoh agama yang tergabung dalam wadah-wadah formal seperti Forum Komunikasi Umat Beragama sangat diperlukan. Karenanya menurut responden keberadaan FKUB diperlukan untuk kepentingan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam konteks menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama, 90% responden berpendangan bahwa masing-

masing missionarist (pendakwah) agama harus berpegang pada koridor aturan yang ada, dengan kata lain kegiatan penyebaran agama dengan cara-cara yang melanggar aturan merupakan cara yang tidak dikehendaki oleh semua kelompok agama, karena kekhawatiran hal tersebut akan menjadi salah satu pemicu konflik. Sikap toleran terhadap keyakinan dan faham keagamaan kelompok lain, termasuk intern umat beragama merupakan sebuah sikap yang semestinya dimiliki oleh semua umat beragama. Dan dalam hal tersebut 91% responden berpendapat bahwa sikap dan perbuatan mengkafirkan orang yang berbeda faham termasuk dalam intern umat beragama merupakan sikap dan perilaku yang dapat merusak kerukunan umat beragama.

#### **f. Hubungan antar umat beragama dan pemerintah.**

Dalam hal yang menyangkut kehidupan beragama fungsi pemerintah antara lain melakukan regulasi agar tercipta suasana harmonis dan dinamis antar masyarakat beragama maupun antar masyarakat beragama dengan pemerintah, menjadi fasilitator dan dinamisator kehidupan beragama baik dengan menyediakan perangkat system maupun dukungan sarana financial.<sup>54</sup> Implementasi dari tugas-tugas pemerintah di atas antara lain secara teknis dilaksanakan dalam penyusunan program dan kebijakan tentang pembangunan bidang keagamaan baik berupa sarana fisik dan pengembangan mental yang berangkat dari realitas kebutuhan yang ada. Demikian juga Bantuan sarana dan prasarana keagamaan lintas agama seperti sarana ibadah dan pendidikan. Setiap tahun Kandepag Lampung Tengah membangun dan memperbaiki sarana pendidikan yang ada, baik negeri maupun swasta.<sup>55</sup> Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pengembangan umat agama juga terlihat pada bantuan Pemda

---

<sup>54</sup> M. Wazer (Kabag TU Kandepag Lampung Tengah), Wawancara dicatat pada tanggal 1 Juni 2007

<sup>55</sup> Drs. Qomarul Zaman, Wawancara dicatat pada tanggal 14 Juni 2007



terhadap sarana dan kegiatan-kegiatan keagamaan dan bernuansa keagamaan, meskipun dalam jumlah yang tidak signifikan. Masjid Istiqlal yang megah yang dibangun di tengah keramaian kota Bandar Jaya sebagian dananya merupakan bantuan pemerintah Pemda Lampung Tengah.<sup>56</sup>

Respon umat beragama terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah dapat dilihat pada tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan legal formal yang menyangkut kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama yang menyangkut kehidupan beragama. Seperti penuturan Dalimi, seorang PJS Kepala KUA Terbanggi Besar bahwa kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya, peristia Talak dan ruju' sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang ada sudah tinggi, sehingga tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi dalam bidang itu sudah semakin ringan. Hanya saja menurut penuturannya, khusus dalam hal ketentuan pendirian rumah ibadah memang masih terjadi kesalah pahaman di tengah masyarakat tentang prosedur legal yang diatur untuk mendirikan rumah ibadah, Sekali-sekali ditemukan pelanggaran yang mengundang campur tangan pemerintah untuk penyelesaiannya.<sup>57</sup> Dalam hal pendirian rumah ibadah pada umumnya masyarakat beragama memahami keberadaan aturan legal formal yang ada dalam hal itu. 77% responden yang dihubungi menyatakan setuju jika dalam hal pendirian rumah ibadah perlu diatur undang-undang, dan itu menurut mereka bukan sebuah diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Deskripsi di atas memperlihatkan pernyataan adanya harmonitas antar umat beragama dengan pemerintah. Harmonitas itu terjadi ketika pemerintah sebagai regulator, fasilitator, stabilisator dan dinamisator kehidupan masyarakat menjalankan fungsinya. Respon positif masyarakat diperlihatkan dengan sikap apresiatif,

---

<sup>56</sup> M. Fadli, SH, MM, Wawancara dicatat pada tanggal 17 Juni 2007

<sup>57</sup> Dalimi, Wawancara dicatat pada tanggal 17 juni 2007

dan taat menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa dengan masing-masing pihak pemerintah dan umat beragama menjalankan fungsinya secara sinergis maka harmonitas atau kerukunan itu juga menjadis kenyataan. Apa yang dilakukan pemerintah umumnya menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung dan masyarakat merasakan manfaat langsung dari sikap taat mereka terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat. Sekalipun dalam hal tersebut sekali-kali terlihat ada perbedaan kepentingan yang belum bersinergi dalam sebuah titik temu.

Keinginan dan kebijakan pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima di pasar Bandar Jaya agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas umpunya tidak serta merta dapat terwujud, karena pedagang merasa hal tersebut akan berpengaruh kepada pendapatan yang merupakan tumpuan hidup mereka, sekalipun pada akhirnya dapat ditemukan jalan keluar dari hal tersebut seperti memutar rute kendaraan ke jalan lain yang ternyata justru berdampak positif.<sup>58</sup> Perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah dalam suatu hal terjadi karena belum dikomunikasi kannya secara maksimal kebijakan Pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dan ketika komunikasi dilakukan maka perbedaan persepsi dapat dipersempit dan pada akhirnya kesepahaman dapat dicapai.

Pada sisi yang lain, relasi antara Pemerintah dan masyarakat belum ada pada wilayah yang seimbang. Seperti penuturan informan dilapangan bahwa pada tataran pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, inisiatif dan rencana-rencana masih lebih banyak datang dari pihak pemerintah, kecuali pada hal-hal yang oleh masyarakat dirasakan sebagai persoalan yang mendesak dan masyarakat merasakan bahwa campur tangan pemerintah merupakan hal

---

<sup>58</sup> M. Fadli, Wawancara dicatat pada tanggal 18 Juni 2007

yang tak bisa dihindari dan mendesak, maka masyarakat mengambil inisiatif untuk kemudian pemerintah memfasilitasi untuk perwujudan hal tersebut.

#### **D. Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Aspek Historis Lampung Timur**

Pepatah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai sejarah bangsanya sendiri. Dalam skala yang lebih mikro, maka penghargaan terhadap sejarah daerahnya tidak akan dapat terwujud tanpa terlebih dahulu memahami dinamika sejarah daerahnya tersebut dengan jujur dan adil. Berikut akan diuraikan aspek historis pemerintah Kabupaten Lampung Timur sejak masa pemerintahan penjajah Belanda, masa pemerintahan penjajah Jepang dan setelah masa kemerdekaan.

##### **1) Zaman Pemerintahan Belanda**

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder Afdeling* Sukadana yang dikepalai oleh seorang *Controleur* berkebangsan Belanda dan pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia. *Onder Afdeling* Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu :

- a. *Onder Distrik* Sukadana
- b. *Onder Distrik* Labuhan Maringgai
- c. *Onder Distrik* Guning Sugih

Masing-masing *Onder Distrik* dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai Pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah. Masing-masing *Onder Distrik* terdiri dari Marga-marga, yaitu :  
*Onder Distrik* Sukadana terdiri dari;

- a. Marga Sukadana
- b. Marga Tiga
- c. Marga Nuban
- d. Marga Unyai Way Seputih

Onder Distrik Labuhan Maringgai terdiri dari;

- a. Marga melinting
- b. Marga Sekampung Ilir
- c. Marga Sekampung Udik
- d. Marga Subing Labuhan

Onder Distrik Gunung Sugih terdiri dari;

- a. Marga Unyi
- b. Marga Subing
- c. Marga Anak Tuha
- d. Marga Pubian

## 2) **Zaman Jepang (1942-1945)**

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada masa Pemerintahan Jepang merupakan wilayah *Bun Shu Metro*, yang terbagi dalam beberapa *Gun Shu*, Marga-marga, dan Kampung-kampung. *Bun Shu* dikepalai oleh seorang *Bun Shu Cho* dan *Gun Shu* dikepalai oleh *Gun Shu Cho*, Marga dikepalai oleh *Marga Cho*, dan Kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

## 3) **Zaman Kemerdekaan**

Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan Pasal 2 UUD 1945, maka *Bun Shu Metro* berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga tahun 1948. Itulah sebabnya, jika ditinjau dari perkembangan organisasi pemerintahan maka

pembagian wilayah Lampung atas kabupaten-kabupaten dianggap telah terjadi pada zaman pemerintahan Jepang.

Beberapa peristiwa penting atau kejadian-kejadian yang patut dicatat antara lain ialah bahwa pada tahun 1946-1947 jumlah marga bertambah 2 marga, yaitu :

- a. Marga Terusan Unyai;
- b. Marga Selaga Lingga

Tambahan marga ini terjadi karena adanya perubahan batas wilayah ataupun karena terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk.

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Lampung Timur memasuki Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975). Dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga, maka sebagai gantinya dibentuklah Pemerintahan Negeri yang terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri, yaitu :

- a. Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan.
- b. Negeri Tribawono dengan pusat pemerintahan di Banar Joyo.
- c. Negeri Sekampung dengan pusat pemerintahan di Sumbergede.
- d. Negeri Sukadana dengan pusat pemerintahan di Sukadana.
- e. Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat pemerintahan di Labuhan Maringgai.

Dalam prakteknya sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintahan Kecamatan dan Keadaan ini menyulitkan tugas Pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sejak tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak mengangkat lagi Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya. Dengan demikian

secara bertahap Pemerintahan Negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada pemerintahan Kecamatan setempat.

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dibagian Timur, maka dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung Jabung, Labuhan Meringgai, Way Jepara, Sukadana, Pekalongan, Raman Utara, dan Purbolinggo.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II.

Pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999, wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (Sepuluh) kecamatan definitif dan 13 (tiga belas) kecamatan pembantu.

Dengan kata lain, Kabupaten Lampung Timur pada dasarnya merupakan hasil pemekaran yang sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Setelah menjadi kabupaten yang definitive ibu kota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Sejak berdiri Kabupaten Lampung Timur pada tahun 1999 sampai sekarang, dijabat oleh 5 (lima) Bupati yaitu :

- a. H. Muhamad Nurdin, SH : Menjabat dari April 1999 s.d. April 2000.
- b. Ir. H. Irfan N. Djafar, CES : Menjabat dari 2000 s.d. Desember 2002.

- c. H. Bahusin MS. : Menjabat dari Desember 2002 s.d. Mei 2005.
- d. H. Syaiful Anwar HAM, S.H. : Menjabat dari Mei 2005 s.d. Agustus 2005.
- e. H. Satono, S.H., S.P. : Menjabat dari Agustus 2005 s.d. sekarang.(BPS Lampung Timur, Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006, hlm. xvii – xxi )

## 2. Adat-istiadat Lampung Timur

Secara umum masyarakat adat Lampung Timur adalah termasuk masyarakat adat Pepadun, yang terkenal dengan istilah Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku. Kalaupun terdapat masyarakat adat Peminggir, hal tersebut hanya dapat dijumpai di beberapa desa/kampung saja. Upacara-upacara adat pada umumnya dapat terlihat pada acara-acara perkawinan/ pernikahan, di mana perkawinan/pernikahan tersebut dilakukan menurut tata cara adat tradisional disamping kewajiban memenuhi hukum Agama Islam.

Tata cara dan upacara perkawinan adat Pepadun pada umumnya menurut garis keturunan patrilineal dari adanya “Jujur” yakni berupa pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita, dan adanya “Sesan” yakni berupa alat-alat rumah tangga komplit sebagai bawaan mempelai perempuan untuk menuju hidup baru bersama suaminya, “Sesan” tersebut akan diserahkan pihak keluarga mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung dan sekaligus sebagai penyerahan formal (secara adat) mempelai wanita dari keluarganya kepada pihak keluarga mempelai pria. Dengan demikian secara hukum adat maka putus pula **hubungan secara adat** (bukan secara kekeluargaan) antara mempelai wanita dari adat keluarganya.

Upacara perkawinan adat Pepadun bisa berupa upacara adat besar (gawei besar ibal serbou, bumbang aji, intar wawai, dan sebungbang) bisa pula berupa gawei kecil.

Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat Lampung yang disimpulkan dalam 5 prinsip, yaitu:

*Pi'il Pasenggiri*  
*Sakai Sambayan*  
*Nemui Nyimah*  
*Nengah Nyappur*  
*Bejuluk Beadek*

Ke lima prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**“Pi'il Pasenggiri”** berasal dari bahasa Arab fiil yang berarti perilaku, dan pasenggiri maksudnya keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta tahu kewajiban. Pada filsafat piil tampak nilai-nilai yang bersifat begitu luhur seperti tercantum dalam kitab hukum adat Kuntara Abung dan Kuntara Raja Niti. Kedua kitab itu banyak berisi aturan perilaku seseorang, cara berpakaian, aturan perkawinan, serta hukum perdata adat.

**“Sakai Sambayan”** mengandung makna dan pengertian yang luas, termasuk di antaranya tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan sesuatu kepada pihak lain yang memerlukan dalam hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi dalam arti moral termasuk sumbangan tenaga, fikiran dan lain sebagainya.

**“Nemui Nyimah”** berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam satu Klan maupun diluar Klan dan juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Jadi selain bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain juga sopan santun dalam bertutur kata terhadap tamu mereka.



**“Nengah Nyappur”** adalah tata cara pergaulan masyarakat Lampung dengan sikap membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum agar berpengetahuan luas dan ikut berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang sifatnya baik dalam pergaulan dan kegiatan masyarakat yang dapat membawa kemajuan dan selalu bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan jaman.

**“Bejuluk Beadek”** adalah didasarkan kepada “Titei Gemattei” yang diwarisi secara turun-temurun secara adat dari zaman nenek moyang dahulu, tata cara ketentuan pokok yang selalu dipakai diikuti (Titei Gemattei) diantaranya adalah ketentuan seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar sebagai panggilan terhadapnya dan bagi seseorang baik pria maupun wanita jika sudah menikah diberi adek (beadek) yang biasanya pemberian adek ini dilakukan atau dilaksanakan didalam rangkaian upacara atau waktu pelaksanaan perkawinan/pernikahan<sup>59</sup>.

Di samping terdapat masyarakat adat Lampung Pepadun dan sebagian lagi masyarakat adat Lampung Peminggir sebagai adat-istiadat penduduk asli, di kabupaten Lampung Timur juga terdapat masyarakat adat yang dibawa serta oleh para pendatang dari berbagai daerah asalnya, seperti msyarakat adat Jawa, Sunda, Bali dan lain sebagainya. Keberadaan masyarakat adat para pendatang ini semakin memperkaya khazanah adat-istiadat dan budaya yang ada di kabupaten Lampung Timur dan sesama masyarakat adat tersebut hidup berdampingan dengan harmoni, rukun dan damai<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. xxiv – xxvi

<sup>60</sup> Agus Suyono S.Sos, Sekretaris Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 14 Juni 2007, di Sukadana

### 3. Kondisi Geografis dan Demografis

#### (1) Kondisi Geografis

Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi :  $105^{\circ} 15' \text{ BT} - 106^{\circ} 20' \text{ BT}$  dan  $4^{\circ} 37' \text{ LS} - 5^{\circ} 37' \text{ LS}$ . Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih  $5.325,03 \text{ km}^2$  atau sekitar 15% dari total wilayah Propinsi Lampung (total wilayah Lampung sebesar  $35.376 \text{ km}^2$ ). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Secara administratif perbatasan Kabupaten Lampung Timur dengan wilayah atau Kabupaten lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Propinsi Banten dan DKI Jakarta;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Katibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Dari segi Topografi Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi menjadi 5 (lima) daerah yaitu :

*Pertama*; daerah berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Jabung Sukadana, Sekampung Udik dan Labuhan Maringgai.

*Kedua*; daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, dengan kemiringan antara 8 % hingga 15 % dan ketinggian antara 50 meter sampai 200 meter.

*Ketiga*; daerah daratan *alluvial*, mencakup kawasan yang cukup luas meliputi kawasan pantai pada bagian timur kabupaten Lampung Timur dan daerah-daerah pada sepanjang sungai juga merupakan sebagian hilir dari Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian kawasan tersebut berkisar antara 25 hingga 75 meter dpl dengan kemiringan 0 % hingga 3 %.

*Keempat*; daerah rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5 meter dpl. Dan *kelima*, daerah aliran sungai, yaitu Seputih, Sekampung dan Way Jepara. (BPS Lampung Timur, Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006, hlm. xxii – xxiii)

## **(2) Kondisi Demografis**

Mengenai kondisi demografis, berdasarkan data yang terdapat pada Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Balai Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur, penduduk Lampung Timur kini berjumlah 919.017 jiwa. Dari jumlah tersebut 463.362 jiwa (50,42 %) di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 455.655 jiwa (49,58 %) berjenis kelamin perempuan, tersebar di 24 kecamatan, 241 desa/5 kelurahan.

Penduduk Lampung Timur juga terdiri dari berbagai macam etnis serta suku bangsa, seperti Lampung, Jawa, Sunda, Palembang, Padang, Melayu, Batak, China, Arab dan lain sebagainya. Hanya saja data resmi dan kongkrit mengenai jumlah serta persentasenya tidak dapat kita temukan dalam dokumen resmi kependudukan atau pemerintahan. Hal yang demikian dapat dimaklumi, karena menonjolkan identitas etnik, suku bangsa dan ras berpotensi menimbulkan sentimen negatif yang

tidak menguntungkan untuk membina persatuan dan kesatuan masyarakat.

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata per-desa di Kabupaten Lampung Timur adalah 3.782/desa dengan tingkat kepadatan per-desa paling tinggi berada di kecamatan Bandar Sribhawono (6.965/desa), disusul kemudian kecamatan Sekampung Udik (4.705/desa) dan posisi ketiga adalah kecamatan Gunung Pelindung (4.265/desa)<sup>61</sup>.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai jumlah penduduk di Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

---

<sup>61</sup> BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 49

Tabel

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN**

Kecamatan	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Seks Ratio (5)
1. Metro Kibang	9.518	9.255	18.722	102,84
2. Batanghari	25.413	25.329	50.741	100,33
3. Sekampung	28.651	28.504	57.155	100,51
4. Marga Tiga	22.136	21.571	43.707	102,62
5. Sekampung Udik	33.257	32.609	65.866	101,99
6. Jabung	22.598	22.296	44.894	101,36
7. Pasir Sakti	17.235	16.860	34.095	102,22
8. Waway Karya	17.748	17.893	35.641	99,19
9. Marga Sekampung	13.461	13.280	26.741	101,36
10. Lab. Maringgai	31.900	31.495	63.395	101,28
11. Mataram Baru	13.233	12.987	26.221	101,90
12. Bandar Sribhawono	21.406	20.384	41.790	105,02
13. Melinting	12.835	12.384	25.219	103,64
14. Gunung Pelindung	10.800	10.526	21.326	102,60
15. Way Jepara	24.533	24.057	48.610	102,06
16. Braja Selebah	10.611	10.417	21.029	101,86

17. Labuhanratu	20.009	19.306	39.314	103,64
18. Sukadana	31.536	30.806	62.342	102,37
19. Bumi Agung	8.351	8.286	16.637	100,77
20. Batanghari Nuban	20.349	19.895	40.244	102,28
21. Pekalongan	20.966	21.112	42.079	99,31
22. Raman Utara	17.439	17.115	34.554	101,89
23. Purbolinggo	18.824	18.986	37.810	99,15
24. Way Bungur	10.534	10.301	20.835	102,27
Jumlah	463.362	455.655	919.017	101,69

BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 49

#### **4. Kondisi Sosial Politik**

##### **(a) Administrasi Pemerintahan.**

Secara administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan Pusat Pemerintahan di Kota Sukadana. Pada tahap ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Margatiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan Definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu serta 232 desa.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No 01 tahun 2001 dan keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka kecamatan di Kabupaten Lampung timur sekarang berjumlah 23 kecamatan definitif dan 232 desa. Pada tahun 2002, dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. 19 tahun 2001 dan No. 06 tahun 2002 maka jumlah desa di kabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan 3 desa persiapan. Data terakhir, pada tahun 2006 jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 24 kecamatan. Sedangkan jumlah desa sebanyak 241 desa dan 5 kelurahan.

Data administratif pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infra struktur administrative-pemerintahan berkembang cukup pesat, di mana dalam kurun waktu 7 tahun telah mengalami penambahan jumlah kecamatan yang pada awal berdiri Pemerintah Kabupaten tahun 1999 hanya ada 10 kecamatan definitif, pada tahun 2006 telah bertambah 14

kecamatan definitive, sehingga sekarang Lampung Timur telah memiliki 24 kecamatan, 18 desa dan 5 kelurahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kecamatan, kelurahan dan desa yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur saat ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :



Tabel

## BANYAKNYA DESA/KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT KECAMATAN

Kecamatan/District (1)	Ibu Kota/Capital (2)	Banyaknya / number of		
		Desa Village (3)	Kelurahan Village (4)	Jumlah Total (5)
Metro Kibang	Margototo	7	0	7
Batanghari	Banar Joyo	17	0	17
Sekampung	Sumber Gede	14	0	14
Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	0	13
Sekampung Udik	Pungung Raharjo	14	0	14
Jabung	Negara Batin	12	0	12
Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	0	8
Waway Karya	Sumberrejo	11	0	11
Marga Sekampung	Peniangan	8	0	8
Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	0	11
Mataram Baru	Mataram Baru	7	0	7
Bandar Sribhawono	Sribhawono	6	0	6
Melinting	Wana	6	0	6
Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	0	5
Way Jepara	Braja sakti	14	0	14
Braja Selebah	Braja Harjosari	6	0	6
Labuhanratu	Labuhan Ratu	11	0	11
Sukadana	Sukadana	11	5	16
Bumi Agung	Donomulyo	6	0	6

Batanghari Nuban Pekalongan Raman Utara Purbolinggo Way Bungur	Sukaraja Nuban Pekalongan Kota Raman Taman Fajar Tambah Subur	13 10 11 12 8	0 0 0 0 0	13 10 11 12 8
Jumlah / Total	2005 2004 2003 2002 2001	241 236 233 238 234	5 5 5 0 0	246 241 238 238 234

(BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 17)

### Tabel

#### DAFTAR PEJABAT MUSPIDA PLUS & SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEJABAT	KETERANGAN
	I. MUSPIDA PLUS		
1	Bupati	Hi. Satono,S.H.,S.P.	
2	Wakil Bupati	Noverisman Subing,S.H.,M.M.	
3	Ketua DPRD	Ketut Erawan, S.H.	
4	Kapolres	AKBP Drs.Abdulrochman Baso	
5	Komandan Kodim 0411	Letkol Rahman Riyanto	

<b>6</b>	Kepala Kejaksaan Negeri	Jaja Subagja, S.H.	
<b>7</b>	Ketua Pengadilan Negeri	Kaswanto, S.H.	
<b>8</b>	Sekretaris Daerah	I Wayan Sutarja, S.H., M.M.	
	II. SEKRETARIAT DAERAH		
<b>9</b>	Asisten I/Bid. Pemerintahan	Drs.Hi.Kasmir Jumli	
<b>10</b>	Asisten II/Bid.Ekubang	Ir.Hi. Djohansyah,M.M.	
<b>11</b>	Asisten III/Bid.Administrasi	Bandarsyah, S.H.	
<b>12</b>	Asisten IV/Bid. Umum	Hi.Makruf ZA, S.Sos	
<b>13</b>	Sekretaris DPRD	Dr.Zukhri Effendi,SH,MM	

(Sumber : BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 237)

### **(b) Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat**

Untuk mengetahui kondisi Sosial politik, antara lain dapat dilihat dari kehidupan demokratisasi, keberadaan organisasi Partai Politik, partisipasi politik masyarakatnya serta keberadaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.

Dalam bidang kehidupan demokrasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang laksana jamur di musim hujan, dengan berbagai macam *platform*, visi dan masinya. Dewasa ini di Lampung Timur terdapat 48 LSM dan 39 Ormas. Ormas-ormas dan LSM-LSM tersebut juga tidak mengalami kendala yang berarti untuk melakukan berbagai macam aktivitas serta menyampaikan aspirasi dan pemikirannya. (Erawan, S.E., Kasi Kesbang Kantor Kesbang & Linmas Pemkab. Lampung Timur, *Wawancara*, tanggl .. 15 juni 2007, di Sukadana)

Untuk mengetahui peta kekuatan masing-masing organisasi politik, dapat dilihat pada susunan serta jumlah keanggotaan DPRD sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

## Tabel

### SUSUNAN KEANGGOTAAN DPRD

#### KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERIODE 2005 – 2009

URAIAN	JUMLAH	KETARANGAN
A. SUSUNAN :		
1. Ketua	1	
2. Wakil Ketua	3	
3. Komisi-Komisi		
A	11	Bidang Pemerintahan
B	11	Bidang Perekonomian dan Keuangan
C	9	Bidang Kesejahteraan Masyarakat
D	11	Bidang Pembangunan
B. FRAKSI-FRAKSI :		
1. PDIP	12	
2. Partai GOLKAR	7	
3. PKB	7	
4. PKS	5	
5. Aliansi Kebangsaan	14	

(Sumber: BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 20)

Data di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur terdapat 4 (empat) organisasi partai politik besar dengan tolak ukur bahwa partai tersebut memiliki konstituen yang cukup besar dan mampu membentuk fraksi tersendiri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Keempat partai tersebut adalah Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai-partai lain yang memiliki wakil di legislative dan kemudian berkoalisi dalam sebuah fraksi Aliansi Kebangsaan adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai

Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor dan PPDK.

Kehidupan demokratisasi juga dapat dilihat dari tingginya tingkat akomodasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum pada tahun 2004 yang lalu. Data pada Kantor Kesbang & Linmas Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa dari total jumlah penduduk yang mencapai 914.443 jiwa, 611.110 di antaranya terdaftar sebagai pemilih. (Erawan, S.E., Kasi Kesbang Kantor Kesbang & Linmas Pemkab Lampung Timur, *Wawancara*, tanggal 20 Nopember 2006, di Sukadana)

### **(c) Kondisi Sosial Ekonomi**

Untuk dapat mengetahui kondisi Sosial ekonomi suatu masyarakat, di antaranya dapat dilihat dari aspek jenis mata pencaharian utama masyarakatnya. Dalam konteks ini, penduduk Lampung Timur yang berjumlah 919.017 jiwa, mayoritasnya (64,95%) masih mengandalkan sector pertanian sebagai mata pencaharian atau lapangan usaha utamanya, disusul kemudian sector perdagangan (15,83%) pada urutan kedua, sector jasa (6,81%) pada urutan ketiga dan sektor industri (5,26%) pada urutan keempat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang demikian adalah logis, sebab di samping kualitas sumber daya manusia masyarakat Lampung Timur pada umumnya masih rendah, kondisi alamnya bergunung, berbukit, subur dan masih tersedia lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam.

Persentase lapangan usaha utama masyarakat Lampung Timur secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut :

## Tabel

### PERSENTASE PENDUDUK LAMPUNG TIMUR USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA

Lapangan Usaha Utama	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	69,90	69,90	73,66	64,95
2. Pertambangan & Penggalian	0,42	0,42	0,22	0,46
3. Industri	6,82	6,82	5,58	5,26
4. Listrik, Gas, Air	0,06	0,06	0,04	0,04
5. Konstruksi	2,51	2,51	2,25	4,35
6. Perdagangan	11,97	11,97	10,40	15,83
7. Transportasi & Komunikasi	2,57	2,57	2,81	2,02
8. Keuangan	0,48	0,48	0,15	0,18
9. Jasa	5,27	5,27	4,88	6,81
10. Lainnya	-	-	-	0,09
Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %

(BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, Hlm. 52)

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Timur dapat dikategorikan sebagai masyarakat agraris, karena masih bergantung pada kondisi dan ketersediaan sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi hajat hidupnya. Sedangkan mata pencaharian yang lebih mengandalkan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) seperti perdagangan, jasa, industri dan lain-lain secara kuantitatif masih relatif sedikit.

Adapun masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) secara keseluruhan berjumlah 16.624 orang (1,80%). Data lebih lengkap tentang jumlah PNS berikut sebarannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMDA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR MENURUT GOLONGAN Per- APRIL 2006**

No.	URAIAN (2)	GOLONGAN				JUMLAH (7)
		I (3)	II (4)	III (5)	IV (6)	
(1)						
1	Sekretariat Daerah	0	61	94	25	180
2	Sekretariat DPRD	0	6	13	5	24
3	Badan Pengawas Daerah	0	5	25	9	39
4	Bappeda	0	2	27	7	36
5	Bapedalda	0	2	15	7	24
6	Badan Promosi & Investasi Daerah	0	2	12	6	20
7	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	0	29	118	8	155
8	Dinas Peternakan	0	11	30	5	46
9	Dinas Perikanan dan Kelautan	1	3	25	6	35
10	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	1	59	75	5	140
11	Dinas Pertambangan dan Energi	0	5	19	6	30
12	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koprs	0	3	20	4	27
13	Dinas Kesehatan	2	193	239	5	439
14	Dinas Pendidikan Dasar	47	554	4.126	821	5.548



15	Sekretariat KPU Dinas Pend. Menngah, Kjruan & Tinggi Rumah Sakit Daerah Sukadana	1	1	6	0	8
16		1	143	863	163	1.170
17		0	41	19	3	63
18		0	4	12	4	20
19		0	3	18	5	26
20		0	12	21	4	37
21		1	39	33	4	77
22		5	94	34	6	139
23		0	15	24	7	46
24		0	6	19	2	27
25		0	4	10	2	16
26		0	14	15	1	30
	Jumlah	59	1.311	5.912	1.120	8.402

#### 4. Kehidupan Umat Beragama

##### a. Jumlah umat beragama.

Dalam hal kehidupan umat beragama, masyarakat Lampung Timur termasuk masyarakat yang heterogen, sebab dari total penduduk Lampung Timur yang berjumlah 919.017 jiwa secara keseluruhan tercatat sebagai penganut salah satu dari 5 (lima) agama yang ada yaitu : Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Budha, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel**

#### **BANYAKNYA UMAT BERAGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

<b>Kecamatan</b>	<b>Islam</b>	<b>Katolik</b>	<b>Protestan</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>	<b>Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Metro Kibang	18575	32	165	0	0	0	18 772
2. Batanghari	49194	1054	347	40	106	1	50 741
3. Sekampung	55927	720	294	72	136	7	57 155
4. Marga Tiga	41794	168	567	1161	8	9	43 707
5. Sekampung Udik	57787	573	2837	4 425	230	14	65 866
6. Jabung	69493	321	559	1 165	58	39	71 635
7. Waway Karya	33457	292	382	1 376	126	7	35 641
8. Pasir Sakti	31959	239	877	914	83	23	34 095

9. Labuhan Maringgai	61302	310	564	1 029	156	35	63 395
10. Gunung Pelindung							
11. Melinting	20733	132	286	86	89	0	21 326
12. Mataram Baru	24939	71	179	10	17	3	25 219
13. BandarSribhawono	25053	180	453	53	481	1	26 221
14. Way Jepara	40374	292	776	67	278	2	41 790
15. Braja Selebah							
16. Labuhan Ratu	46924	567	637	423	39	19	48 610
17. Sukadana	19621	375	107	925	0	1	21 029
18. Bumi Agung	38070	203	620	382	35	4	39 314
19. Batanghari Nuban	61245	244	327	514	9	2	62 342
20. Pekalongan	16134	136	184	181	0	1	16 637
21. Raman Utara	38753	635	559	61	236	1	40 244
22. Purbolinggo	40386	1040	385	13	255	0	42 079
23. Way Bungur	31139	248	69	3 051	47	1	34 554
	37231	322	227	3	13	14	37 810
	20593	140	89	7	4	2	20 835
Jumlah	880.686	8.294	11.489	15.958	2.404	186	919.017
(BPS Lampung Timur, Lampung Timur,			Dalam Angka Tahun 2006,			hlm.	89)

Sebagaimana komposisi penduduk di kabupaten-kecamatan lain di provinsi Lampung pada umumnya, mayoritas masyarakat Lampung Timur menganut agama Islam. Sumber BPS Lampung Timur menunjukkan urutan agama-agama dari segi jumlah penganutnya adalah sebagai berikut :

- a. Umat Islam mencapai 880.686 (95,81 %);
- b. Umat Hindu 15.958 (1,72 %) ;;
- c. Umat Kristen/Protestan 11.489 (1,24 %);
- d. Umat Katolik 8.924 (0,96 %);
- e. Umat Budha 2.404 (0,25 %); dan
- f. Lainnya 186 (0,02 %).

#### **b. Aktivitas keagamaan**

Aktivitas keagamaan umat beragama di Kabupaten Lampung Timur secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu :

- a. aktivitas ritual/peribadatan;

Aktivitas ritual-peribadatan yang sifatnya personal seperti salat/sembahyang, puasa, pembacaan kitab-kitab suci dan lain sebagainya biasanya dilaksanakan di rumah kediaman masing-masing umat. Sedang aktivitas ritual-peribadatan yang sifatnya kolektif atau berjamaah seperti salat Jumat, salat berjamaah, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, misa kebaktian dan lain sebagainya biasanya dilaksanakan di rumah-rumah ibadah seperti masjid, musalla, gereja, pura dan vihara. Mereka dapat melaksanakan ajaran agama baik yang sifatnya personal maupun kolektif sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, tanpa ada pihak atau kelompok lain yang menghalang-halangi ataupun mengganggu.

Dengan demikian, maka keberadaan sarana peribadatan seperti masjid, gereja, pura, dan vihara dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberagaman suatu masyarakat. Berkenaan dengan keberadaan sarana peribadatan di Lampung Timur, dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel**

**JUMLAH SARANA PERIBADATAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006**

Kecamatan	Masjid	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Metro Kibang	21	2	-	-	-
Batanghari	57	-	6	-	1
Sekampung	40	2	1	-	-
Marga Tiga	79	3	4	-	-
Sekampung Udik	72	-	21	9	3
Jabung 1)	94	4	7	4	1
Pasir Sakti	56	-	-	-	-
Waway Karya	43	11	-	8	3
Marga Sekampung	-	-	-	-	-
Labuhan Maringgai	60	1	5	-	-
Mataram Baru	41	4	2	-	3
Bandar Sribhawono	32	2	5	-	3
Melinting	34	4	-	-	-
Gunung Pelindung	35	2	2	-	--
Way Jepara	66	3	3	-	-
Braja Selebah	25	5	-	5	-

Labuhanratu	90	3	4	4	1
Sukadana	77	2	-	1	-
Bumi Agung	25	1	1	1	-
Batanghari Nuban	31	1	3	-	4
Pekalongan	66	2	3	-	1
Raman Utara	50	2	-	13	1
Purbolinggo	42	1	2	-	-
Way Bungur	35	-	2	-	-
JUMLAH	1.171	55	71	45	21

(BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 90)

b. aktivitas seremonial/upacara keagamaan; dan

Adapun yang dimaksud dengan aktivitas seremonial keagamaan adalah upacara-upacara yang bernuansa keagamaan tetapi tidak termasuk kategori ibadah, seperti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan dan lain sebagainya), resepsi perkawinan, khitanan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pada saat hari raya keagamaan umat beragama biasanya saling mengunjungi di antara sanak famili, sahabat-karib dan handa-taulan untuk saling mengungkapkan kegembiraan serta saling maaf memaafkan. Bahkan untuk aktivitas seremonial keagamaan seperti ini terkadang yang ikut merayakan tidak terbatas hanya satu umat agama saja, melainkan juga dapat diikuti oleh umat lintas agama.

c. Aktivitas Sosial Keagamaan

Aktivitas sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh umat beragama Kabupaten Lampung Timur antara lain meliputi pendidikan keagamaan, dakwah keagamaan, pemberian santunan kepada masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin, bakti Sosial dan lain sebagainya.

- 1) Pendidikan keagamaan, baik yang dikelola oleh pemerintah atau para tokoh agama atau lembaga-lembaga keagamaan, biasanya memiliki spesifikasi tertentu. Pendidikan keagamaan tersebut di samping bertujuan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya, namun focus serta titik tekannya adalah untuk memperdalam ilmu keagamaan serta untuk membina moralitas anak didiknya. Sebagai contoh, untuk umat Islam dikenal lembaga pendidikan *Raudlatul Atfal* (RA) atau Taman Kanak-Kanak, Madrasah dengan beberapa jenjang/tingkatan yang ada (tingkat Ibtidaiyah/SD, Tsanawiyah/SLTP dan Aliyah/SLTA), Pondok

Pesantren dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut ada yang dikelola oleh pemerintah (negeri) dan ada pula yang dikelola oleh masyarakat (swasta).

Untuk mengetahui keberadaan lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan umat Islam Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel

**BANYAKNYA SEKOLAH, KELAS, GURU DAN MURID DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA  
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006**

Jenis Sekolah/School Type	Sekola/ Schools	Kelas/ Classes	Guru/ Teachers	Murid/Pupils
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. RA Swasta/ Private Islamic Pre-Elementary School	47	94	132	1365
2. MI Negeri/ State Islamic Elementary School	4	24	45	867
3. MI Swasta/ Private Islamic Elementary School	93	558	651	10084
4. MTs Negeri/ State Islamic Junior High School	2	36	79	1117
5. MTs Swasta/ Private Islamic Junior High School	69	315	1282	12561
6. MA Negeri/ State Islamic Senior High School	1	16	49	673
7. MA Swasta/ Private Islamic Senior High School	23	87	442	2776
8. Madrasah Diniah/ Private Islamic Elementary School	35	111	294	3690
9. Pondok Pesantren/ Islamic School	77	254	762	9575

(BPS Lampung Timur, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. 65)

Sedangkan aktivitas pendidikan keagamaan untuk umat selain Islam, hingga kini belum dilaksanakan melalui lembaga kependidikan formal yang dikelola secara khusus seperti halnya madrasah atau pondok pesantren dalam Islam, melainkan hanya dilaksanakan di rumah tempat tinggal biasa atau di rumah ibadah. Bagi sebagian umat Krsiten, Katolik, dan Hindu, pendidikan keagamaan juga dilaksanakan sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA manakala jumlah siswa, tenaga pengajar, sarana dan prasarannya memang memadai. Jika tidak, maka bagi kalangan umat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, dikenal istilah “Sekolah Minggu”, yakni pemberian pendidikan keagamaan kepada anak didik/generasi muda umat beragama masing-masing.

Pendidikan keagamaan pada umumnya di Kabupaten Lampung Timur, selain diselenggarakan pada lembaga kependidikan khusus seperti madrasah dan pondok pesantren, juga diselenggarakan pada lembaga pendidikan formal yang umum seperti SD, SMP dan SMA, yang sebagian tenaga pengajar/gurunya juga disiapkan oleh Pemerintah. Data kekuatan guru yang diangkat oleh Pemerintah di lingkungan Departemen Agama Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :

### **Tabel**

#### **KEKUATAN GURU DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN AGAMA**

**Kondisi Per 31 Agustus 2006**

No.	Satuan Kerja	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
	Kandepag Lamtim	209	1	1	2	4	217

(Sumber: Kanwil Depag, *Data Keagamaan Provinsi Lampung Tahun 2006*, hlm. 57)

## 2) Aktivitas Dakwah keagamaan.

Kegiatan dakwah keagamaan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menyiarkan dan memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang ajaran-ajaran agama tertentu di kalangan umatnya. Kegiatan dakwah keagamaan ini ada yang dilaksanakan oleh individu tokoh agama tertentu secara personal, dan ada pula yang dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Taklim, RISMA, PGI, PHDI, Paroki, Walubi/MBI dan sebagainya. Waktu pelaksanaannya biasanya bersamaan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, Israk Mikraj, Natalan, Galungan dan sebagainya. Akan tetapi terkadang ada juga kegiatan dakwah yang terjadwal secara periodik atau dikemas secara khusus dengan istilah Tabligh Akbar.

### **Tabel**

#### **JUMLAH LEMBAGA DAKWAH, MAJELIS TAKLIM, RISMA, MUBALIGH, DAN ULAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

No	Unit Kerja	Lembaga Dakwah	Majelis Taklim	Risma	Mubaligh	Khotib	Ulama
	Kandepag Kab. Lampung Timur	7	294	40	15	693	160

(Sumber: Kanwil Depag, *Data Keagamaan Provinsi Lampung Tahun 2006*, hlm. 19).

## Tabel

### JUMLAH PENYULUH AGAMA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004 (Kondisi per 31 Agustus 2006)

No	Agama	Kualifikasi			
		Muda	Madya	Utama	Jumlah
1	Islam	78	18	-	96
2	Kristen	6	-	-	6
3	Katolik	2	-	-	2
4	Hindu	4	1	-	5
5	Budha	3	2	1	6
	Jumlah	93	21	1	116

(Sumber: Kanwil Depag, *Data Keagamaan Provinsi Lampung Tahun 2006*, hlm. 20)

### 3) Pemberian bantuan Sosial.

Pemberian bantuan Sosial atau santunan yang bernuansa keagamaan dilakukan sebagai bentuk kepedulian umat beragama kepada pihak-pihak yang memerlukannya seperti kelompok fakir miskin atau yatim piatu dan lain sebagainya. Bentuknya dapat berupa :

- pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu;
- pemberian beasiswa / peralatan pendidikan;
- khitanan massal;
- mendirikan/membangun fasilitas peribadatan/pendidikan seperti masjid, musalla, gereja, pura, vihara, madrasah dan lain sebagainya.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk kegiatan amal tersebut, di antaranya ialah : zakat, infak, sedekah, korban, amal dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut biasanya diselenggarakan bersamaan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan seperti

hari raya Idul Fitri, Idul Kurban, Natalan/Tahun Baru, Waysak, Galungan/Kuningan dan lain sebagainya.

## **E. Kabupaten Lampung Barat**

### **1. Geografis dan Demografis**

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten dari sepuluh daerah kabupaten dan kota yang berada di Propinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan secara formal disahkan keberadaannya sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 16 Agustus 1991. Wilayah kabupaten ini terbentang seluas 4950,40 Km atau 13,99% dari luas wilayah Propinsi Lampung. Secara geografis memang dari sisi wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki bentangan wilayah yang sangat luas untuk ukuran sebuah kabupaten. Posisi Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan empat kabupaten lain dan dengan Selat Sunda, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, serta sebelah selatan berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat  $4^{\circ} 47' 16''$  -  $5^{\circ} 56' 42''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ} 35' 8''$  -  $104^{\circ} 33' 8''$  Bujur Timur. Secara topografi Kabupaten ini dibagi menjadi tiga unit topografi yakni : dataran rendah dengan ketinggian 0 – 600 meter di atas permukaan laut, daerah berbukit dengan ketinggian 600–1000 meter dari permukaan laut, dan daerah pegunungan dengan ketinggian 1000–2000 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Lampung Barat terdiri dari perbukitan dan pegunungan dan sebagian lainnya merupakan dataran rendah yang berada dipinggiran pantai. Maka menurut Oldeman Irsal L. Darwis (1979, Akibat pengaruh dari rantai Pegunungan Bukit Barisan, maka Lampung Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu

zone A yang terdapat dibagian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan jumlah bulan basah + 9 bulan, termasuk Krui dan Bintuhan Bengkulu, dan zone B yang terdapat dibagian Timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Berdasarkan data statistik tahun 2004, jumlah penduduk Lampung Barat adalah 383.736 orang yang mendiami 14 wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Pesisir Selatan, Bengkunt, Pesisir Tengah, Karya Penggawa, Pesisir Utara Lemong, Balik Bukit, Sukau, Belalau, Sekincau, Suoh, Batu Brak, Sumber Jaya dan Way Tenong. Dengan jumlah penduduk 383.736 orang, maka rata-rata kepadatan penduduk/ $\text{Km}^2$  di Lampung Barat adalah  $77,52/\text{Km}^2$ . Ini terutama disebabkan karena sebagian besar wilayah Lampung Barat adalah hutan lindung, terutama yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Sumber Jaya dalam jumlah 46.516 orang dengan luas areal  $356,45/\text{Km}^2$ . Diikuti oleh Kecamatan Bengkunt dengan luas areal terbesar ( $1.400,81 \text{ Km}^2$ ). Padatnya penduduk dikedua kecamatan ini disebabkan besarnya potensi pertanian maupun pelabuhan yang ada. Sedangkan kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pesisir Tengah yaitu  $282,21 \text{ jiwa}/\text{Km}^2$ .

**Tabel**  
**LUAS WILAYAH KECAMATAN BALIK BUKIT DIRINCI PER DESA**  
**(Dalam Ha)**

No.	Pekon/Kelurahan	Sawah	Bukan Sawah	Jumlah
	1.	2.	3.	4.
1.	Kubu Perahu	40	3,452	3,492
2.	Way Empulau Ulu	300	2,362	2,662
3.	Wates	65	1,407	1,472
4.	Padang Dalam	56	1,718	1,774
5.	Gunung sugih	29	854	883
6.	Sebarus	79	1,920	1,999

7.	Pasar Liwa	36	2,261	2,297
8.	Way Mengaku	75	2,045	2,120
9.	Padang Cahya	45	2,352	2,397
10.	Sukarame	30	1,897	1,927
11.	Bahway	150	4,623	4,773
	Jumlah	905	24,891	25,796

## 2. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk

Beberapa indikator perekonomian menunjukkan bahwa secara umum perekonomian masyarakat (penduduk) Lampung Barat masih tertinggal, sekalipun potensi yang ada masih memberi harapan untuk mengalami perkembangan. Perputaran keuangan hanya berpusat pada beberapa wilayah seperti Pasar Krui, Pajar Bulan, Pasar Liwa dan Sekincau. Pada beberapa wilayah tersebut sudah terdapat sarana yang bisa mendukung berjalannya arus perekonomian seperti Pasar Permanen, Bank dan Koperasi sebagai pusat transaksi perputaran keuangan antara pedagang dan pembeli serta Bank dan Koperasi sebagai institusi tempat menyimpan dan meminjamkan modal kepada para pelaku ekonomi.

Tabel . Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)
Pesisir Selatan	3.963	19.973	5.04
Bengkunat	9.438	43.173	4.57
Pesisir Tengah	5.782	31.046	5.37
Karya Penggawa	2.354	13.885	5.90
Pesisir Utara	1.083	9.805	5.44
Lemong	3.072	13.859	4.51
Balik Bukit	7.376	31.032	4.21
Sukau	5.452	24.321	4.46
Belatau	6.141	24.946	4.06
Suoh	9.424	33.928	3.60
Sekincau	9.222	39.549	4.29
Batu Brak	2.578	12.811	4.97
Sumber Jaya	11.761	46.516	3.96
Way Tenong	9.066	38.892	4.29
<b>Jumlah</b>	<b>87.432</b>	<b>383.736</b>	<b>4.39</b>

Sumber : BPS, 2007



Tabel 4. Jumlah Pasar dan Pertokoan Per Kecamatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2007

Kecamatan (1)	Pasar (2)	Pertokoan Permanen (3)	Pertokoan Semi Permanen (4)
Pesisir Selatan	1	0	0
Bengkunat	1	0	0
Pesisir Tengah	1	49	6
Karya Penggawa	0	0	0
Pesisir Utara	0	0	0
Lemong	0	0	0
Balik Bukit	1	28	108
Sukau	2	24	80
Belalau	1	20	145
Suoh	3	58	108
Sekincau	1	10	0
Batu Brak	0	0	0
Sumber Jaya	2	44	215
Way Tenong	1	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>237</b>	<b>662</b>

Sumber : Dinas pasar Kabupaten Lampung Barat, 2007

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran utama terhadap perkembangan ekonomi penduduk di Kabupaten ini 91.6% pendudukan usia 10 tahun keatas mengadakan pertanian sebagai sumber penghasilan. Berbagai jenis sayuran dihasilkan oleh para petani seperti cabe, kol, labu siam, terong dan aneka sayuran lainnya.

Selain sayur mayur Lampung Barat juga dikenal dengan hasil perkebunannya, terutama kopi. Namun harga kopi yang sangat fluktuatif, bahkan cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian masyarakat kabupaten ini, karena hampir 50% penduduk asli maupun pendatang adalah petani kopi. Hal ini ditunjukkan pula oleh turunnya prosentase sub sektor perkebunan pada RDRBL (Produk Domestik Regional Bruto), dimana tahun 2001 kebawah(persentase sub sektor ini diatas 35% bahkan pada tahun 1998 mencapai 50% dan terus mengalami penurunan hingga kini menjadi 27.87% (tahun 2004).

Disamping dari hasil kopi, sebagian penduduk Lampung Barat (terutama yang tinggal di daerah Krui dan sekitarnya) mengandalkan hasil hutan damar sebagai tumpuan perekonomiannya, dibandingkan dengan kopi, damar memiliki kesetabilan harga yang menggembirakan, dan harganya pun relatif baik, karena komoditas ini menjadi andalan ekspor. Disamping damar, perekonomian penduduk yang mendiami daerah Pesisir Pantai di topan oleh hasil kelapa yang kualitasnya sangat baik sehingga digemari oleh konsumen luar daerah. Akan tetapi karena tanaman yang mayoritas sudah cukup tua, maka produksinya sudah tidak lagi maksimal.

Sedangkan sektor industri agaknya belum banyak ditekuni sehingga juga belum memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian penduduk. Dari data yang ada tergambar bahwa industri yang ada masih terbatas pada industri kecil berkala rumah tangga, yang berjumlah 106 buah unit usaha, dan belum

ada satupun industri besar yang ke daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Tabel. Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerjanya Kabupaten Lampung Barat :

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)
<b>Industri Makanan :</b>	<b>116</b>	<b>377</b>
- Kerupuk	25	125
- Tahu/Tempe	37	111
- Roti	20	4
- Gula Aren	19	16
- Kopi Bubuk	2	4
- Keripik	8	64
- Kue Kering	2	5
- Es Balon	1	8
<b>Industri Pengolahan tanah Liat dan Industri dari Semen dan Kapur :</b>	<b>23</b>	<b>80</b>
- Bata/Genteng	8	40
- Tegel	6	24
- Genteng Beton	4	16
- Bahan Bangunan dan Semen	5	6
<b>Industri Perabotan/Perlengkapan RT :</b>	<b>51</b>	<b>197</b>
- Mebel	24	95
- Kusen Pintu	23	92
- Anyaman Bambu	2	6
- Sapu Ijuk	1	2
- Bakul Rotan	1	2
<b>Industri Sandang dan Bahan dari Kulit :</b>	<b>8</b>	<b>30</b>
- Penjahit pakaian	2	5
- tenun tapis	6	25
<b>Industri Pengolahan Lainnya :</b>	<b>47</b>	<b>101</b>
- Percetakan	17	36
- Las	30	65
<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>328</b>

Sumber : Deperindag Kabupaten Lampung Barat, 2007

Disamping beberapa sub sektor di atas, sektor kelautan juga merupakan seluas satu sub sektor yang menjadi tumpuan hidup sebagian penduduk Lampung Barat, terutama yang mendiami wilayah yang berada di pantai. Akan tetapi penghasilan nelayan ditempat ini sangat fluktuatif karena jumlah tangkapan ikan sangat ditentukan oleh laut yang ditempat ini terkenal keganasannya. Dan teknologi penangkapan ikan yang dipakai masih sangat sederhana bahkan cenderung tradisional, sehingga juga sulit bagi penduduk yang menekuni profesi sebagai nelayan untuk dapat menjadikan propinsi ini sebagai tumpuan perekonomian.

### **3. Kehidupan Sosial Politik Masyarakat Kabupaten Lampung Barat**

#### **a. Kondisi Sosial Politik**

Beberapa faktor yang ada menjadikan kehidupan sosial politik di daerah ini kurang memiliki gairah dan greget dibanding di daerah lain. Perhatian masyarakat nampaknya masih berkonsetrasi pada ekonomi yang menopang hidup, disamping juga harapan mereka terhadap perubahan nasib disebabkan oleh perubahan politik tidak terlalu besar. Sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat di daerah ini cenderung rendah. Data yang ada menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden di tahun 2004 hanya berkisar 65%.

Pilihan masyarakat terhadap Anggota Legislatif maupun Presiden sangat ditentukan oleh faktor kedekatan emosional. Kampanye Partai Demokrat Indonesia yang memakai strategi pendekatan emosional berhasil meraih 40% suara pemilih di daerah ini. Yang juga berlanjut pada Pemilu Presiden pada putaran pertama dan kedua. Untuk meraih simpati masyarakat di daerah ini PDI mengandalkan isu hubungan kekerabatan keluarga Taufik Kiemas dan Megawati Soekarno Putri dengan masyarakat di

daerah ini, terutama di Pulau Pisang dan pasar Krui. Strategi ini cukup efektif dan berhasil meraih 40% suara pemilih dan 60% lainnya masing-masing diraih Golkar sebanyak 35% dan PAN 7%, PKB 6% dan 6% lainnya terdistribusi pada partai-partai kecil lainnya. Sedangkan pada Pemilu putaran pertama dan kedua suara tertinggi selalu tertinggi oleh Megawati Soekarno Putri. Dari 10 kabupaten yang ada di Propinsi Lampung kemenangan Megawati hanya terjadi di daerah ini.

Dari angka-angka di atas terlihat bahwa polarisasi pilihan politik masyarakat di daerah ini cenderung tidak terlalu tajam. Karena itu juga tidak terjadi konflik-konflik yang berarti disebabkan karena keragaman pilihan politik.

#### b. Kondisi Sosial Budaya

Bahasa daerah tidak dipergunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Bahasa Lampung sebagai bahasa daerah dipelajari di sekolah-sekolah pada tingkat dasar, namun dalam keseharian, Bahasa Lampung dipergunakan hanya dalam komunitas suku Lampung sendiri. Bahasa yang mendominasi adalah bahasa Indonesia, walaupun demikian bahasa daerah Jawa dan Sunda Banten tidak asing terdengar dalam percakapan sehari-hari.

Tradisi masyarakat yang berkembang lebih banyak dalam nuansa keagamaan, dalam bentuk perayaan hari-hari besar keagamaan, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Ada perkembangan baru, sejak beberapa tahun terakhir ini tradisi Barong-sai dari masyarakat keturunan Cina sudah mulai hidup kembali dimana ketika hari raya Cina, masyarakat keturunan Cina mempertunjukkan tradisi Barong-sai dan mengadakan perjalanan berkeliling Kota Bandar Lampung.

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur dan hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu

dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung.

Secara umum struktur hukum adat tersebut dapat dibedakan dalam dua kelompok besar.

- a) Masyarakat adat Peminggir, yang berkedianan di sepanjang pantai pesisir termasuk adat Krui, Ranau, Komering sampai Kayu Agung.
- b) Masyarakat adat Pepadun yang berdiam di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari masyarakat adat Abung (Abung Siwo Mego), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala/Tulang Bawang (Mego Pak) dan Buay Lima.

Upacara-upacara adat pada umumnya ditandai dengan adanya perkawinan/pernikahan yang dilakukan menurut tata cara adat tradisional disamping hukum Islam yang menurut keyakinan merupakan bagian dari Tata cara adat itu sendiri.

Tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan Jujur dengan menurut garis keturunan Patrilenial, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada mempelai perempuan untuk menyiapkan sesan berupa alat-alat keperluan rumah tangga. Sesan tersebut diserahkan kepada pihak laki-laki pada waktu upacara perkawinan berlangsung sekaligus sebagai penyerahan formal (secara adat) si mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki. Dengan demikian secara hukum adat maka putuslah hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orang tuanya. Upacara perkawinan tersebut dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dengan cara adat Ibal, serbo, Bumbang Aji, Intar Padang, Antar Manok, dan sebambangan.

Dalam banyak hal suatu ciri yang disebut dengan Geneologis sangat dominan pada masyarakat Lampung, dimana suatu ikatan masyarakat hukum adat dengan anggota-anggota

didasarkan atas suatu pertalian keturunan, baik karena ikatan maupun hubungan darah.

Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian penduduk masyarakat Lampung disimpulkan dalam 5 (lima) Prinsip, yaitu :

**1) Pi'il Pesenggikhi,**

Pi'il Pesenggikhi, diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu, seseorang dapat mempertahankan apa saja (termasuk nyawanya) demi untuk mempertahankan pi'il pesenggikhi tersebut. Selain dari itu dengan pi'il pesenggikhi seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak, kendatipun hal itu akan merigukan dirinya sendiri secara materi.

**2) Sakai Sambayan**

Sakai Sambayan, meliputi berbagai pengertian yang luas didalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan fikiran dan sebagainya.

**3) Nemui Nyimah**

Neui Nyimah, berarti bermurah hati dan beramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja pihak yang berhubungan dengan mereka. Jadi bermurah hati dalam bertutur kata serta sopan santun dan ramah tamah terhadap tamu mereka.

#### **4) Nengah Nyapur**

Nengah Nyapur, adalah sebagai tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesedian membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan masyarakat dengan perkembangan zaman.

#### **5) Bejuluk Beadek**

Bejuluk Beadek, adalah didasarkan pada Titie Gemetti yang diwariskan turun temurun dari zaman dahulu. Tata ketentuan pokok yang selalu diikuti (Titi Gemetti) tersebut antara lain menghendaki agar seseorang disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan terhadapnya. Bagi orang yang belum berkeluarga diberi Juluk (bejuluk) dan setelah ia menikah maka ia akan diberi adek (beadek) melalui acara-acara perkawinan adat Lampung.

### **F. Kabupaten Way Kanan**

#### **1. Sejarah Singkat**

Pada tahun 1957 kabupaten Way Kanan masih merupakan wilayah kewedanaan Way Kanan. Saat itu dipimpin oleh Wedana Ratu Pengadilan. Cikal bakal Kabupaten Way Kanan diawali dengan adanya pertemuan yang membahas rencana Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lahan seluas 100.000 Ha untuk keperluan transmigrasi. Di antara empat kewedanaan yang ada yakni Kewedanaan Kotabumi, Kewedanaan Krui, Kewedanaan Menggala dan Kewedanaan Way Kanan, hanya Kewedanaan Way Kanan yang merespon rencana pemerintah pusat tersebut. Sikap ini diambil dengan pertimbangan agar kelak kewedanaan Way Kanan dapat cepat ramai penduduknya. Pada saat itu pulalah H. Ridwan Basyah –saat itu sebagai notulis- memunculkan ide awal



untuk menjadikan kewedanaan Way Kanan menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri, terpisah dari kabupaten Lampung Utara.<sup>62</sup>

Pada tahun 1971, keinginan menjadikan kewedanaan Way Kanan menjadi Kabupaten Way Kanan muncul kembali dalam pertemuan yang diprakarsai oleh H. Ridwan Basyah pula. Selanjutnya pada tahun 1975, Nasrun Syah Gelar Sultan Mangkubumi di Bumi Agung Kecamatan Bahuga mengundang seluruh tokoh adat sewilayah Way Kanan dalam acara Adat Bugawi. Pada saat itulah diadakan musyawarah khusus yang dipimpin oleh H. Ridwan Basyah yang membahas kembali gagasan untuk menjadikan kewedanaan Way Kanan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, sekaligus mengajukan gagasan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah dari Tingkat I Propinsi Lampung.

Pada tahun 1986 gagasan pendirian kabupaten Way Kanan mendapatkan respon positif dari Pemerintah Pusat ditandai dengan dibentuknya Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dengan SK MENDAGRI No. 821.26/502 Tanggal 8 Juni 1985 dengan wilayah Pembantu Bupati meliputi 6 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Blambangan Umpu, Bahuga, Pakuan Ratu, Baradatu, Banjit, dan kecamatan Kasui. Saat itu yang menjabat sebagai Pembantu Bupati adalah Bapak H. Ridwan Basyah.

Pada tanggal 18 Februari 1991 BAPEDA Tk. I Lampung melayangkan surat kepada Pembantu Bupati untuk menyelenggarakan Musyawrah Besar di SESAT PURANTI GAWI Blambangan Umpu untuk mempersiapkan lahan perkantoran, nama kabupaten dan letak Ibu Kota kabupaten sebagai persiapan Way menjadi kabupaten. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1991 yang dihadiri sekitar 200 Orang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, ilmuwan dan pejabat setempat.

Dalam acara tersebut disepakati usulan dan pernyataan dukungan sepenuhnya agar Way Kanan menjadi Kabupaten dengan Ibu Kota Blambangan Umpu yang terdiri dari 17 kecamatan.

Berkat dengan perjuangan yang gigih dan dukungan dari semua pihak serta Ridho Allah SWT, maka pada tahun 1999 terbitlah UU No. 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan bersamaan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, maka pada 27 April 1999 Menteri Dalam Negeri ketika itu dijabat oleh Syarwan Hamid menandatangani prasasti peresmian Way Kanan menjadi Kabupaten sekaligus melantik Drs. Tamannuri sebagai Bupati Way Kanan. Selanjutnya tanggal 27 April 1999 inilah ditetapkan sebagai *Hari Jadi Kabupaten Way Kanan*.

## **2. Kondisi Geografis dan Demografis**

Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi  $4,12^{\circ}$  -  $4,58^{\circ}$  LS arah Utara Selatan dan  $104,17^{\circ}$  -  $105,04^{\circ}$  BT arah Timur Barat. Sebelah Utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Way Kanan mempunyai luas wilayah 3.921,63 Km<sup>2</sup>. Secara geografis termasuk daerah perbukitan yang diapit oleh tiga gunung, yaitu gunung punggur, gunung remas dan gunung bukit duduk. Kabupaten Way Kanan dilintasi oleh beberapa sungai besar di antaranya sungai Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham dan Way Tahmi.<sup>63</sup>

Pada saat ini wilayah Kabupaten Way Kanan secara administratif terbagi kepada 14 kecamatan yaitu: Kecamatan

Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Way Tuba, Negeri Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar, Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, dan 192 kampung.

Sedangkan secara demografis jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Way Kanan dalam Angka Tahun 2005 sebesar 393.771 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, terdiri dari 204.249 laki-laki atau 51,87 persen dan 189.522 perempuan atau 48,13 persen.

Kepadatan penduduk rata-rata 95 jiwa per Km<sup>2</sup>, dengan persebaran tidak merata. Terpadat pada Kecamatan Baradatu dengan 252 jiwa per Km<sup>2</sup>, dan penduduk dengan kepadatan terendah di Kecamatan Negeri Agung dengan kepadatan 36 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Jika ditinjau dari umur penduduk, maka pada umumnya penduduk berusia muda, yaitu di bawah 18 tahun berjumlah 194.772 jiwa atau 49,65% sedangkan yang berusia 60 tahun ke atas hanya berjumlah 23.295 jiwa atau 5,93%, sehingga penduduk usia produktif berjumlah 174.217 atau 44,41%.

Masyarakat yang berada di Kabupaten Way Kanan ini terdiri dari masyarakat Lampung sendiri dan masyarakat pendatang yang terdiri dari beragam suku bangsa. Masyarakat pendatang didominasi oleh suku Jawa, disusul Semendo, Sunda, Ogan, dan beberapa suku lain dalam jumlah yang kecil.

### **3. Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi**

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan pada tahun 2007 sebesar 4,10%. Angka ini menunjukkan kenaikan yang realtif stabil pada posisi angka 4%, jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yaitu 4,64% pada tahun 2004, 4,13% pada tahun 2003 dan 4,02% pada tahun 2002.

Pada perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kegiatan ekonomi di kabupaten way Kanan dikelompokkan

menjadi sembilan sektor. Berikut ini struktur Ekonomi Kabupaten Way Kanan tahun 2004 –2007 :

**Tabel 4**

**Struktur Ekonomi Kabupaten Way Kanan tahun 2004–2007  
Atas dasar Harga berlaku (Persen)**

Lapangan Usaha/sektor	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	59,81	59,16	56,49	53,84
2. Pertambangan dan penggalian	2,00	2,04	2,53	2,77
3. Industri Pengolahan	11,76	11,46	12,64	14,08
4. Listrik, Gas dan Air	0,12	0,15	0,15	0,14
5. Konstruksi	4,74	4,70	4,55	4,53
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah makan	8,98	8,90	8,36	7,87
7. Angkutan dan Komunikasi	2,74	2,80	3,52	4,56
8. Lembaga Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,74	2,33	2,55	2,45
9. Jasa-jasa	8,11	8,46	9,21	9,78
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kab. Way Kanan, 2007, BPS Kab. Way Kanan

Pada tabel strukur ekonomi Kabupaten Way Kanan di atas, jelas bahwa sektor perekonomian masyarakat di dominasi pada sektor pertanian, didukung oleh sektor industri dan pengolahan. Sedangkan sektor Perdagangan, hotel dan Rumah Makan dan Sektor jasa tumbuh seacara berimbang. Meskipun sektor pertanian berada pada posisi teratas, tapi secara makro belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kab. Way Kanan secara significant, sebab sektor keuangan dan jasa masih merupakan sektor yang paling utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan.

Masyarakat Lampung mendominasi posisi sebagai pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan di

instansi pemerintah lainnya. Masyarakat pendatang (Jawa, Semendo, Bali, Padang, Batak dan beberapa suku lainnya) ada juga yang menduduki jabatan strategis pada instansi pemerintah di Kabupaten Way Kanan, namun dalam jumlah yang kecil.

Masyarakat pendatang lebih banyak bekerja dalam sektor informal. Sehingga penguasaan sumberdaya ekonomi strategis banyak dikuasai oleh masyarakat pendatang (Padang, Jawa, Bali dan Batak). Seperti pengusaha di bidang transportasi didominasi oleh suku Bali. Perdagangan maupun bidang peragenan dan retail, pengusaha rumah makan didominasi suku Padang dan Jawa. Pengusaha di bidang otomotif (dealer kendaraan bermotor) didominasi keturunan Cina. Sedangkan pengusaha di bidang pertanian dan perkebunan didominasi oleh suku Jawa dan Semendo.

Kemapanan masyarakat dari aspek sosial budayanya dapat dilihat dari aspek pendidikan. Kabupaten Way Kanan cukup responsif terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya jumlah lembaga pendidikan yang ada. Mulai tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sampai tingkat SLTA, terdapat 478 lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Kemudian tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sudah cukup memadai. Data tentang hal ini dapat tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah**  
**Kabupaten Way Kanan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA
1	TK	4.293
2	SD	55.879
3	SLTP	15.051
4	SLTA	5.044
Jumlah		<b>80.267</b>

Sumber: BPS Way Kanan, Way Kanan Dalam Angka, 2007

Aspek sosial budaya lainnya adalah aspek bahasa. Di Kabupaten Way Kanan bahasa daerah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat mayoritas suku di suatu wilayah kecamatan. Seperti di Kecamatan Blambangan Umpu, mayoritas penduduknya suku Lampung, maka bahasa sehari-hari yang digunakan ialah bahasa Lampung. Sedang di Kecamatan Banjit, bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Semendo, dikarenakan di wilayah ini mayoritas penduduknya suku Semendo. Dan begitu juga di beberapa wilayah lainnya.

Selanjutnya dapat pula dijumpai Tradisi atau adat istiadat yang masih melekat dan dilestarikan. Seperti, pesta perkawinan dalam adat Lampung, pesta perkawinan dalam adat semendo, dan suku-suku lainnya.

#### 4. Kondisi Sosial Politik

Untuk melihat kondisi sosial politik di Kabupaten Way Kanan, dapat ditelusuri melalui partisipasi masyarakat dalam organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, dapat digambarkan pada data PEMILU yang lalu, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel**  
**Daftar Perolehan Suara Pada Pemilu**  
**Kabupaten Way Kanan**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUM. SUARA SAH	KET.
1	2	3	4
1	PNI MARHAENISME	3.451	XIII
2	PBSD	1.769	XVIII
3	PBB	4.834	X
4	PARTAI MERDEKA	362	XXII
5	PPP	10.712	V

6	PPDK	2.979	XIV
7	PPIB	652	XX
8	PNBK	4.643	XI
9	PARTAI DEMOKRAT	3.958	XII
10	PKPI	6.264	IX
11	PPDI	117	XXIII
12	PPNUI	2579	XV
13	PAN	7352	VII
14	PKPB	6431	VIII
15	PKB	10.895	IV
16	PKS	9.901	VI
17	PBR	13.550	III
18	PDI-P	38.603	II
19	PDS	1.850	XVII
20	GOLKAR	47.095	I
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	2.544	XVI
22	PSI	699	XIX
23	PPD	377	XXI
24	PARTAI PELOPOR	0	XXIV

Sumber: Kesbanglinmas Kab. Way Kanan, 2007.

Dari tabel di atas, tergambar bahwa aspirasi politik masyarakat kabupaten Way Kanan masih terkonsentrasi pada partai-partai besar, seperti: Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak. Disusul PDI-P pada posisi kedua, PBR pada posisi ketiga, PKB pada poisisi keempat, PPP pada posisi kelima, dan PKS dan PAN sebagai partai baru pada posisi keenam dan ketujuh.

Sementara dari sisi partisipasi masyarakat dalam berorganisasi, dapat dilihat dari banyaknya muncul organisasi sosial kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

**Daftar Organisasi Kemasyarakatan dan LSM  
Kabupaten Way Kanan**

NO	NAMA ORGANISASI/LSM	KETUA	KET.
1	Komite Anti Korupsi (KOAK)	Azwari	LSM
2	DPC Pejuang Siliwangi	Abdul Muluk RM	ORMAS
3	Lembaga Adat LPG-WK Lima Kebuain	H. Ridwan Basyah	ORMAS
4	DPD LDII	Ridwan Ismail	ORMAS
5	Yayasan Dakwah Islam	Mukhtar Jaya	ORMAS
6	DPC Pengabdian Putra Bangsa	Mujahid	ORMAS
7	Forum Lampung Ruwai Jural Korwil Way Kanan	Busri Rahmadi AS, BE	ORMAS
8	Dian Carita Kabupaten Way Kanan	A Line Subiyanto	LSM
9	Lembaga Informasi Negara RI (LIN-RI)	Dahyir Ahmad	LSM
10	Pusat Studi dan Kebijakan (PUSSBIK)	Yuzirizal, SH.	LSM
11	Masyarakat Peduli Pembangunan Kab. Way Kanan	Hamim Akbar	LSM
12	Komite Independen PEMILU Kab. Way Kanan	Azwar Syarifuddin SP	LSM
13	Lembaga Independen Pengkajian Pembangunan dan Aspirasi Rakyat (LIBAS)	Dr.HC. I Made Gelgel SE, M.Si.	LSM
14	Koalisi Lingkungan Hidup (KOALHI)	Hamka TP. Negara	LSM
15	Jaringan Masyarakat Way Kanan Bersatu (JAMWAKTU)	Abadir Muhiir	LSM
16	Lembaga Bantuan Kesehatan Negara	M. Indra Ibrahim	LSM
17	Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (ASKUMINDO)	Jazuli DJ	Profesi
18	Masyarakat Pemberantas KKN Satu Indonesia (MAPAKSI)	Mukhtar Jaya	LSM
19	Lembaga Penggerak Anak Bangsa	Agustoni	LSM

Sumber: *Kesbanglinmas Kab. Way Kanan, 2007.*



Dari tabel di atas, tergambar bahwa pertumbuhan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan cukup pesat, karena kabupaten Way Kanan usianya masih relatif muda. Secara kuantitatif jumlah ORMAS sebanyak 7 lembaga, dan LSM sebanyak 12 lembaga. Dengan demikian pertumbuhan LSM lebih pesat daripada ORMAS.

Sedangkan Organisasi Kepemudaan di kabupaten Way Kanan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel**

**Daftar Organisasi Pemuda  
Kabupaten Way Kanan**

NO	NAMA ORGANISASI PEMUDA	KETUA	KET.
1	GP. ANSHOR	Toto Dwi Pambudi	DPD
2	Pemdua Muhammadiyah	M. Thohir, S.Ag.	PD
3	KNPI	H.M.Hadi Saputra	DPC
4	Persatuan Muli-Meghanai Lampung	Matson Suhari,SE	Kab.Way Kanan
5	Purna PASKIBRA Indonesia	B. Ishak	Kab.Way Kanan
6	Himpunan Pelajar dan Mahasiswa (HPMAWAN)	Rahmadhan	Kab.Way Kanan
7	Generasi Muda Pencinta Alam Way Kanan (GEMPALA WK)	Anshori Oktafiyadi	

Sumber: Kesbanglinmas Kab. Way Kanan, 2007.

Sedangkan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan didominasi oleh suku Jawa disusul dengan suku Lampung, Semendo, ogan, sunda serta suku-suku kecil lainnya. Jabatan-jabatan strategis lebih didominasi suku Lampung.

## **G. Kabupaten Lampung Selatan**

### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Selatan**

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian Daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak Asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai realisasi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, lahirlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1945. Undang-undang ini mengatur tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah yang pertama. Isinya antara lain mengembalikan kekuasaan Pemerintahan di Daerah kepada aparaturnya yang berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu, untuk menegakkan Pemerintahan di Daerah yang rasional dengan mengikut sertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya disusul dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya sebagai berikut :

1. Propinsi Daerah Tingkat I;
2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II;
3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka lahirlah Propinsi Sumatera Selatan dengan perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950, yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian otonomi Daerah bawahannya, diatur selanjutnya Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 14 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan beserta DPRD-nya dan 7 (tujuh) buah Dinas otonom. Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur Pemerintahan Kabupaten, lahirlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948. Hanya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dikenal dengan sistem otonomi riil yaitu pemberian otonomi termasuk *medebewind*.

Kemudian untuk lebih sempurnanya Sistem Pemerintahan Daerah, lahirlah Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif dari pada :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957;
4. Penpres Nomor 6 tahun 1959;
5. Penpres Nomor 5 tahun 1960.

Selanjutnya, karena Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang sifatnya lebih luas dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang Pemerintahan saja, tetapi lebih luas dari itu, termasuk dinas-dinas vertical (aparatus pusat di daerah) yang diatur pula didalamnya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2006. Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

## **2. Aspek Geografis**

Daerah Propinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288.35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Secara geografis Propinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur-Barat berada antara : 103.40 derajat-105.50 derajat Bujur Timur dan Utara-Selatan berada antara : 6.45 derajat-3.45 derajat Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan :

1. Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara
2. Selat Sunda, di sebelah Selatan
3. Laut Jawa, di sebelah Timur
4. Samudra Indonesia, di sebelah Barat

Propinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta merupakan pusat kegiatan perekonomian. Secara geografis, Kabupaten Lampung Selatan terletak pada posisi 104.15-105.45 Bujur Timur dan 5-6 Lintang Selatan. Dengan letak yang demikian, maka daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Posisi wilayah barat agak keselatan cenderung meruncing menelusuri pantai dan membentuk teluk Lampung dan semakin ke selatan paling ujung berbatasan dengan selat Sunda, sedangkan bagian Timur berbatasan dengan laut Jawa.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas daerah daratan kurang lebih 3.180,78 km dan panjang pantainya lebih dari 200 km memiliki posisi yang strategis karena tidak saja merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dengan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di Kecamatan Penengahan, tetapi juga adanya Bandar Udara Radin Intan II di Kecamatan Natar.

Dengan ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut, topografi Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari :

- a. Ketinggian 0-7 m dari permukaan laut. Daerah ini merupakan pertemuan air, yaitu sekitar Sragi, Palas, Ketapang, Sidomulyo, Kalianda, Padang Cermin, dan Punduh Pidada.
- b. Ketinggian 7-50 m dari permukaan laut daerah ini merupakan wilayah datar sehingga kalau ada pengairan yang cukup, akan menjadi daerah persawahan yang baik. Daerah ini terdapat pada kecamatan Penengahan, Ketapang, Sragi, Palas, Kalianda, Tanjung Bintang dan Padang Cermin.
- c. Ketinggian 50-100 m dari permukaan laut, masih merupakan daerah persawahan. Hanya karena permukaan tanahnya mulai

bergelombang dengan kemiringan lereng mencapai 15 % sehingga tanah disini banyak dimanfaatkan untuk pertanian tanah kering. Daerah ini terdapat di kecamatan Penengahan Palas, Sidomulyo, Katibung, Gedung Tataan, Natar dan Jati Agung.

- d. Ketinggian 100-500 m dari permukaan laut daerah ini merupakan daerah persawahan yang baik, walaupun permukaan tanahnya relatif lebih kasar dibanding daerah dibawahnya daerah ini terdapat pada kecamatan Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Natar dan Tegineneng.
- e. Ketinggian 500-1000 m daerah ini merupakan daerah peralihan antara iklim panas dan iklim sedang. Permukaan tanahnya berbukit hingga bergunung terdapat pada kecamatan Kedondong, Padang Cermin, Punduh Pidada, Gedung Tataan, Merbau Mataram dan Katibung.
- f. Ketinggian lebih dari 1000 m menepati ruang relatif kecil yaitu di sebagian gunung yang terdapat di Kecamatan Kalianda dan Padang Cermin.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Selatan meliputi :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda.
- 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Adapun Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 20 kecamatan sebagai berikut :

## Tabel

### Daftar Kecamatan- kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas wilayah (km2)
1	Penengahan	Penengahan	190,11
2	Palas	Bangunan	171,39
3	Kalianda	Kalianda	161,40
4	Sidomulyo	Sidomulyo	160,98
5	Katibung	Tanjung Ratu	222,31
6	Tanjung Bintang	Jati Baru	233,04
7	Natar	Natar	213,77
8	Gedong Tataan	Gedong Tataan	97,06
9	Kedondong	Kedondong	131,11
10	Padang Cermin	Wates Way Ratai	317,63
11	Jati Agung	Margo Agung	164,47
12	Tegineneng	Trimulyo	151,26
13	Negeri Katon	Negeri Katon	152,69
14	Sragi	Kuala Sekampung	81,92
15	Ketapang	Bangun Rejo	108,60
16	Rajabasa	Banding	100,39
17	Candi Puro	Candipuro	84,69
18	Merbau Mataram	Merbau Mataram	113,94
19	Punduh Pidada	Bawang	224,19
20	Way Lima	Baturaja	99,83
	Jumlah		3.180,78

Sumber : - Data dan Fakta Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005

- Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, BAPPEDA Kab. Lam-Sel Tahun 2007

### 3. Aspek Demografi Penduduk

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari asal keturunannya dapat digolongkan dalam 2 (dua) kelompok penduduk yaitu kelompok penduduk asli (suku Lampung) dan kelompok penduduk pendatang (berasal dari luar daerah

Lampung). Masyarakat penduduk asli Lampung memiliki struktur hukum adat yang berbeda-beda dan secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung adat Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok yang kedua yaitu kelompok masyarakat Lampung adat Pepadun. Sementara masyarakat penduduk pendatang, sejarahnya sudah dimulai sejak Zaman Belanda yaitu pada tahun 1905 dengan adanya transmigrasi sebanyak 155 kepala keluarga dari pulau Jawa yang ditempatkan di Desa Bagelan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian secara bertahap program transmigrasi ini dilanjutkan, baik pada Zaman Kolonialisasi Belanda, maupun setelah Zaman Kemerdekaan. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan akan selalu mengalami perkembangan, baik pertambahan dikarenakan jumlah kelahiran maupun pertambahan karena perpindahan, terutama perpindahan dari Pulau Jawa, yaitu setelah dibukanya pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang dapat menunjang kelancaran lalu lintas hubungan antar Pulau Jawa-Sumatera, demikian sebaliknya.

Penduduk pendatang terdiri dari beberapa suku antara lain Suku Jawa, Bali, Sunda, Sumatera Selatan, Makasar, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Manado, Timor dan lain sebagainya. Penduduk pendatang dari pulau Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat) merupakan penduduk yang jumlahnya relatif banyak yang menempati daerah-daerah pedesaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2003 berjumlah 1.187.648 jiwa terdiri dari 620.259 jiwa laki-laki dan 567.389 jiwa perempuan. Sedangkan berdasarkan hasil proyeksi tahun 2004 berjumlah 1.205.703 jiwa yang tercatat pada 278.593 rumah tangga, terdiri dari 632.484 penduduk laki-laki dan 573.219 penduduk perempuan.



Persentase struktur umur penduduk sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah 63,35 %. Berikutnya usia anak-anak (0-14 tahun) berjumlah 32,40 %. Dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 4,25 %.

#### 4. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Selatan bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Jika ditinjau dari jenis usaha yang dikembangkan, maka komposisi tenaga kerja dan lapangan usaha pada tahun 2007, sebagai berikut :

##### Tabel

##### Komposisi Tenaga Kerja

##### Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenis Usaha	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase(%)
1	Pertanian	120.021	32,9
2	Pertambangan dan Galian	1.652	0,5
3	Industri	45.887	12,4
4	Listrik, gas dan air	2.548	0,7
5	Konstruksi	12.696	3,5
6	Perdagangan	83.188	22,8
7	Komunikasi	15.321	4,2
8	Keuangan	10.150	2,8
9	Jasa-jasa	74.026	20,2
	<b>Jumlah</b>	<b>364489</b>	<b>100</b>

Sumber data : Profil Potensi Kabupaten Lampung Selatan 2007

Masyarakat Lampung mendominasi posisi sebagai pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan di Instansi Pemerintah lainnya. Masyarakat pendatang (Jawa, Padang, Batak dan beberapa suku lainnya) ada juga yang menduduki jabatan strategis pada instansi pemerintah di Kabuapten Lampung Selatan, namun dalam jumlah yang kecil.

Masyarakat pendatang lebih banyak bekerja dalam sektor informal. Sehingga penguasaan sumberdaya ekonomi strategis banyak dikuasai oleh masyarakat pendatang (Jawa, Padang, Batak dan keturunan Cina). Seperti pengusaha di bidang transportasi didominasi oleh suku Jawa. Perdagangan maupun bidang peragenan dan retail, pengusaha rumah makan didominasi suku Padang, keturunan Cina dan Jawa. Pengusaha di bidang otomotif (dealer kendaraan bermotor) didominasi keturunan Cina. Sedangkan pengusaha di bidang pertanian dan perindustrian didominasi oleh suku Jawa.

## **5. Kehidupan Sosial Politik**

Berdasarkan aspirasi politik, penduduk Lampung Selatan didominasi oleh Partai Golongan Karya selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Organisasi kepemudaan *onderbaw* partai politik didominasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Sedangkan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh suku Lampung yang beragama Islam. Pemegang jabatan strategis juga didominasi suku Lampung beragama Islam Hal ini terlihat di lingkungan pemerintahan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 adalah berjumlah 11.852 orang dengan rincian sebagai berikut : Golongan I : 104 orang (0,9 persen), Golongan II : 2062 orang (17,7 persen), Golongan III : 8.063 orang (69,2 persen) dan Golongan IV : 1423 orang (12,2 persen)

Dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tahun 2004 berjumlah 1.101 orang dengan rincian sebagai berikut : Eselon II : 24 orang (2,18 persen), Eselon III : 145 orang (13,17 persen) dan Eselon IV : 936 orang (85,01 persen).

Pengelompokan penduduk menurut tingkat pendidikan, diuraikan dalam prosentase sebagai berikut : Warga Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki tingkat pendidikan Pascasarjana sebanyak 2 persen, Sarjana sebanyak 27 persen, Sekolah Menengah Atas (SLA) sebanyak 38 persen, Sekolah Menengah Pertama (SLP) sebanyak persen, Sekolah Dasar (SD) dan tidak sekolah 12 persen.

Adapun Bahasa Daerah tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang mendominasi adalah Bahasa Indonesia, walaupun demikian di kalangan tertentu bahasa daerah baik Jawa maupun Banten tetap yang banyak dipergunakan.

Tradisi masyarakat yang berkembang lebih banyak dalam nuansa keagamaan, dalam bentuk perayaan hari-hari besar keagamaan, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Di samping perkembangan baru sejak beberapa tahun terakhir ini tradisi Barong-sai dari masyarakat keturunan Cina sudah mulai hidup kembali pada hari-hari besar masyarakat keturunan Cina melalui kegiatan Karnaval juga tradisi lama masih tetap eksis seperti pertunjukan *Kuda Lumping* dan *Sintren*.

## **H. Kota Metro**

### **1. Geografis dan Demografis**

Di dalam gambaran umum Kota Metro, dijelaskan mengenai 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang ada meliputi kondisi umum di dalam Kota Metro itu sendiri meliputi kondisi geografis, perekonomian, sosial budaya, prasarana dan sarana fisik serta pemerintahan umum. Faktor eksternal yang mempengaruhi Kota Metro meliputi kebijakan-kebijakan Provinsi Lampung, Nasional dan Internasional serta gejala-gejala yang kemungkinan dapat mempengaruhi situasi dan perkembangan Kota Metro.

Posisi Wilayah Kota Metro berada di Tengah Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada 5°6-5°8 Lintang Selatan dan 105°17-105°19 Bujur Timur. Dalam skala nasional, Kota Metro berfungsi mendukung kelancaran arus transportasi Lintas Sumatera menuju Pulau Jawa dan Bali, sedangkan dalam skala regional Kota Metro merupakan wilayah belakang/hinterland dari Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Kondisi ini didukung oleh keberadaan Kota Metro yang relatif dekat dengan Kota Bandar Lampung, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana perhubungan antar kedua kota yang memadai.

Dalam skala lokal, Kota Metro merupakan pusat pengumpulan dan distribusi barang bagi kecamatan-kecamatan yang ada di sekitarnya. Di samping itu, Kota Metro berkembang dengan pesat sebagai tempat konsentrasi permukiman penduduk, pusat pelayanan sosial, dan pusat perdagangan dan jasa, yang didukung oleh kelengkapan fasilitas permukiman, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya.

Secara garis besar, peran Kota Metro dalam lingkup Provinsi Lampung adalah :

- a. Merupakan tempat transit transportasi, yang dapat mendukung pergerakan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang ada di sekitarnya;
- b. Merupakan jalur lintas alternatif , karena dilalui oleh jalan yang menghubungkan Kota Bandar Lampung ( jalan Sultan Agung, Way Halim ) dan Kota Metro ( Jalan Budi Utomo, Margorejo );
- c. Merupakan pusat pemasaran hasil pertanian dan industri kecil (rumah tangga) dari daerah sekitarnya;
- d. Merupakan pusat pendidikan, pemerintahan, pelayanan sosial, dan permukiman penduduk;

- e. Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan penggerak pertumbuhan dan pembangunan wilayah, dengan daerah pendukung terdiri dari Punggur, Kotagajah, Pekalongan, Sukadana, Purbolinggo, Batanghari, Sekampung, Metro, dan Trimurjo.

Kota Metro mulai terbentuk dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. Di dalam desentralisasi otonomi daerah saat ini, Kota Metro memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Luas Kota Metro secara administratif sebesar 68,74 Km<sup>2</sup> atau 6.874 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Kota Metro terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan meliputi jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 836 dan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 310. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara 19,64 Km<sup>2</sup> atau 28,57% dari luas total Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya memiliki luas wilayah antara 17% sampai 21% terhadap luas seluruh kota.

Tabel

Luas Wilayah Administrasi Kota Metro per Kelurahan Tahun 2007

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	% terhadap Luas Total	Jumlah LK
1.	Metro Pusat	1. Metro	2,28	3,32	9
		2. Imopuro	1,19	1,73	6
		3. Hadimulyo Timur	3,37	4,90	6
		4. Hadimulyo Barat	1,50	2,18	9
		5. Yosomulyo	3,37	4,90	5
		Sub total	11,71	17,04	35
2.	Metro Utara	1. Banjarsari	5,75	8,36	9
		2. Purwosari	2,55	3,71	7
		3. Purwoasari	3,62	5,27	4
		4. Karangrejo	7,72	11,23	11
		Sub total	14,33	20,85	23
3.	Metro Timur	1. Iring Mulyo	1,89	3,22	8
		2. Yosodadi	3,36	4,89	4
		3. Yosorejo	1,22	1,77	9
		4. Tejosari	3,76	5,47	4
		5. Tejo agung	1,55	2,25	5
		Sub total	11,78	17,14	30
4.	Metro Barat	1. Mulyojati	2,95	4,29	6
		2. Mulyosari	3,03	4,41	5
		3. Ganjar Agung	2,88	4,19	5
		4. Ganjarsari	2,42	3,52	5
		Sub total	11,28	16,41	21
	Luas Total Wilayah Kota Metro		68,74	100,00	140

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro, 2007

Kondisi fisik Kota Metro sangat menentukan rencana pengembangannya di masa mendatang. Berdasarkan pengamatan terhadap karakteristik fisik wilayah, tidak teridentifikasi adanya kendala fisik berkaitan dengan topografi mengingat sebagian besar wilayah Kota Metro relatif datar. Selain itu kondisi geologi dan rendahnya tingkat kepekaan terhadap erosi sangat mendukung pengembangan fisik kota. Faktor limitasi perkembangan fisik yang perlu dicermati adalah perkembangan kota pada kawasan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan tak terbangun. Hal tersebut sangat penting dalam upaya mempertahankan kondisi ekologis wilayah yang berkelanjutan.

Kota Metro memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan 0%-5% dan terletak pada ketinggian 45%-62% di atas permukaan laut. Jenis batumannya terdiri dari batuan alluvium, sedangkan jenis tanahnya adalah Podzolik yang terdiri dari asosiasi Podzolik kekuningan dan Podzolik merah kekuningan.

Wilayah Kota Metro berkembang di atas lahan pertanian, yang sebagian besar berupa sawah irigasi teknis dan produktif. Perkembangan ini makin dipercepat oleh pembangunan prasarana jalan, sehingga lahan permukiman dan persawahan yang terbangun cenderung mengikuti jaringan jalan. Kepadatan bangunan paling tinggi terdapat di pusat kota, yang terdiri dari bangunan perkantoran jasa lainnya. Kota Metro beriklim tropis sebagaimana halnya dengan kondisi iklim di wilayah Provinsi Lampung pada umumnya. Secara terinci kondisi iklim di kota Metro adalah sebagai berikut :

a. Arus angin

Kota Metro terletak di garis khatulistiwa pada posisi 5° Lintang Selatan yang beriklim Humid Tropis, dengan arah angin laut berhembus dari Samudera Indonesia dan Laut Jawa. Pada bulan November hingga bulan Maret, angin berhembus dari arah Barat dan Barat Laut. Pada bulan Juli hingga bulan

Agustus, angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin pada umumnya rata-rata 5,83 km / jam

b. Temperatur dan kelembaban udara

Pada ketinggian antar 40-62 meter dari permukiman laut, temperatur udara rata-rata siang berkisar 26°C-30°C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28° C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antar 80%-88%.

c. Rata-rata curah hujan di Kota Metro antar 1.921,07 mm per tahun sejak tahun 2000-2003. Bulan hujan prakiraan berkisar antar bulan September hingga bulan Mei, sedangkan bulan kering perkiraan berkisar antara bulan Juni hingga bulan Agustus.

## **2. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk**

Jumlah dan kualitas penduduk sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang berlangsung. Aspek kependudukan menentukan jumlah kebutuhan pelayanan dan penyediaan sumberdaya ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

Penduduk Kota Metro pada tahun 2004 berjumlah 152.829 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,78% per tahun sejak tahun 2001. Penyebaran penduduk di Kota Metro pada tahun 2004 sebagian besar terkonsentrasi di kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Timur. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro sebesar 2.212 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Metro Pusat dan terendah di Kecamatan Metro Selatan.



Tabel

## Jumlah dan Kepadatan penduduk Kota Metro Tahun 2007

No	Kecamatan	Banyak Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Metro Pusat	27.953	28.115	56.068
2.	Metro Barat	10.591	11.030	21.621
3.	Metro Timur	16.384	17.120	33.504
4.	Metro Utara	12.344	12.389	24.733
5.	Metro Selatan	8.403	8.550	16.953
Jumlah		75.675	77.204	152.879

Sumber : BKCS KB, 2007

Komposisi penduduk Kota Metro berdasarkan struktur umur dibedakan atas usia produktif ( $> 15-60$  tahun) dan usia tidak produktif ( $1-14$  tahun dan  $> 60$  tahun). Pada tahun 2004 jumlah penduduk usia produktif di Kota Metro sebesar 109.188 jiwa atau 71.42% dari jumlah penduduk, sedangkan usia tidak produktif berjumlah 43.691 jiwa atau 28,58%.

Tabel

## Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2007

Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah (Jiwa)
1-4	5.088	5.588	10.676
5-9	5.475	5.980	11.455
10-14	7.051	7.379	14.430
15-19	8.965	8.669	17.634
20-24	7.996	6.754	14.750
25-29	8.534	8.226	16.760
30-34	5.852	6.135	11.987
35-39	5.167	6.110	11.277
40-44	5.193	5.397	10.590
45-49	4.584	4.678	9.262
50-54	4.778	4.419	9.197
55-59	3.879	3.852	7.731
60-65+	3.113	4.017	7.130
Jumlah	75.675	77.204	152.879

Sumber : BKCS KB, 2007

Berdasarkan komposisi umur penduduk di atas, maka besarnya ratio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kota Metro pada tahun 2004 sebesar 40%, artinya setiap 100 jiwa penduduk produktif menanggung beban 40 jiwa yang tidak produktif. Dengan demikian ratio ketergantungan penduduk Kota Metro termasuk klasifikasi rendah (<50%). Secara terinci komposisi penduduk produktif dan tidak produktif dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif di Kota Metro Tahun 2007

No	Kelompok Umur	Jumlah		Keterangan
		Jiwa	%	
1.	1-14	36.561	23.92	Usia tidak produktif
2.	>15-59	109.188	71,42	Usia Produktif
3.	>60	7.130	4,66	Usia tidak produktif
	Jumlah	152.879	100,00	

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro, 2007 (data diolah)

Mata pencaharian penduduk Kota Metro pada tahun 2004 sebagian besar adalah pada sektor jasa (33,58%) disusul oleh sektor pertanian (32,92%), kontribusi (11,65%), dan perdagangan (9,45%). Komposisi mata pencaharian penduduk di Kota Metro tahun 2004 secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kota Metro Tahun 2007

No	Sektor	Jumlah Penduduk (jiwa)						%
		Metro Pusat	Metro Barat	Metro Timur	Metro Selatan	Metro Utara	Jumlah	
1.	Pertanian	1.002	1.545	1.174	1.574	3.269	8.564	32,92
2.	Perikanan	266	33	3	4	9	315	1,21
3.	Peternakan	615	0	6	212	75	908	3,49
4.	Industri	904	33	143	78	265	1.423	5,47
5.	Konstruksi	1.665	544	293	376	154	3.032	11,65
6.	Perdagangan	493	152	1.511	189	121	2.466	9,48
7.	Angkutan	80	62	63	7	83	295	1,13
8.	Jasa Keuangan	28	2	2	0	0	30	0,11
9.	Jasa Pemerintahan	3.389	541	2.658	438	1.078	8.104	31,15
10.	Jasa Perorangan	237	116	140	21	88	602	2,31
11.	Lainnya	154	0	124	0	0	278	1,07
	Jumlah	8.833	3.026	6.117	2.899	5.142	26.017	100
	%	33,95	11,63	23,51	11,14	19,76	100	

Sumber : Bappeda Kota Metro, 2007

Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagian besar bertempat tinggal di Kecamatan Metro Pusat (33,95%), Kecamatan Metro Timur (23,51%), dan Kecamatan Metro Utara (19,76%), sedangkan yang prosentasinya relatif rendah berada di Kecamatan Metro Selatan (11,14%) dan Kecamatan Metro Barat (11,63%).

Tabel

Jumlah Keluarga Miskin di Kota Metro Tahun 2004-2007

No	Kecamatan	2004		2005		2006		2007	
		PSAE	KSIAE	PSAE	KSIAE	PSAE	KSIAE	PSAE	KSIAE
1.	Metro Pusat	669	1.260	562	1.484	558	1.349	559	1.545
2.	Metro Barat	802	634	711	663	749	829	678	796
3.	Metro Timur	577	282	496	364	453	348	449	507
4.	Metro Utara	587	927	557	946	537	754	537	682
5.	Metro Selatan	313	130	331	187	339	247	334	349
Jumlah		2.948	3.233	2.657	3.644	2.636	3.527	2.557	3.879

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami penurunan dari 3.188 keluarga menjadi 2.557 turun sebesar 631 keluarga pra sejahtera.

Terkait dengan pembangunan manusia (sebagai objek), dapat dilihat status pembangunan manusia melalui suatu indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2004, Kota Metro memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi kedua di Provinsi Lampung dengan nilai 69,0 setelah Kota Bandar Lampung, sedangkan yang memiliki nilai IPM terendah adalah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lampung Barat menunjukkan angka yang ekstrem pada angka harapan hidup dan daya beli masyarakat. Sementara Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung memiliki IPM tertinggi dengan kontribusi utama indeks diperoleh dari kemampuan daya beli masyarakatnya.

#### Tabel

Kategori Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
di Kota Metro

No	Nilai IPM	Kategori
1.	IPM < 50	Rendah
	$50 \leq \text{IPM} < 66$	Menengah Bawah *)
	$66 \leq \text{IPM} < 80$	Menengah Atas *)
	IPM $\geq 80$	Tinggi

\*) Modifikasi UNDP dengan memecah klasifikasi menengah

Tabel

## Nilai Komponen IPM Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003
1.	Lampung Barat	59.40	59.10	63.20
2.	Tanggamus	60.10	60.10	65.50
3.	Lampung Selatan	59.70	60.30	64.60
4.	Lampung Timur	60.80	61.60	65.70
5.	Lampung Tengah	62.10	63.20	66.90
6.	Lampung Utara	64.30	64.30	66.30
7.	Way Kanan	60.70	61.80	64.50
8.	Tulang Bawang	61.20	60.50	63.50
9.	Bandar Lampung	70.90	71.60	70.70
10	Metro	68.90	69.00	73.50
	Provinsi Lampung	62.60	63.10	66.00

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2006-2007

Pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2006 dan 2007 IPM Kota Metro masing-masing sebesar 68,90 dan 69,00. Dengan demikian Kota Metro menduduki peringkat ke dua dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Setelah Kota Bandar Lampung. Namun di tahun 2003 posisi Kota Metro meningkat menjadi menduduki posisi pertama dengan IPM sebesar 73,50

Apabila dilihat dari masing-masing komponen, maka Kota Metro memiliki nilai Indeks Kelangsungan Hidup (IKH) sebesar 75,8, nilai Indeks Pengetahuan (IP) sebesar 84,8 dan nilai Indeks Daya Beli (IDB) sebesar 46,2. Nilai IKH Kota Metro merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, sedangkan IP dan IDB menduduki urutan nomor dua setelah Kota Bandar Lampung. Nilai komponen pembentukan IPM secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Nilai Komponen IPM Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Lampung Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kelangkaan Hidup (IKH)	Indeks Pengetahuan (IP)	Indeks Daya Beli (IDB)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.	Lampung Barat	66,3	77,7	33,2	59,1
2.	Tanggamus	69,3	75,7	35,4	60,1
3.	Lampung Selatan	70,0	74,5	36,5	60,3
4.	Lampung Timur	73,0	73,8	38,1	61,6
5.	Lampung Tengah	73,8	77,5	38,1	63,2
6.	Lampung Utara	72,2	79,8	40,8	64,3
7.	Way Kanan	71,5	76,3	37,6	61,8
8.	Tulang Bawang	73,2	74,9	36,5	61,5
9.	Bandar Lampung	75,0	84,9	54,9	71,6
10	Metro	75,8	84,8	46,2	69,0
	Provinsi Lampung	72,0	77,6	39,7	63,1

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2007

Pembangunan manusia pada masing-masing kecamatan di Kota Metro tahun 2007 memperlihatkan bahwa IPM Kecamatan Metro Pusat paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan karena Indeks Daya Beli dan Indeks Pengetahuan di Kecamatan Metro Pusat relatif tinggi dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap angka IPM seperti Tabel di bawah ini :

Tabel

Nilai Komponen IPM Tiap Kecamatan di Kota Metro Tahun 2007

No	Kecamatan	Indeks Kelangsungan Hidup (IKH)	Indeks Pengetahuan (IP)	Indeks Daya Beli (IDB)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.	Metro Pusat	75,25	86,22	38,66	66,71
2.	Metro Utara	74,33	77,39	33,14	61,62
3.	Metro Selatan	75,17	81,28	31,14	62,53
4.	Metro Timur	74,17	85,52	31,93	63,87
5.	Metro Barat	75,33	83,92	35,03	64,76
	Kota Metro	75,78	85,72	34,32	65,27

Sumber : BPS Kota Metro, 2007



Distribusi IPM menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel di atas, terlihat bahwa IPM tertinggi dicapai oleh kecamatan Metro Pusat, dimana indeks daya beli terhadap angka IPM. Sedangkan untuk indeks kelangsungan hidup terlihat bahwa secara umum tingkat kelangsungan hidup di Kota Metro relatif sama. Hal ini menunjukkan akses masyarakat pada sektor kesehatan relatif sama pada setiap kecamatan sehingga derajat kesehatan ibu, bayi dan anak relatif sama pada tiap kecamatan.

Untuk indeks kelangsungan hidup kecamatan se-Kota Metro mempunyai angka yang relatif sama. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap sektor kesehatan pada setiap kecamatan relatif sama, sehingga derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak relatif setara pada seluruh kecamatan.

Jumlah dan kualitas penduduk sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang berlangsung. Aspek kependudukan menentukan jumlah kebutuhan pelayanan dan penyediaan sumberdaya ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

### **3. Kehidupan Sosial Politik**

Aspek kehidupan sosial politik Kota Metro terdapat dalam Visi, Misi dan Kebijakan Umum yang tertuang pada item pertama yang di didalamnya terkandung prinsip-prinsip demokratis berarti penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, mengedepankan peran serta masyarakat, sehingga menciptakan pemerintahan yang partisipatoris dan egaliter. Dalam item keempat adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka tata pemerintahan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, profesional, efisien dan efektif,

berkeadilan serta taat pada aturan-aturan hukum. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan iklim yang kondusif dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah guna lebih mewujudkan tingkat kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan. Sebab masyarakat adalah subyek dari pembangunan itu sendiri. Selain juga untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tertib, dan tentram supaya hak-hak dasar masyarakat tidak terlanggar dengan menjunjung tinggi hukum, sehingga hukum menjadi panglima di dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Kehidupan sosial politik Kota Metro dijabarkan dalam matriks indikasi rencana program yang terdapat pada misi kelima yaitu : Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum yang di dalam kebijakan umum bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi yang dijalankan adalah kerjasama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Hal ini sebagai program dari pemerintah Kota Metro untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menciptakan iklim kehidupan demokrasi yang melibatkan peran serta masyarakat. Sebagai indikator hasil atau outcomenya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya ketertiban dan keamanan, terselenggaranya rekrutmen panwasda,

dan meningkatnya kehidupan demokrasi, sedangkan indikasi kegiatan adalah rekrutmen Panwasda yang merupakan fungsi pelayanan umum sedangkan Sub fungsinya adalah Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Sebagai penanggung jawabnya adalah Sekretaris DPRD Kota Metro.

## **I. Kabupaten Tanggamus**

### **1. Geografis dan Demografis**

Kecamatan Kotaagung adalah salah satu dari sejumlah Pemerintah Daerah Kecamatan yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang berada di ibu kota kabupaten ini, memiliki catatan sejarah setidaknya sejak tahun 1889, pada saat Belanda mulai masuk di wilayah Kota agung, yang pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang kontroller. Pada waktu itu pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah adat yang terdiri dari lima marga yaitu :

1. Marga Gunung Alip
2. Marga Benawang
3. Marga Belunguh
4. Marga Pematang Sawa
5. Marga Ngarip

Masing-masing marga tersebut dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa kampung

Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus pemerintahan Adat/Marga

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan, Kotaagung mengkoordinir empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau

Panggung. Pada tahun 1964, Pemerintahan Kewedanaan dihapuskan yang selanjutnya pada tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan.

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan pembantu Bupati Lampung Selatan untuk wilayah Kotaagung yang berkedudukan di Kotaagung, ditetapkan pembantu bupati wilayah Kotaagung yang meliputi 10 kecamatan, tujuh perwakilan kecamatan dengan 300 desa dan tiga kelurahan serta empat desa persiapan.

Pada saat Kabupaten Tanggamus terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1997, Kotaagung ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten. Pada saat ini Kotaagung sebagai sebuah kecamatan meliputi wilayah yang cukup luas, yang kemudian pada tahun 2005 dikembangkan menjadi tiga kecamatan berdasarkan Perda Tanggamus No.5 Tahun 2005. Dengan perda ini Kecamatan Kotaagung dikembangkan menjadi tiga wilayah kecamatan yaitu, Kotaagung Pusat (Kotaagung) Kecamatan Kotaagung Barat (Nagarabatin), dan Kecamatan Kotaagung Timur (Kagungan).

Kecamatan Kotaagung Pusat yang akan menjadi wilayah penelitian ini terletak di pusat ibu kota Kabupaten Tanggamus yang memiliki luas wilayah 76, 93 km<sup>2</sup> berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara Kecamatan Ulu Belu
2. Sebelah Selatan Teluk Semangka
3. Sebelah Timur Kecamatan Kotaagung Timur
4. Sebelah Barat Kecamatan Kotaagung Barat.

Secara administrasi Kecamatan Kotaagung terdiri dari 3 kelurahan (Kelurahan Baros, Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Pasar Madang) dan 10 pekon (Negeri Ratu, Kotaagung, Terbaya,

Kusa, Kedamaian, Kelungu, Pardasuka, Teratas, Penanggungan, Terdana,)

Topografi wilayah Kecamatan Kotaagung Pusat berada di ketinggian 59,9 meter dari permukaan laut, beriklim sedang dengan suhu antara 20 sampai sampai 31 derajat Celcius, sebagian besar wilayahnya berupa dataran dan sebagian berupa daerah perbukitan.

Dilihat dari sudut demografis, jumlah penduduk Kecamatan Kotaagung Pusat tercatat sebesar 35.779 jiwa, 18.492 laki-laki dan 17.287.<sup>64</sup> Tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus lainnya cukup padat, dengan ratio kepadatan sebesar /Km<sup>2</sup>

Etnisitas penduduk Kecamatan Kotaagung Pusat, sebagian besar adalah lampung peminggir. Sayang tidak bisa didapatkan data statistik yang akurat tentang ini. Tetapi menurut observasi peneliti dan keterangan tokoh masyarakat setempat, wilayah kecamatan kotaagung yang terdiri dari 3 kelurahan dan 10 pekon, 8 pekon masih didominasi oleh penduduk asli dari etnis Lampung peminggir. Hanya 2 pekon (Kotaagung dan Negeri Ratu) dan ketiga kelurahan saja, yang masyarakatnya dari latar belakang etnis yang beragam, seperti etnis Jawa, Sunda, Banten, Bugis, Padang dan Palembang, Batak, Cina.

Agak sukar untuk menarik garis hubungan antara latar belakang etnis dengan kelompok agama yang dianut, mengingat sudah sedemikian beragamnya kelompok-kelompok penganut agama setempat dengan latar belakang suku yang berbaur pula. Kecuali untuk beberapa suku tertentu, misalnya dari kalangan penduduk yang beretnis Lampung dapat diketahui bahwa seluruhnya masih menganut agama Islam, demikian halnya etnis Padang, Sunda dan Banten. Sedangkan dari kalangan penduduk

yang beretnis Batak kebanyakan beragama Kristen, dan etnis Cina umumnya beragama Budha.

**2. Kehidupan Sosial Ekonomi**

Penduduk Kecamatan Kotaagung Pusat dilihat dari sudut lapangan usaha/ mata pencahariannya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel  
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kotaagung  
Pusat Kabupaten Tanggamus

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Tani	4.250 orang	32,4%
2	Buruh	4.183 orang	31,80%
3	Dagang	3.242 orang	24,7%
4	PNS	640 orang	4,8%
5	Nelayan	767 orang	5,8%
6	Dokter	6 orang	0,04
7	TNI/POLRI	27 orang	0,2%
	Total Keseluruhan	13.115 Orang	100%

Sumber: Diolah dari data di 3 kelurahan dan 10 pekon di wilayah Kecamatan Kotaagung Pusat.

Dari tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Kotaagung Pusat sebagian besar adalah di sektor pertanian (tani dan nelayan) Sedangkan selebihnya bekerja di sektor jasa termasuk di dalamnya juga pegawai negeri dan TNI-Polri, kemudian berdagang, dan lain-lain. Pada sektor jasa dalam bentuk dagang tanpaknya juga merupakan jenis pekerjaan yang cukup dominan. Hal ini tanpaknya terkait dengan letak wilayah kecamatan Kotaagung pusat yang terletak di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten Tanggamus. Berikut gambaran prasarana perekonomian di 3 kelurahan kecamatan Kotaagung Pusat.

## Tabel

### Prasarasarana Perekonomian di 3 Kelurahan Kecamatan Kotaagung Pusat

Kelurahan	pasar	toko	kios	KUD	bank
Baros		10	17	-	-
Pasar Madang	1	78	33	1	-
Kuripan	1	8	29	1	2
Jumlah	2	96	79	2	2

Sumber: Kotaagung Dalam Angka 2006-2007

Karena data tentang prasarana perekonomian di atas diperoleh dari data tahun 2006-2007, maka diasumsikan prasarana perekonomian saat ini telah berkembang sedemikian rupa seiring berkembangnya kehidupan ekonomi di daerah ini. Sayangnya Kecamatan Kotaagung Pusat tidak memiliki data terbaru tentang hal ini.

### 3. Kehidupan Sosial Politik

#### a) Kondisi Sosial Politik

Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Nasional tahun 2003 di Kecamatan Kotaagung Pusat, yang masuk kategori lima partai besar adalah; Demokrat, PDIP, Golkar, PAN, dan PPP. Sesuai dengan urutan lima partai besar itu dapat diketahui bahwa partai populis dikalangan penduduk warga kecamatan Kotaagung Pusat adalah partai yang bercorak nasionalis. Anggota partai ini dan simpatisannya berasal dari berbagai macam latar belakang golongan etnis dan agama, memiliki visi dan misi yang sama yaitu berorientasi kepada kepentingan nasional.

Demikian halnya organisasi kepemudaan *onderbaw* partai politik, juga didominasi oleh organisasi kepemudaan yang merupakan *onderbaw* dari partai politik yang bercorak nasionalis,

seperti organisasi Pemuda Panca Marga dari partai Golkar. Organisasi ini mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa membedakan latar belakang etnis dan agama dalam struktur kepengurusan dan aktivitasnya.

Di wilayah ini azas-azas demokrasi dapat ditegakkan, semisal berkenaan dengan formasi PNS, untuk mengisi formasi yang ada tidak mesti berasal dari etnik atau agama mayoritas penduduk setempat, selama profesional nampaknya tidak menimbulkan gejolak sosial, dan sampai sekarang, masalah sosial politik di wilayah ini cukup aman dan terkendali, ditandai dengan tidak adanya konflik sosial yang terjadi.

#### b) **Kehidupan Sosial Budaya**

Kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Tingkat pendidikan penduduk kecamatan Kotaagung pusat tidak didapatkan data statistik yang terbaru. Data yang disajikan di bawah ini merupakan data yang diperoleh secara manual dari kelurahan dan pekon di wilayah Kotaagung sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.

#### **Tabel**

**Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus**

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	( % )
1.	SD	8.665	50,00%
2.	SLTP	4.105	23,60%
3.	SLTA	3.658	21,10%
4.	Diploma 1	188	1,08%
5.	Diploma 2	184	1,06%
6	Diploma 3	182	1,05%
7	S1	327	1,88%
8	S.2	12	0,06%
9	S3	1	0,005%
	Jumlah	17.321	100%

Sumber : Diolah dari data kelurahan dan pekon di wilayah Kecamatan Kotaagung Pusat.



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa taraf pendidikan penduduk kecamatan Kotaagung Pusat masih didominasi oleh pendidikan tingkat dasar. Namun demikian yang telah mencapai tingkat sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi juga sudah cukup menonjol secara kuantitas. Kondisi ini menjadi potensi bagi terbangunnya kehidupan sosial budaya yang baik, dimana sikap saling menghargai dan sikap positif dalam memahami perbedaan antara satu dengan lainnya diharapkan bisa terbangun.

Dalam kehidupan sosial budaya penduduk kecamatan Kotaagung nampak adanya kebersamaan dan keakraban antar sesama warga masyarakat, semisal saat penyelenggaraan tradisi budaya yang berkenaan dengan siklus kehidupan, peringatan hari-hari besar nasional, dan keagamaan. Dimana mereka saling membantu, menghadiri dan berkunjung sesama warga masyarakat. Oleh karena itu meskipun di daerah kecamatan ini penduduknya heterogin baik dari segi etnis maupun agama, mereka kelihatan rukun dan belum pernah terjadi konflik bernuansa “sara” yang merusak hubungan harmonis yang telah terbina. Keharmonisan itu antara lain juga nampak dalam komunikasi pergaulan sehari-hari baik di kantor, pasar dan masyarakat secara umum, selain menggunakan bahasa Indonesia, ada kecenderungan dikalangan etnis lain untuk menggunakan bahasa lampung sebagai bahasa mayoritas penduduk di daerah ini, dan terkesan lebih dekat dan akrab.

## **J. Kabupaten Lampung Utara**

### **1. Geografis dan Demografis.**

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang memiliki batas: sebelah utara dengan Kabupaten Way Kanan; sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah; sebelah timur dengan Kabupaten Tulang Bawang; dan sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 272,563

km<sup>2</sup> atau 7,72 % dari luas wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok penduduknya sebagai petani.

Secara *klimatologis*, Kabupaten Lampung Utara terletak pada posisi 4,34°-5,06° Lintang Selatan dan 104,30°-105,08° Bujur Timur, dengan temperatur rata-rata 30°C. Sedangkan dari aspek topografis terbagi menjadi dua jenis:

1. Topografi berbukit sampai bergunung. Daerah ini memiliki lereng-lereng yang curam/terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450-1500 m dari permukaan laut, meliputi kawasan bukit barisan yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain Bukit Barisan dan Bukit Pesagi.
2. Topografi Daerah River Basin. Di Kabupaten Lampung Utara terdapat river basin sungai-sungai kecil. Pada umumnya bentuk medan topografi daerah ini terbagi atas dua bagian: Sebelah barat lebih kurang 7% dari luas Lampung Utara merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan, dan sebelah timur lebih kurang 93% dari luas Lampung Utara terbentang dataran yang sebagian besar tertutup vulkanis awan gelap dan terbentang sawah serta perkebunan dataran rendah.

Sementara itu, secara *geologis*, pada bagian utara terdapat lapisan sedimen vulkanis dari celah (*fractures*) yang mengalami pelipatan di zaman peistosin, sehingga menghasilkan lapisan minyak bumi di dalam empat seri lapisan Palembang (*Palembang Bed*). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang ditandai dengan singkapan endapan tufa massam. Data tentang endapan mineral di Kabupaten Lampung Utara belum banyak ditemukan, sehingga potensi endapan bahan tambang belum banyak diketahui. Dari literatur dan peta geologi dapat diinventarisir adanya bahan-bahan tambang endapan (endapan mineral) di antaranya: minyak bumi yang terdapat pada lapisan Palembang

Bed dan terakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di daerah Palembang, yakni sebelah timur Kotabumi.

Potensi *hidrologis* di Kabupaten Lampung Utara cukup tinggi untuk sektor pertanian. Sebagian besar sungai-sungainya mengalir dari arah barat yang berbukit-bukit menuju ke timur yang landai, sehingga sangat potensial untuk pengembangan irigasi. Sunai-sungai yang dimaksud antara lain Way Rarem dengan panjang  $\pm 53$  km, dan Way Sesah. Secara rinci potensi hidrologis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

#### TABEL

#### NAMA-NAMA SUNGAI DAN PANJANGNYA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Air (Km)
1.	Way Rarem	42	193
2	Way Galing	27	131,5
3	Way Kulur	26	137
4	Way Sabuk	38	143,5
5	Way Kelamas	32	108,3
6	Way Rendah	30	156
7	Way Talang Mas	57	134
8	Way Melungun	45	133
9	Way Kelanga	23	76
10	Way Sungai Hulu	38	116
11	Way Butuh	25	64
12	Way Buyut	33	124
13	Way Hanakau	29	59,5
14	Way Sungkai Hilir	25	80
15	Way Papan	33	208

Sumber: Balai PSDA Wilayah Mesuji Tulangbawang 2007

Secara *administratif*, Kabupaten Lampung Utara terbagi menjadi 16 kecamatan dan 231 desa/kelurahan definitif dan persiapan, dengan luas wilayah yang sangat beragam. Dari 16 kecamatan tersebut, yang paling luas adalah Kecamatan Abung Selatan (33.275 ha) dan Sungkai Utara (33.182 ha), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kotabumi yang hanya 5.911 ha. Secara rinci luas daerah Kabupaten Lampung Utara menurut Kecamatan sebagai berikut:

Tabel

**LUAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2007**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>% Luas Kab.</b>	<b>Jml. Desa</b>
1	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	11.498	4,22	8
2	Abung Tinggi	Ulak Rengas	13.306	4,88	8
3	Tanjung Raja	Tanjung Raja	33.170	12,17	18
4	Abung Barat	Ogan Lima	11.551	4,24	23
5	Abung Tengah	Gunung Besar	27.540	10,10	20
6	Kotabumi	Kotabumi	5.911	2,17	13
7	Kotabumi Utara	Madukoro	17.519	6,43	8
8	Kotabumi Selatan	Mulang Maya	10.422	3,82	14
9	Abung Selatan	Kalibalangan	33.275	12,21	15
10	Abung Semuli	Semuli Jaya	9.688	3,55	14
11	Abung Timur	Bumi Agung Marga	10.447	3,83	12
12	Abung Surakarta	Tata Karya	11.051	4,05	9
13	Sungkai Selatan	Ketapang	19.558	7,18	26
14	Bunga Mayang	Negara Tl. Bawang	12.576	4,61	10
15	Muara Sungkai	Negeri Ujung Karang	11.869	4,35	10
16	Sungkai Utara	Negara Ratu	33.182	12,17	31
	Jumlah Total		272.563	100	231

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara tahun 2007.

Wilayah Kabupaten Lampung Utara seluas 272.563 km<sup>2</sup> dihuni oleh penduduk sejumlah 558.981 orang, dengan tingkat kepadatan yang tidak merata. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Kotabumi, yang merupakan ibukota kabupaten yang mencapai 869,36 per Km<sup>2</sup>. Sebaliknya, di Kecamatan Abung Tengah penduduknya masih tergolong jarang, dengan kepadatan penduduk hanya 96,94 per km<sup>2</sup>. Secara lengkap data kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
KEPADATAN PENDUDUK PER KM<sup>2</sup> DAN RATA-RATA PENDUDUK PER-RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jml. Penduduk	Kepadatan Pend per Km <sup>2</sup>
1	Bukit Kemuning	11.498	35.334	307,31
2	Abung Tinggi	13.306	16.235	122,01
3	Tanjung Raja	33.170	27.804	83,82
4	Abung Barat	11.551	32.385	280,37
5	Abung Tengah	27.540	26.696	96,94
6	Kotabumi	5.911	51.388	869,36
7	Kotabumi Utara	17.519	27.702	158,13
8	Kotabumi Selatan	10.422	61.367	588,82
9	Abung Selatan	33.275	58.818	176,76
10	Abung Semuli	9.688	22.187	229,02
11	Abung Timur	10.447	33.648	322,08
12	Abung Surakarta	11.051	26.457	239,41

13	Sungkai Selatan	19.558	40.634	207,76
14	Bunga Mayang	12.576	11.094	112,07
15	Muara Sungkai	11.869	29.441	248,05
16	Sungkai Utara	33.182	56.948	171,62
	Jumlah Total	272.563	561.138	205,87
	2004	272.563	558.981	205,08

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara tahun 2007.

Dari tabel di atas nampak bahwa tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan sangat tidak berimbang. Yang terpadat terletak di Kecamatan Kotabumi, baik Kotabumi induk, Kotabumi Utara maupun Kotabumi Selatan. Ini dapat dimengerti karena posisinya sebagai ibukota Kabupaten Lampung Utara, sementara yang lain sangat beragam.

## **2. Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk.**

### **a) Pendidikan.**

Secara umum tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lampung Utara sudah cukup memadai, jika ditinjau dari ketersediaan sarana & prasarana pendidikan, mulai dari jenjang Pendidikan Dasar, Menengah sampai Pendidikan Tinggi. Begitu pula dengan rasio ketersediaan gedung, ruang kelas, jumlah guru/dosen serta murid/mahasiswa. Secara rinci hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel

BANYAKNYA SEKOLAH, GURU DAN MURID MENURUT STATUS SEKOLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Status/Tingkat Sekolah	Sekolah	Gedung Unit	Ruang Kelas	Guru/Dosen	Murid/Siswa
NEGERI						
1	TK	1	1	2	7	54
2	SD Sederajat	416	844	5.064	3.756	78.373
3	SMP Sederajat	45	159	494	1.326	18.811
4	SMU Sederajat	17	60	215	616	8.742
5	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
SWASTA						
1	TK	89	89	178	293	1.901
2	SD Sederajat	7	13	38	40	1.706
3	SMP Sederajat	38	64	180	539	6.180
4	SMU Sederajat	36	83	4.115	724	5.518
5	Perguruan Tinggi	4	4	-	108	1.527
Jumlah Total			1.317	10.286	7.429	122.812
2004			688	4.196	5.866	123.008

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Dari data di atas terlihat, bahwa peran swasta di bidang pendidikan cukup signifikan, terutama kontribusinya pada pendidikan tingkat menengah ke atas.

Sementara itu untuk pendidikan dasar, di semua kecamatan didominasi oleh lembaga pendidikan negeri. Secara kuantitatif, jumlah murid Sekolah Dasar Negeri paling banyak berada di Kecamatan Sungkai Utara, kemudian Kotabumi Selatan, Bukit kemuning dan Bunga Mayang, sedangkan Sekolah Dasar Swasta urutan terbanyak adalah Kecamatan Kotabumi Selatan, Bunga Mayang, Bukit Kemuning dan Sungkai Utara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

BANYAKNYA MURID SD NEGERI & SWASTA MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jml	Pria	Wanita	Jml
1	Bukit Kemuning	2.154	2.634	4.788	107	136	243
2	Abung Tinggi	333	409	742	-	-	-
3	Tanjung Raja	1.692	2.069	3.761	48	59	107
4	Abung Barat	1.896	2.009	3.905	-	-	-
5	Abung Tengah	1.096	1.341	2.437	-	-	-
6	Kotabumi	3.045	3.722	6.767	-	-	-
7	Kotabumi Utara	1.843	2.254	4.097	-	-	-

8	Kotabumi Selatan	3.676	4.494	8.170	406	309	715
9	Abung Selatan	2.496	2.041	4.537	-	-	-
10	Abung Semuli	1.714	2.096	3.810	-	-	-
11	Abung Timur	1.316	1.610	2.926	-	-	-
12	Abung Surakarta	1.486	1.817	3.303	-	-	-
13	Sungkai Selatan	2.994	3.660	6.654	-	-	-
14	Bunga Mayang	2.159	1.765	3.924	273	296	569
15	Muara Sungkai	1.136	928	2.064	-	-	-
16	Sungkai Utara	9.145	7.343	16.488	36	36	72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Adapun yang mengambil jalur pendidikan dasar melalui Madrasah Ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta terbanyak di Kecamatan Sungkai Utara, disusul Kecamatan Kotabumi, Abung Selatan dan Kotabumi Selatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

BANYAKNYA MURID MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI & SWASTA MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jml	Pria	Wanita	Jml
1	Bukit Kemuning	-	-	-	249	223	472
2	Abung Tinggi	-	-	-	-	-	-
3	Tanjung Raja	-	-	-	120	112	232
4	Abung Barat	-	-	-	202	200	402
5	Abung Tengah	-	-	-	-	-	-
6	Kotabumi	308	274	582	68	59	127
7	Kotabumi Utara	-	-	-	90	63	153
8	Kotabumi Selatan	214	158	372	21	24	45
9	Abung Selatan	100	94	194	163	140	303
10	Abung Semuli	-	-	-	-	-	-
11	Abung Timur	-	-	-	101	101	202
12	Abung Surakarta	-	-	-	241	208	449
13	Sungkai Selatan	-	-	-	133	126	259
14	Bunga Mayang	-	-	-	17	12	29
15	Muara Sungkai	-	-	-	-	-	-
16	Sungkai Utara	234	235	469	382	360	742
Jumlah		856	767	1.617	1.787	1.628	3.415
2004		730	733	1.463	1.735	1.597	3.332

Sumber: Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara.

Penduduk yang mengambil pendidikan tingkat menengah pertama negeri di Lampung Utara, 75 % memilih Sekolah Negeri, sedangkan sisanya 25 % memilih jalur swasta. Sedangkan dari sisi animo, masyarakat yang memilih negeri terbanyak di Kecamatan Kotabumi yang mencapai 14,46 %, diikuti oleh Kecamatan Kotabumi Selatan dan Sungkai Utara. Sedangkan yang terkecil berasal dari Kecamatan Muara Sungkai yang hanya 0,53 %. Adapun masyarakat yang memilih swasta terbanyak di Kecamatan Kotabumi Selatan (24,56 %), selanjutnya diikuti Kecamatan Abung timur (12,50 %), Bunga Mayang (10,93 %), Abung Selatan (9,51 %), Abung Semuli (9,20 %) dan terkecil Sungkai Utara (1,9 %). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

BANYAKNYA PELAJAR SMP NEGERI & SWASTA MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Kecamatan	Negeri		Swasta			
		Pria	Wanita	Jml	Pria	Wanita	Jml
1	Bukit Kemuning	765	875	1.640	70	53	123
2	Abung Tinggi	245	260	505	-	-	-
3	Tanjung Raja	510	524	1.034	-	-	-
4	Abung Barat	394	480	874	192	186	378
5	Abung Tengah	409	344	753	83	88	171
6	Kotabumi	1.261	1.484	2.745	156	168	324
7	Kotabumi Utara	694	690	1.384	175	131	306
8	Kotabumi Selatan	947	1.177	2.124	805	688	1.493

9	Abung Selatan	513	599	1.112	289	299	588
10	Abung Semuli	609	602	1.211	182	287	569
11	Abung Timur	112	98	210	387	386	773
12	Abung Surakarta	268	367	635	66	74	140
13	Sungkai Selatan	661	688	1.349	96	110	206
14	Bunga Mayang	485	580	1.065	323	355	676
15	Muara Sungkai	52	49	101	140	169	309
16	Sungkai Utara	1.029	1.058	2.087	59	63	122
Jumlah		8.954	9.875	18.829	3.123	3.057	6.180
2004		8.987	9.228	18.182	2.959	2.847	5.806

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Sementara itu, masyarakat yang memilih pendidikan pertamanya di Madrasah Tsanawiyah Negeri hanya tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kotabumi (33,50 %), Kotabumi Selatan (39 %), dan Sungkai Utara (27,50 %). Sedangkan yang memilih Madrasah Tsanawiyah Swasta lebih banyak lagi yaitu Kecamatan Abung Selatan (19,57 %), sungkai Utara (12,72 %), Abung Surakarta (12,70 %), Sungkai Selatan (11,16 %), dan yang terkecil Kecamatan Abung Semuli (0,61 %), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

## TABEL

BANYAKNYA PELAJAR MTS NEGERI & SWASTA MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jml	Pria	Wanita	Jml
1	Bukit Kemuning	-	-	-	237	276	513
2	Abung Tinggi	-	-	-	-	-	-
3	Tanjung Raja	-	-	-	56	48	104
4	Abung Barat	-	-	-	125	135	260
5	Abung Tengah	-	-	-	72	73	145
6	Kotabumi	270	259	529	48	44	92
7	Kotabumi Utara	-	-	-	144	127	271
8	Kotabumi Selatan	355	267	622	34	36	70
9	Abung Selatan	-	-	-	492	460	952
10	Abung Semuli	-	-	-	22	8	30
11	Abung Timur	-	-	-	160	216	376
12	Abung Surakarta	-	-	-	308	310	618
13	Sungkai Selatan	-	-	-	240	303	543
14	Bunga Mayang	-	-	-	135	135	270
15	Muara Sungkai	-	-	-	-	-	-
16	Sungkai Utara	221	223	444	318	301	619
Jumlah		846	749	1.595	2.391	2.472	4.863
2004		696	679	1.375	2.405	2.316	4.545

Sumber: Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara.

Di tingkat Menengah Atas (SMU), tidak semua kecamatan penduduknya menempuh pendidikan negeri yaitu Abung Tinggi, Kotabumi, Abung Selatan, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sebaliknya, di kecamatan lain yang berpendidikan SMA Negeri adalah Kecamatan Kotabumi Selatan (30,89 %), Kotabumi Utara 10,18 %), Abung Semuli (9,99 %), Bukit Kemuning (9,85 %), Sungkai Utara (8,20 %), dan yang lain lebih kecil lagi prosentasenya. Ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
BANYAKNYA PELAJAR SMU NEGERI & SWASTA MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jml	Pria	Wanita	Jml
1	Bukit Kemuning	296	387	683	327	344	621
2	Abung Tinggi	-	-	-	-	-	-
3	Tanjung Raja	215	151	366	-	-	-
4	Abung Barat	259	357	616	32	25	57
5	Abung Tengah	137	115	252	50	63	112
6	Kotabumi	-	-	-	253	283	536
7	Kotabumi Utara	342	364	706	226	273	499
8	Kotabumi Selatan	916	1.226	2.142	959	1.228	2.187
9	Abung Selatan	-	-	-	148	169	317
10	Abung Semuli	329	264	693	-	-	-
11	Abung Timur	185	169	354	41	36	77



12	Abung Surakarta	61	84	145	-	-	-
13	Sungkai Selatan	187	221	408	-	-	-
14	Bunga Mayang	-	-	-	89	65	154
15	Muara Sungkai	-	-	-	-	-	-
16	Sungkai Utara	264	305	569	18	26	44
Jumlah		3.191	3.743	6.934	2.143	2.512	4.625
2004		3.168	3.721	6.889	2.029	2.182	4.211

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Selanjutnya, mereka yang menempun pendidikan menengah atas melalui jalur Madrasah Aliyah Negeri, hanya ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kotabumi dan Sungkai Utara. Sedangkan Madrasah Aliyah Swasta menjadi pilihan penduduk semua kecamatan, kecuali Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, dan Muara Sungkai. Lihat tabel berikut ini:

Tabel

**BANYAKNYA PELAJAR MADRASAH ALIYAH NEGERI & SWASTA MENURUT JENIS KELAMIN PER  
KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006-2007**

No	Kecamatan	Negeri		Jml	Swasta		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	Jml
1	Bukit Kemuning	-	-	-	228	318	546
2	Abung Tinggi	-	-	-	-	-	-
3	Tanjung Raja	-	-	-	-	-	-
4	Abung Barat	-	-	-	-	-	-
5	Abung Tengah	-	-	-	8	9	17
6	Kotabumi	386	448	834	69	55	124
7	Kotabumi Utara	-	-	-	27	39	66
8	Kotabumi Selatan	-	-	-	-	-	-
9	Abung Selatan	-	-	-	137	76	213
10	Abung Semuli	-	-	-	-	-	-
11	Abung Timur	-	-	-	37	43	80
12	Abung Surakarta	-	-	-	157	165	321
13	Sungkai Selatan	-	-	-	112	126	238
14	Bunga Mayang	-	-	-	40	45	85
15	Muara Sungkai	-	-	-	-	-	-
16	Sungkai Utara	165	200	365	67	71	138
Jumlah		551	648	1.199	882	948	1.830
2004		628	693	1.321	614	729	1.343

Sumber: Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara.

Adapun tingkat pendidikan tinggi, di Kabupaten Lampung Utara terdapat empat Perguruan Tinggi Swasta, STKIP Muhammadiyah, STIH Muhammadiyah, STIE Ratula, STMIK Surya Intan, dengan jumlah mahasiswa seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel

BANYAKNYA MAHASISWA MENURUT SEMESTER  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2007

No	Nama Perguruan Tinggi	Semester								Jml
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	STKIP MUHAMMADIYAH	-	98	-	168	-	236	-	-	502
2	STIH MUHAMMADIYAH	-	130	-	104	-	179	-	-	413
3	STIE RATULA	-	23	-	78	-	97	-	-	198
4	STMIK SURYA INTAN	87	85	55	55	66	66	-	-	414
		87	336	55	405	66	578	0	0	1.527

Di bidang kesehatan, di seluruh kecamatan se Lampung Utara sudah terjangkau layanan medis, berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), baik Puskesmas Induk maupun Puskesmas Pembantu, termasuk Balai Pengobatan/ Rumah Bersalin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan sosial masyarakat sudah cukup maju. Secara riil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

**JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 -2007**

No	Kecamatan	Jenis Puskesmas				Jml
		Perawatan	Induk	Pembantu	BP/RB ORKES	
1	Bukit Kemuning	1	1	2	2	6
2	Abung Tinggi	-	1	3	-	4
3	Tanjung Raja	-	1	4	-	5
4	Abung Barat	-	1	5	2	8
5	Abung Tengah	-	1	5	-	6
6	Kotabumi	-	1	6	5	12
7	Kotabumi Utara	-	1	5	3	9
8	Kotabumi Selatan	-	2	5	8	15
9	Abung Selatan	-	2	10	7	19
10	Abung Semuli	-	1	4	-	5
11	Abung Timur	-	1	7	-	8
12	Abung Surakarta	1	1	3	-	5
13	Sungkai Selatan	-	2	4	-	6
14	Bunga Mayang	-	1	3	1	5
15	Muara Sungkai	-	1	2	-	3
16	Sungkai Utara	1	1	6	4	14
	Jumlah	3	21	74	32	130
	Januari 2004	3	18	73	29	123

Secara sosio ekonomi, mayoritas penduduk Kabupaten Lampung Utara bermatapencaharian sebagai petani, baik di lahan sawah maupun lahan kering. Rasio perbandingan antara jumlah kepala keluarga tani dengan ketersediaan lahan sangat beragam. Namun jika diambil rata-rata dari seluruh kecamatan, tersedia lahan 5,12 ha untuk setiap kepala keluarga. Lihat tabel berikut:

**TABEL**  
**JUMLAH KEPALA KELUARGA TANI DAN LUAS TANAH MENURUT JENISNYA**  
**PER KECAMATAN TAHUN 2006-2007**

No	Kecamatan	Kep. Kel.	Jenis Lahan (Ha)			Lahan /KK
			Sawah	Kering	Jumlah	
1	Bukit Kemuning	1.012	263	11.235	11.498	11,36
2	Abung Tinggi	1.844	477	16.108	16.585	8,99
3	Tanjung Raja	2.800	705	30.823	31.528	8,99
4	Abung Barat	2.843	408	10.845	11.253	4,05
5	Abung Tengah	3.646	1.265	15.739	17.004	4,66
6	Kotabumi	936	203	5.861	6.064	6,47
7	Kotabumi Utara	2.493	537	8.530	9.067	3,63
8	Kotabumi Selatan	1.496	163	10.259	10.422	6,96
9	Abung Selatan	3.860	1.349	33.235	34.584	8,95
10	Abung Semuli	2.646	1.735	10.035	11.770	4,50

11	Abung Timur	3.743	3.321	8.062	11.383	3,04
12	Abung Surakarta	6.613	2.457	7.726	10.183	1,53
13	Sungkai Selatan	3.879	624	18.636	19.260	4,96
14	Bunga Mayang	2.908	595	14.384	14.979	5,15
15	Muara Sungkai	2.389	802	14.727	15.529	6,50
16	Sungkai Utara	4.608	268	13.304	13.572	2,94
	Jumlah	47.716	15.172	229.509	244.681	5,12
	2004	47.716	14.204	267.749	281.953	5,9

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara.

### 3. Kehidupan Sosial Politik.

Sebagai kabupaten lain di Indonesia, partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Lampung Utara cukup signifikan. Semua partai politik peserta pemilu telah memiliki cabangnya di kabupaten ini, kendati keterwakilan partai politik di DPRD nampak didominasi tiga partai besar: Golkar, PDIP dan PKS, sedangkan partai yang lain bergabung dalam wadah Fraksi Pembaharuan. Hal ini dapat dilihat pada komposisi dan personalia serta jumlah anggota menurut komisi dan fraksinya, sebagai berikut:

Tabel

KOMPOSISI DAN PERSONALIA SERTA JUMLAH ANGGOTA MENURUT KOMISI DAN FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2007

No	Komisi/ Bidang	Fraksi/ Orang				
		PDIP	GOLKAR	PKS	PEMBAHARUAN	JML
1	Komisi A Pemerintahan	1	3	1	5	10
2	Komisi B Pertanian & Industri	2	2	1	6	11
3	Komisi C Keuangan & Ekonomi	2	2	1	6	11
4	Komisi D Pembangunan	1	3	1	5	10
5	Pimpinan Dewan/ Koordinator	1	1	1	-	3
	JUMLAH	7	11	5	22	45

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara

Begitu pula dengan banyaknya anggota DPRD menurut jenis kelamin didominasi oleh Partai Golkar (11 orang), PDIP (7 orang), PKS (5 orang) dan fraksi Pembaharuan (22 orang).

Tabel

BANYAKNYA ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA MENURUT JENIS KELAMIN DAN  
KOMPOSISI KEANGGOTAAN TAHUN 2006-2007

No	Komposisi Keanggotaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Fraksi PDIP	6	1	7
2	Fraksi Partai Golkar	8	3	11
3	Fraksi Pembaharuan	20	2	22
4	Fraksi PKS	5	-	5
	Jumlah	39	6	45
	2004	39	6	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara



## BAB IV

# DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

### **A. Budaya Lampung Yang Masih Fungsional dan Disfungsional**

Suku Lampung merupakan etnis pribumi yang selama berabad-abad telah membangun system kehidupan sosial tertentu yang dicirikan oleh keunikan tradisi adat budaya lokalnya yang cukup menarik. Keunikan dan kekhususan budaya Lampung antara lain tercermin dalam keunikan bahasa dan tulisan (aksara) yang telah digunakan sejak adanya suku (etnis) itu sendiri. Disamping memiliki bahasa, etnis Lampung juga mempunyai Nilai-nilai budaya yang bersifat normative, Filsafat dan etika sosial yang bersumber dari nilai-nilai budaya, serta system dan tata pergaulan yang merupakan tuntunan dalam berinteraksi dalam hubungan antar pribadi, keluarga, antar kelompok secara internal maupun dalam hubungan dengan pihak lain di luar etnis lampung.

Kebudayaan Lampung dalam realitasnya berwujud tiga hal pokok, *pertama*, berupa wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. *Kedua*, berupa kebudayaan yang berwujud kompleks aktifitas kelakuan berpola yang terimplementasi dalam interaksi Sosial, dan *ketiga* kebudayaan sebagai hasil kreasi dan kreatififitas baik berwujud benda-benda maupun non-benda (non-materi). Pengkategorian ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Koencaraningrat (1987

: 5). Selanjutnya untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan pemahaman terhadap realitas kebudayaan yang ditemukan di lapangan, kebudayaan orang Lampung diuraikan dalam bentuk : Bahasa, Seni Budaya, Budaya keagamaan, Nilai-nilai budaya dan tata kelakuan dalam bentuk etika sosial sebagai implementasi dari nilai-nilai budaya yang dianut, serta system kekuasaan yang berbentuk lembaga adat.

## **1. Bahasa Lampung.**

Bahasa Lampung merupakan bahasa (alat) komunikasi dalam pergaulan antar masyarakat (etnis) Lampung dalam kehidupan sehari-hari dan pada moment-momen tertentu yang bernuansa tradisi. Dikalangan masyarakat Lampung yang tinggal disebuah wilayah yang penduduknya masih relatif homogen (baik dikawasan pedesaan maupun perkotaan), maka bahasa Lampung dipakai sebagai bahasa pergaulan sehari-hari (seperti yang dilakukan oleh masyarakat Lampung pubian di Desa Negeri Sakti, Kurungan nyawa, Suka Banjar Gedong Tataan Lampung Selatan, Negara Batin Natar, demikian juga pada masyarakat Pesisir Desa Hanau Berak, Punduh, Bawang, kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan., Masyarakat lampung yang tinggal sepanjang wilayah Pesisir Krui Lampung Barat, dan masyarakat Lampung yang tinggal disepanjang Pesisir kota Agung Tanggamus).

Namun dikalangan masyarakat Lampung yang tinggal di wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang secara etnis terbilang majemuk, maka bahasa Lampung hanya dipakai sebagai alat komunikasi di kalangan anggota keluarga, dan menurut Zulkifli, orang Lampung yang tetap menjaga keberadaan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi sesama anggota keluarga ditengah masyarakat yang majemuk, jumlahnya tergolong minoritas ditengah orang Lampung, dan lebih banyak yang tidak terlalu mempersoalkan ketidak mampuan anggota keluarga

untuk berkomunikasi dalam bahasa Lampung sekalipun mereka adalah orang Lampung asli yang seharusnya merasa berkewajiban untuk mempertahankan keberadaan bahasa Lampung. hanya sesekali orang Lampung berkomunikasi dalam bahasa Lampung. Dikawasan yang majemuk seperti itu bahasa Lampung jarang terdengar dipakai ditempat-tempat umum, seperti di Pasar, masjid, kantor, dan lain-lain. Menurut seorang informan hal ini terjadi karena dorongan keinginan untuk tetap menjalin keakraban dan hubungan baik dengan mereka yang tidak mengerti bahasa Lampung, disamping rasa kepemilikan orang Lampung terhadap bahasa etnisnya juga tidak sebagaimana yang ada pada etnis lain.<sup>65</sup>

Disamping sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa Lampung juga digunakan sebagai bahasa formal pada acara-acara yang bernuansa tradisi, seperti upacara perkawinan yang sekaligus berfungsi sebagai upacara pemberian gelar (*juluk dan adok*), pada acara dimana para penyelenggara dan masyarakat yang terlibat dalam acara tsb. dituntut untuk berbahasa Lampung, Bahasa tutur yang dipakai dalam pemberian gelar (*juluk dan adok*) adalah bahasa Lampung yang telah dirangkai dalam struktur sastra (tulisan maupun lisan) yang sarat dengan muatan pesan-pesan atau misi (Abadi, tokoh adat Pubian), sekalipun orang yang doberi gelar adat tsb (*juluk dan adok*) ada yang bukan dari suku Lampung.

Bahasa Lampung juga masih dijadikan alat komunikasi sehari-hari dikalangan masyarakat Lampung komunitas perkotaan dalam lingkungan etnis Lampung yang relative homogen, seperti pada masyarakat Labuhan Ratu yang berasal dari suku Lampung adat Abung, masyarakat Pengajaran yang berasal dari suku Lampung adat Pesisir, demikian juga masyarakat Raja Basa dan Gedong Meneng yang berasal dari adat Pubian, Hal yang sama

---

<sup>65</sup> Effendi Sanusi, punyimbang masyarakat adat Lampung pepadun (Abung).

juga dilakukan oleh masyarakat Lampung yang tinggal di daerah Pakuon teluk Betung, yang mayoritas berlatar belakang etnis Lampung Pesisir.

Realitas diatas disamping mengindikasikan masih eksisnya bahasa Lampung sebagai unit kebudayaan orang Lampung, juga mengindikasikan rendahnya rasa kepemilikan orang Lampung terhadap unit kebudayaan yang berbentuk bahasa. Sekalipun fenomena semacam itu hanya dapat disimpulkan pada masyarakat lampung yang tinggal dikawasan perkotaan yang telah mengalami interaksi dengan berbagai kalangan masyarakat yang majemuk. Dan hal demikian tidak terlihat dikawasan pedesaan yang masih homogen (beretnis lampung). Indikasi rendahnya rasa kepemilikan terhadap budaya Lampung ini juga nampak pada upaya pewarisan Budaya Lampung.

Pewarisan bahasa Lampung dikalangan warga etnis Lampung dilakukan baik secara setruktural maupun kultural. Secara structural dimaksud bahwa pewarisan bahasa dilakukan secara formal, melalui program kurikulum sekolah.<sup>66</sup> Sedangkan secara cultural dimaksud bahwa pewarisan bahasa Lampung dilakukan oleh orang-orang tua kepada anak dan keturunannya sejak kecil.

Dikalangan masyarakat Lampung yang tinggal di Pedesaan atau dikawasan dimana orang Lampung masih homogen, maka perwarisan bahasa Lampung terjadi secara alamiah, dimana bahasa Lampung memang dijadikan sebagai bahasa komunikasi utama, dan dipakai sejak masa kanak-kanak. Akan tetapi dikalangan orang Lampung ysng menetap di kawasan perkotaan, maka pewarisan bahasa Lampung mengalami kendala. Sekalipun demikian dikalangan sebagian kecil orang Lampung, bahasa

---

<sup>66</sup> Meskipun bahasa Lampung telah masuk menjadi muatan local kurikulum sekolah (khususnya SD), namun bahasa Lampung tetap belum dikuasai secara aktif (alat komunikasi) oleh mereka yang telah mempelajarinya melalui kegiatan belajar di sekolah, hal ini mengindikasikan bahwa pengajaran bahasa daerah (Lampung ) melalui program pendidikan formal belum sepenuhnya efektif.

Lampung tetap dipergunakan sebagai bahasa komunikasi keluarga, seperti yang dilakukan oleh Bapak Effendi Sanusi, Tokoh Masyarakat Pepadun/adat Lampung Abung. Menurutnya “Sebagai orang Lampung ia merasa berkewajiban untuk mewariskan bahasa Lampung sampai kepada anak cucu, karena itu ia selalu membiasakan selauruh anggota keluarga yang tinggal bersamanya untuk menggunakan bahasa ini sebagai alat komunikasi keluarga”.

## **2. Seni budaya**

Seni budaya Lampung yang kini masih eksis dalam kehidupan masyarakat etnis Lampung terdiri dari seni Tari, Seni Musik, Seni sastra, Seni tenun dan seni ukir. Seni sastra Lampung umumnya berbentuk sastra lisan baik dalam bentuk cerita rakyat, pribahasa maupun pantun. Cerita rakyat masih berkembang ditengah sebagian masyarakat Lampung, dalam bentuk dongeng, legenda dan mite. Masyarakat Lampung menggala misalnya mengenal dan memahami cerita *Radin jambat Hangkirat*. Sastra lisan Lampung yang dirangkai dalam bentuk pantun khususnya masih aktif dipakai dalam prosesi perkawinan, terutama pada prosesi pemberian gelar yang dilakukan dalam acara-acara perkawinan (*butetah* menurut adat Pesisir, dan *pepancokh* menurut adat pepadun). Dikalangan orang Lampung yang beradat *Pepadun*, pemakaian dan pewarisan sastra lisan dilakukan terutama dalam melaksanakan prosesi perkawinan, yang umumnya masih menyertakan prosesi adat. Hal yang demikian juga masih ditemukan pada masyarakat Lampung beradat Pesisir. Hanya saja intensitas pemakaian dan pewarisan sastra lisan pada kedua kelompok masyarakat Lampung ini berbeda. Orang Lampung *pepadun* nampak lebih intens memakai, mendengar dan memahami sastra lisan Lampung dibandingkan dengan masyarakat Pesisir. Hal ini karena prosesi adat yang menyertakan sastra lisan Lampung hanya dilakukan dalam

kesempatan pemberian gelar kebesaran adat (*juluk* dan *adok*), Pemberian *juluk* dan *adok* pada masyarakat ber-adat pepadun bisa dilakukan pada semua orang, sedangkan pada masyarakat beradat Pesisir hanya dilakukan terhadap keturunan *punyimbang* (elit adat), tokoh adat (*punyimbang*) menyampaikan gelar yang diberikan dalam tutur bahasa sastra yang dituangkan dalam pantun-pantun berbahasa Lampung. Secara teknis menurut Sohor, seorang *punyimbang* masyarakat adapt Pubian, pada pelaksanaan pemberian gelar (*juluk* dan *adok*), sang *punyimbang* menyampaikan gelar yang diberikan dalam rangkaian tutur kata yang telah terangkai dalam syair-syair yang penuh pesan.

Sementara seni musik tradisional masih ditemukan terutama pada masyarakat Lampung yang tinggal di kawasan pedesaan yang homogen. Wujud seni musik Lampung berbentuk seni tabuh Rebana dan tala), seni petik (Gitar dan gambus) seni tiup (seruling dan *Serdam*). Seni Musik berupa musik Rebana misalnya, dipakai oleh masyarakat adat Pesisir Krui dalam bentuk Seni *Bedikir* (berdzikir), yang biasanya ditabuh mengiringi pembacaan kitab Barzanji, yang dilantunkan dengan suara dan lagu yang khas. Pembacaan *Badikir* ini dilakukan pada acara-acara perkawinan, khitanan, Aqiqah menyambut kelahiran bayi dll. Pada masyarakat Pepadun rebana dan tala (*gulintang*) biasanya dipakai mengiringi dan mengarak pasangan pengantin.

Sementara Seruling, *serdam* dan musik Gambus pada umumnya dipakai oleh masyarakat Pesisir Kota Agung Tenggamus dan Way Lima Kedondong Pada kedua komunitas ini masih banyak dijumpai anak-anak remaja maupun orang tua yang mampu memainkan alat musik ini dengan baik, untuk mengiringi lagu-lagu etnis Lampung baik dilakukan secara individual (*solo*) maupun dalam kelompok (*group*).

Seni Tari tradisional semakin jarang dipakai. Momen-momen yang bernuansa adat semakin jarang mempertunjukkan tarian tradisional, kecuali pada masyarakat Lampung Pepadun.

Pada komunitas lampung ini masih sering dijumpai tari *cangget*, khususnya pada masyarakat Pepadun beradat *abung*, dimana salah satu mata acara tradisional yang dilalui dalam acara perkawinan adalah *Cangget agung*, dimana tari *cangget* dipertunjukkan oleh muda-mudi. Dikalangan komunitas Lampung beradat Saibatin masih ditemukan beberapa jenis tari, sekalipun semakin jarang dipertunjukkan sehingga berpengaruh pula terhadap minat generasi muda untuk mempelajarinya. Dikalangan masyarakat Pesisir masih terdapat jenis tari *Nyambai* yang hanya dipertunjukkan pada acara-acara perkawinan, khususnya acara resepsi perkawinan keluarga *punyimbang* (pemimpin adat). Dikalangan komunitas Saibatin Kota Agung masih sering dipertunjukkan tari *Ngedalung*, terutama pada resepsi pernikahan (*Nayuh*) para *punyimbang* adat yang sudah mencapai kedudukan adat '*Pangiran*'.

Seni tari Lampung yang intens dipertunjukkan dalam acara-acara pernikahan maupun pada seremoni-seremoni formal adalah seni tari yang bernuansa modern dan merupakan kreasi baru perpaduan dari tari tradisional Lampung dan tari tradisional etnis lain yang ada di Lampung.

Jenis seni khas masyarakat Lampung yang mulai dikenal secara Nasional bahkan Internasional, dan kini mulai menjadi komoditas komersial adalah seni tenun, khususnya berupa seni tenun Kain *Tapis*, menurut Sukarni, di daerah asalnya sendiri (Pulau Pisang), kain tapis sudah tidak ditekuni sebagai komoditas komersial, karena biaya produksi yang cukup mahal dan kendala pemasaran.<sup>67</sup> Namun sekalipun tidak menjadi jenis seni yang ditekuni oleh komunitas masyarakat Lampung, seni tenun jenis ini sudah ditekuni dan dikembangkan oleh masyarakat perkotaan, bahkan diluar wilayah Lampung.

---

<sup>67</sup> Sukarni, *punyimbang masyarakat lampung Pesisir marga Pulau Pisang Krui, Lampung Barat*.

Sementara seni ukir, saat ini hanya dipakai kalangan yang terbatas, seperti pada arsitektur rumah para *punyimbang* (kepala adat) berupa *lamban balak* maupun *nuwo balak*, dan masyarakat Lampung yang memiliki konsen dan kemampuan ekonomi, hal ini karena seni ukir ini disamping sulit juga membutuhkan biaya yang tinggi (Faisal, tokoh masyarakat Kota Agung).

Tradisi Lampung asli juga terlihat pada beberapa aktifitas Sosial ekonomi. Pada acara perkawinan tradisi Lampung bukan hanya diimplementasikan dalam bentuk pemakaian busana adat dan pernik-pernik yang dipakai, tetapi juga dengan melakukan pemberian gelar (*juluk/adok*), pemakaian ketentuan adat dalam pelaksanaan prosesi perkawinan ini khususnya terlihat masih ketat pada masyarakat adat *pepadun* dan terlihat longgar pada masyarakat adat Pesisir.

### 3. Sistem religi (keagamaan tradisional)

Unsur budaya Lampung asli juga nampak dalam praktek-praktek religi (keagamaan) yang menyertai berbagai kegiatan hidupan masyarakat. Pada aktifitas ekonomi (khususnya pertanian), prosesi religious tradisional masih banyak dipakai oleh masyarakat Lampung terutama yang tinggal diwilayah pedesaan. Di Pedesaan Krui misalnya masih dijumpai tradisi *Ngumbai* (pemotongan hewan berupa kambing maupun ayam untuk dipersembahkan kepada penguasa alam dengan tujuan agar hasil pertanian meningkat), demikian juga *tradisi ngebabali* (berupa penyerahan hidangan kepada penguasa atau roh-roh yang menghuni suatu lahan dengan tujuan agar terhindar dari gangguan).

Menurut arsyad,<sup>68</sup> “Kedua tradisi itu umumnya dilakukan ketika membuka lahan pertanian, mulai menghuni tempat tinggal yang baru, serta pada setiap musim tanam dan menghadapi

---

<sup>68</sup> Arsyad, tokoh agama di Pesisir Krui lampung Barat.



panen". Dan dikalangan masyarakat Lampung yang menggantung kan kehidupannya dari hasil laut (berprofesi sebagai nelayan) terdapat tradisi *ngumbai lawok*, dalam bentuk upacara pemberian sesaji untuk kekuatan yang dipercayai menguasai laut sehingga diharapkan terjauh dari bencana laut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Pemberian sesaji ini dilakukan setiap tahun, berupa kepala seekor kerbau yang besar.<sup>69</sup>

#### 4. Etika Pergaulan (Sosial)

Dalam pergaulan sehari-hari, baik sesama anggota masyarakat yang berasal dari etnis Lampung maupun terhadap etnis lain, etika sosial yang bersumber dari nilai-nilai budaya Lampung masih dipakai. Nilai-nilai budaya yang menjadi sumber etika Sosial adalah *Pi'il Pesinggiri*, berupa *Sakai Sambaian*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, serta *Bejuluk Beadek (Buadok)*. Menurut Ali Imron,<sup>70</sup> secara sederhana *Piil Pesinggiri* dapat diartikan sebagai harga diri orang lampung yang didasarkan atas perilaku yang baik, sifat berjiwa besar, memahami posisi dan tanggung jawab diri dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. *Piil Pesinggiri* selanjutnya diimplementasikan dalam nilai *Sakai Sambaian*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur* dan *Bejuluk Beadek (Buadok)*. *Sakai Sambaian* adalah nilai budaya yang mengharuskan orang Lampung untuk memiliki jiwa gotong royong dan jiwa sosial, serta tidak mengenal pamrih. Nilai budaya ini diimplementasikan dalam bentuk sikap dan kebiasaan saling membantu baik dalam mewujudkan kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, menghadapi bencana yang menimpa seseorang atau keluarga, maupun dalam acara-acara seremonial. Kebiasaan bergotong royong terutama masih mencolok pada masyarakat

---

<sup>69</sup> Acara *Ngumbai lawok* ini sekarang sudah dijadikan sebagai komoditas pariwisata yang dilakukan secara seremonial untk menarik minat wisata asing berkunjung ke kawasan wisata pantai Lampung Barat.

<sup>70</sup> Budayawan dan sekaligus peneliti budaya Lampung.

Lampung yang tinggal di Pedesaan. Pada masyarakat Padang Cermin misalnya, kebiasaan saling membantu dilakukan dalam aktifitas pertanian, perwujudan kebutuhan hidup seperti membangun rumah (*butegak*), pelaksanaan pesta perkawinan, dan pada saat menghadapi musibah (*kecadangan*). Meskipun kebiasaan bergotong royong (*Sakai Sambayan*) masih sangat kental terlihat pada masyarakat Lampung, namun serbuan modernisasi yang menawarkan kehidupan yang serba praktis dan efisien, baik biaya, waktu dan tenaga, telah sedikit banyak mempengaruhi nilai-nilai kegotong royongan yang selama ini hidup dalam kepribadian orang Lampung. Seperti diungkapkan oleh Ismail bahwa budaya gotong royong itu sedikit demi sedikit telah terkikis. “Beberapa waktu yang lalu dalam mewujudkan keperluan pesta pernikahan misalnya, hampir semua pekerjaan dilakukan dengan cara bergotong royong (*sakai sambayan*), baik dalam kegiatan *tandang* (mewujudkan keperluan pesta perkawinan yang bahannya berada di hutan seperti daun untuk membungkus kue), *melawai* (mencari ikan untuk keperluan pesta), *nyani kubu* (mendirikan tarup), sampai *ngebungkar kubu* (membongkar tarup)”. Budaya *Sakai Sambayan* juga terancam oleh perubahan lingkungan alam yang menyebabkan perubahan sikap budaya. Dalam hal tersebut perubahan terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan alam. Dalam membuat rumah tempat tinggal sebagai salah satu keperluan hidup, budaya saling membantu dan bergotong royong sudah semakin berkurang. Seperti diungkapkan Bustama, seorang tokoh masyarakat Pesisir Padang Cermin“ Dulunya gotong royong dilakukan sejak menurunkan kayu dari hutan (lewat aliran sungai) yang disebut *Buanyut*, mendirikan tiang-tiang rumah sampai memasang atap (genteng) yang disebut *butegak*, namun sekarang karena semakin mahal dan langkanya kayu, beberapa bahan rumah tidak lagi terbuat dari kayu, saling membantu dalam membuat rumah tinggal hanya dalam memasang atap rumah (kap)

sampai memasang genteng”. Demikian juga yang terjadi dalam aktifitas pertanian, budaya efisiensi waktu dan tenaga telah menggantikan kebiasaan *sakai sambayan* (*belin*, menurut bahasa Pesisir), seperti penuturan Arsyad, “Saling tolong menolong antar sesama petani saat ini hanya pada saat menanam (*nanom*) dan panen (*ngegetas*) padi. Padahal dulunya yang tidak dilakukan dengan bergotong royong hanya saat memupuk dan menyiangi rumput (*nyalau*). masyarakat saling membantu baik pada tahap megolah tanah (dengan memakai kerbau/*buakhoh*), menanam padi, dan pada saat panen dimana sesama petani saling membantu dalam memotong padi (*ngegetas*)”. Unsur Piil Pesiinggiri dalam bentuk *Sakai Sambaian* juga dipraktikkan pada saat emnghadapi musibah, baik peristiwa sakit, bencana alam maupun bencana kematian. Kebiasaan yang telah turun temurun dikalangan masyarakat Lampung, bahwa kalau ada yang mendapat musibah sakit, terkena bencana maupun ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, maka tanpa koordinasi masyarakat akan mengadakan *hiogh sumbay*, berupa kegiatan mengumpulkan sumbangan dalam bentuk beras, bahan sayur-mayur, ayam, kentang maupun dalam bentuk uang, untuk diberikan kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah.

Nilai budaya Lampung juga mengajarkan kepada penganutnya untuk bersikap sopan santun, terbuka, terhadap sesama manusia dengan penuh ketulusan. *Nemui Nyimah* menjadi sumber motivasi untuk berperilaku baik terhadap orang lain atau pendatang (*temui* yang berarti tamu ).Demikian juga sikap menghormati, menyambut dan menjamu tamu (*temui*) yang datang berkunjung ke rumah kediaman keluarga Lampung. Menurut Effendi Sanusi, “Orang Lampung merasa sebuah keharusan untuk menyambut dan memberikan jamuan secara maksimal kepada tamu yang datang. Karena itu merupakan kebiasaan orang Lampung untuk tidak melepas seorang tamu pergi meninggalkan rumah sebelum tamu tsb. dipersilahkan

untuk terlebih dahulu makan, dan minimal menikmati hidangan yang telah disediakan, sekalipun dalam bentuk yang sederhana”. Demikian juga ketika bertamu, bagi orang Lampung yang masih memegang teguh ketentuan adat Lampung, terasa kurang pantas untuk berkunjung (bertamu) ke rumah seseorang tanpa membawa sesuatu sebagai oleh-oleh sekalipun sederhana. Dan menurut Syu'eb (orang Lampung Pubian), sikap seperti itu dilakukan baik kepada orang yang diketahui memang berasal dari etnis Lampung maupun dari etnis lain”. Sikap pergaulan yang demikian, kemungkinan telah menjadi modal berharga bagi orang Lampung untuk berinteraksi dan menerima kehadiran orang lain (*the others*) dari luar marga, suku bahkan dari luar etnisnya. Sekalipun pada sisi lain implementasi nilai budaya *nemui nyimah* tanpa dilandasi dengan pemahaman yang benar dan fleksibel, akan mengundang sikap inefisien (prilaku boros). Namun demikian, Dalam realitasnya nilai budaya ini telah menjadi salah satu sumber motivasi untuk bersikap terbuka (*welcome*) terhadap kehadiran orang lain dari kelompok yang tidak terbatas. Karena sikap yang ditunjukkan oleh orang Lampung seperti itu, maka dalam kenyataan sosial yang terlihat bahwa ditengah lingkungan pemukiman orang lampung yang terbilang homogen sesara etnis sekalipun, ada penduduk yang berlatar etnis lain yang bisa hidup dengan harmonis dalam suasana keakraban dan persaudaraan. Perbedaan suku dan asal muasal nampaknya tidak menjadi sebuah penghalang bagi masyarakat etnis Lampung untuk saling terbuka, saling mengunjungi dan membina hubungan antar pribadi, antar keluarga dan hubungan Sosial.

Disamping itu secara normatif Orang Lampung dituntut oleh Filsafat sosial yang menjadi tuntunan dalam pergaulannya untuk bergaul dengan baik dikalangan masyarakat luas (*Nengah Nyappur*), tanpa membedakan suku, budaya, status sosial dan lain-lainnya, dengan tetap menjaga martabat dan kehormatan diri (*pi'il Pesinggiri*). Orang Lampung dituntut untuk *nengah* (bergaul)

dan Nyappur (berbaur) untuk dapat memperoleh dan memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran, mendapatkan inspirasi dan melahirkan inisiatif, ide dan pendapat, untuk memperoleh kemanfaatan dan mencapai dinamika kehidupan dalam tingkat yang maksimal.

Keempat nilai-nilai budaya yang menjadi prinsip pokok yang mendasari sikap dalam interaksi sosial diatas menjadi panduan etis untuk mencapai martabat dan kehormatan diri (*Piil Pesinggiri*), baik secara individual maupun kelompok. Nampaknya harga dan martabat diri dalam perspektif budaya Lampung indikasinya adalah pada kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dan saling memberi kontribusi dan kemaslahatan dalam hubungan sesama anggota masyarakat bahkan sesama manusia. Pada akhirnya, konfigurasi individu yang menjaga martabat yang tergambar diatas, akan membentuk komunitas yang diliputi harmonitas sosial.

## 5. Lembaga (Kekuasaan) Adat

Dalam tatanan kehidupan Sosial, masyarakat adat Lampung memiliki struktur kepemimpinan adat yang baku dan melembaga, yang dijadikan sebagai panutan dan penjaga stabilitas dalam komunitas adapt. Menurut Bunyana,<sup>71</sup> Struktur kepemimpinan lembaga adat Lampung secara hirarkis melambangkan 4 unsur pokok pemerintahan adat secara turun temurun, yang menggambarkan tekad dan semangat kebersamaan yang terefleksi dalam symbol *Panji pak sekala Bekhak*. Simbol diatas bermakna tegaknya kepemimpinan masyarakat dengan empat unsur penyangga. Seorang pemimpin pemerintahan adat, keberadaan dan posisinya bisa dan diakui apabila didukung oleh minimal empat perwakilan secara berjenjang.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Budayawan dan peneliti Budaya Lampung, dosen IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

<sup>72</sup> Seorang pemimpin adat yang disebut Sebatin menjadi sah dan diakui bila telah mempunyai empat orang raja pada struktur kekuasaan dibawahnya, begitu juga raja (struktur kekuasaan

Meskipun struktur pemerintahan adat Lampung memiliki aturan hirarki yang ketat, namun peran sosial maupun politiknya semakin sempit. Peran lembaga adat pada masyarakat Lampung saat ini ada pada wilayah yang semakin terbatas, seperti pada prosesi perkawinan dengan seluruh tahapannya, penentuan pemberian gelar (*juluk/adok*). Sementara dalam pemerintahan desa Lembaga adat seringkali dipakai semata-mata sebagai pemberi justifikasi. Ini bisa dipahami jika melihat kultur masyarakat (termasuk orang Lampung) yang belum lepas dari *paternalisme*, sekalipun dalam kadar yang berbeda dibandingkan dengan kelompok masyarakat dengan latar etnis dan budaya lain. Paternalisme ini juga yang menjadi penyebab mengapa eksistensi lembaga adat masih tetap diakui dan memperoleh tempat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Lampung. Namun seperti diungkapkan diatas bahwa seiring dengan perubahan system Sosial politik yang terjadi, peran lembaga adat semakin terposisi dalam wilayah yang semakin sempit (*termarginalisaasi*). Lembaga kekuasaan adat terutama sudah tidak lagi secara formal memiliki porsi otoritas politik. Seperti dituturkan oleh Isma'il, "Dalam proses pemilihan kepala desa misalnya, calon-calon yang ingin maju dalam pemilihan biasanya terlebih dahulu meminta restu dan persetujuan dari Pemangku adat, bahkan pada kasus tertentu mereka yang mendapat dukungan penuh dari para punyimbang (*elit lembaga adat*) biasanya yang akan mendapat dukungan yang luas". Kedudukan dan posisi punyimbang adat yang masih memperoleh tempat dalam kehidupan masyarakat Lampung, pada saat tertentu juga rawan menjadi objek politisasi yang melahirkan konflik. Seperti dalam peristiwa politik Pemilihan pimpinan daerah, para punyimbang dijadikan "alat" untuk meraih dukungan dan perolehan suara. Seorang informan menceritakan bahwa di salah satu desa ada konflik yang terjadi berkepanjangan karena

---

dibawah sebatin), diakui keabsahannya bila telah memiliki empat orang raden pada struktur kekuasaan dibawahnya, dan berlaku sterusnya.

perbedaan pendapat dan pilihan dalam memilih kepala desa, dan peran *punyimbang* dalam hal tersebut sangat besar. Konflik antar kelompok masyarakat di desa itu mengikuti konflik antar *punyimbang*.

Sekalipun lembaga (kekuasaan) adat ini semakin mengalami marginalisasi peran, namun realitasnya ia tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepemimpinan kultural yang eksistensinya masih diterima masyarakat. Posisi struktur kekuasaan adat yang masih melembaga dan memperoleh pengakuan di tengah komunitasnya ini, merupakan sebuah modal budaya untuk menjaga kohesivitas di kalangan masyarakat yang masih cenderung paternalistik. Ini karena lembaga ini dapat memerankan diri dan difungsikan sebagai faktor penjaga stabilitas di tengah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan politik formal.

## **B. Budaya Lampung Dalam Meredam Konflik Sosial**

### **1. Implementasi Falsafah *Piil Pesinggiri***

#### **a. *Sakai Sambayan***

Dari data yang terungkap pada sub-bab diatas terlihat bahwa budaya saling membantu masih menyatu dalam sikap hidup dan pergaulan sosial masyarakat Lampung, baik dalam mewujudkan kebutuhan hidup sehari-hari, pembangunan sarana Sosial, maupun dalam acara-acara seremonial yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Bahkan menurut seorang informan<sup>73</sup>, Orang Lampung biasanya merasa malu jika tidak terlibat dalam kegiatan yang bernuansa sosial sekalipun hanya dalam kadar yang tidak memadai (sekedarnya). Dan dalam prakteknya anggota masyarakat (etnis Lampung) yang dinilai jarang terlibat dalam kegiatan yang bernuansa gotong royong, atau kurang memiliki kepedulian sosial akan memperoleh sanksi sosial dari masyarakat

---

<sup>73</sup> Effendi Sanusi, tokoh masyarakat Lampung Pepadun (Abung).

lingkungannya. Jika sewaktu-waktu dia sendiri mempunyai hajat (acara besar) yang melibatkan masyarakat ramai, biasanya masyarakat merasa tidak merasa memiliki keharusan untuk terlibat dalam acara itu, tokoh masyarakat

Apa yang terungkap diatas menjadi sebuah petunjuk bahwa nilai budaya *Sakai Sambayan* (keharusan untuk saling membantu secara tulus) masih menyatu dalam sikap hidup orang Lampung. Secara *normative* nilai budaya itu mengharuskan adanya sikap hidup saling membantu dalam segala suasana dan kelompok sosial, tanpa melihat latar belakang etnis, budaya dan agama. Dengan demikian, Filsafat Sosial *Sakai Sambaian* dapat menjadi modal budaya bagi perwujudan masyarakat yang memiliki kepedulian sosial, ditengah masyarakat yang semakin individualistik dan materialistik.. Kepedulian sosial yang tumbuh subur ditengah kehidupan sosial akan menjadi pranata penting bagi tumbuhnya kekuatan internal dalam membangun kohesi sosial, yang sekaligus menjadi peredam timbulnya konflik sosial yang disebabkan beberapa factor.

Realitas kebiasaan saling membantu dan saling tolong menolong diatas menjadi satu indicator sosial bahwa dalam ruang psikologi masyarakat masih terdapat perasaan dan bahkan kesadaran interrelasi antara satu dengan yang lain, antara indifidu dengan indifidu, antara keluarga dengan keluarga dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Interrelasi ini merupakan bentukan atau produk dari nilai budaya '*sakai sambayan*' yang menjadi dorongan internal (*internal spirit*) dari prilaku itu. Suasana psikologis yang kemudian termanifestasi dalam sikap dan prilaku sosial dalam bentuk kebiasaan saling tolong menolong, bantu membantu, bergotong royong, dalam banyak jenis kegiatan hidup bermasyarakat merupakan sebuah indikator masih terpeliharanya solidaritas sosial ditengah masyarakat etnis Lampung. Setiap indifidu, keluarga dan kelompok kecil berfungsi sebagai unit Sosial yang saling



berinterrelasi membangun sebuah komunitas besar yang diwarnai oleh solidaritas.

Hanya saja seperti terungkap dalam sub-bab terdahulu bahwa sikap hidup yang didasari filsafat sosial *Sakai Sambaian* dikhawatirkan akan terancam baik oleh serbuan nilai-nilai modern yang menawarkan pola hidup yang serba praktis, efisiensi waktu, tenaga dan biaya (tanpa mempertimbangkan nilai dan fungsi Sosial), serta perubahan lingkungan alam yang menyebabkan adaptasi sikap budaya. Seperti kebiasaan saling membantu dalam membangun rumah, item kegiatan saling membantu semakin berkurang jumlahnya karena semakin berkurangnya bahan pembuatan rumah yang tersedia dilingkungan sekitar. Pengurangan unit-unit kegiatan yang bernuansa *Sakai sambayan*, akan berimplikasi berkurangnya kegiatan yang berfungsi (*functional*) dalam membangun solidaritas masyarakat yang menyatu dalam kehidupan mereka sehari-hari (*ongoing solidarity*).

#### **b. Nemui Nyimah**

Nilai ini diimplementasikan baik ketika menyambut tamu maupun dalam sikap sebagai seorang tamu. Dalam pandangan budaya Lampung, Terhadap seorang atau sekelompok orang yang datang bertamu, maka kewajiban orang atau kelompok orang yang didatangi (tuan rumah) untuk menghormati, menjamu dan menjaga keselamatan mereka selama bertamu (*nyambut temui*). Jika hal-hal diatas sampai tidak terlaksana maka hal tersebut akan merendahkan harga diri (*pi'il*). Tamu (*temui*) dimaksud berlaku secara umum tanpa membedakan apakah ybs. berlatar suku Lampung, mengerti adat istiadat Lampung, atau tidak. Nilai ini juga mengharuskan seseorang untuk membiasakan diri saling mengunjungi, baik terhadap kerabat, kenalan maupun teman. Seorang yang bertamu harus bersikap baik, sopan dalam bertutur kata, serta membawa sesuatu sebagai oleh-oleh, sekalipun dalam

bentuk yang sederhana.<sup>74</sup> Menurut Effendi Sanusi, keharusan berperilaku baik kepada tamu dan dalam bertamu antara lain disimbolkan dengan kebiasaan menghidangkan makanan dan membawa oleh-oleh (buah tangan) ketika bertamu. Menurutnya sekalipun membawa oleh-oleh dalam bertamu bukan sebuah keharusan dalam adat, namun karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka, hal tersebut seolah-olah menjadi ketentuan adat Lampung

Data diatas memberikan penjelasan bahwa nilai budaya berupa unsur falsafah Piil Pesinggiri *Nemui Nyimah* merupakan dorongan untuk membangun hubungan sosial yang baik dikalangan internal etnis Lampung maupun etnis lain. Secara simbolis ia mengharuskan penganutnya untuk memperlihatkan sikap yang baik terhadap tamu, namun secara substantif ia akan menjadi dorongan (motivasi internal) untuk memperlakukan pendatang (suku, etnis) yang berbeda dengan baik. Perasaan malu (*liom*) jika gagal memberikan penghormatan dan penghargaan maksimal terhadap tamu (pendatang), akan menjadi dorongan untuk memaksimalkan ekspresi perilaku yang baik terhadap tamu (pendatang). Dengan demikian dikhotomi penduduk asli dan pendatang akan terjembatani dengan sendirinya, terutama dengan perwujudan falsafah *Nemui Nyimah* yang semakin intens ditengah relasi dan interaksi masyarakat Lampung yang sangat plural dalam berbagai segi. Semakin berkurangnya dikhotomi antara penduduk asli dan pendatang secara praktis akan mengurangi jarak Sosial antara etnis lampung dan etnis lain, menghilangkan sekat-sekat masyarakat yang sering kali muncul akibat penguatan identitas kesukuan, baik yang dilakukan secara sengaja karena motif-motif tertentu (motiv politik, ekonomi, dll). Identitas yang dibear-besarkan pada tahap selanjutnya akan menguatkan perasaan perbedaan yang pada tahap selanjutnya

---

<sup>74</sup> Isroni, orang lampung Pepadun (Pubian).

akan dengan mudah menyulut prasangka etnis (*prejudice*), yang secara empiris telah terbukti menjadi pemicu konflik.

### **c. *Nengah Nyappur***

Nilai ini menuntut orang Lampung untuk memiliki kepandaian bergaul dikalangan yang tidak terbatas, baik suku, status sosial, pangkat dan kedudukan. Menurut Muslimin (Punymbang masyarakat Pesisir), “Dengan kepandaian bergaul itu maka diharapkan ia akan diterima ditengah pergaulan yang luas sehingga mempunyai posisi dan kedudukan (bisa *nengah* atau berada ditengah). Nilai ini menurut Ismail, selayaknya juga menjadi dorongan bagi orang Lampung untuk tidak memilih-milih orang atau kelompok dalam pergaulan dan memperlakukan seluruh kelompok etnis, agama dan status Sosial dalam posisi yang sama tanpa diskriminasi. Secara normative nilai diatas menjadi panduan bagi orang lampung untuk berinteraksi dalam wilayah sosial yang tidak terbatas, memperlakukan semua kelompok sosial dalam pergaulan secara adil dan tanpa diskriminasi. Implementasi nilai-nilai ini telah menjadikan orang Lampung sebagai anggota masyarakat yang supel, dengan tidak menghilangkan identitas sebagai orang Lampung.

Sikap diskriminatif dalam membangun interaksi Sosial secara empiris merupakan benih-benih yang potensial menimbulkan konflik. Sikap diskriminatif pada umumnya timbul karena prasangka (*prejudice*) yang merupakan buah dari *stereotype* etnik. Dan dalam relasi dan interaksi dua atau berbagai komunitas yang berlatar belakang etnik yang berbeda *stereotype* yang berkembang menjadi sikap diskriminatif memang kerap terjadi. Sikap diskriminatif dalam pergaulan biasanya akan berimplikasi kedalam sikap diskriminatif dalam mengelola kekuasaan politik dan ekonomi, yang jika dibiarkan berkembang maka pada suatu waktu akan mengalami metamorfosa menjadi konflik, baik pada tingkatan latent maupun manifest. Upaya

perubahan sikap diskriminatif menjadi sikap proporsional (adil) akan efektif dan tidak menemui banyak kendala ketika memang telah ada sumber perdamaian yang memanifestasi dari nilai-nilai budaya yang dianut. Falsafah Sosial *nengah nyappur* dalam konteks diatas telah mengakar dalam sikap budaya masyarakat (etnis) Lampung dan dengan demikian akan fungsional dalam menjauhi sikap Sosial yang diskriminatif, yang potensial akan memicu keretakan Sosial yang tidak produktif dalam membangun kesatuan (integrasi) masyarakat.

#### **d. Bejuluk Beadek**

Orang Lampung disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya sejak kecil, juga memperoleh nama adat (nama kecil yang disebut *juluk*) dan nama tua atau panggilan adat setelah menikah yang disebut *adek/adok*. Menurut Fachruddin<sup>75</sup>, *juluk* merupakan panggilan kecil terhadap orang Lampung sekaligus symbol dari cita-cita yang ingin dicapai setelah nanti dewasa. Sedang *adok* atau *adek* merupakan panggilan adat yang diberikan setelah seseorang dianggap berprestasi (diantaranya melangsungkan pernikahan). Menurutnya *juluk* dan *adok* ini sekaligus juga merupakan symbol semangat pembaharuan Sosial. Semangat pembaharuan sosial yang terkandung dalam symbol *juluk* dan *adok* ini dilengkapi dengan pelaksanaan upacara menghadapi daur kehidupan dalam budaya Lampung yang berupa “*Seghak Sepei-Turun mandei serta Cakak Pepadun*”. Dengan kata lain bahwa penyandang nama kebesaran adat bukan hanya dituntut untuk menjaga prilaku dan sikap Sosial yang baik, bahkan juga dituntut untuk selalu memiliki semangat pembaharuan Sosial melalui peningkatan prestasi diri yang memotivasi terjadinya peningkatan prestasi pada orang lain (warga lain).

---

<sup>75</sup> Budayawan dan peneliti Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Menurut Abadi<sup>76</sup>, menyandang nama kebesaran adat memiliki konsekuensi sosial berupa keharusan untuk menjaga dan meningkatkan martabat dan kehormatan diri, tidak dengan cara memaksa orang lain untuk memberikan penghormatan, tetapi menampilkan perilaku yang baik serta menghindari dan menjauhi perilaku tercela yang merugikan dan membuat resah masyarakat. Dengan demikian maka penyandang adok/adek akan tetap terhormat dan bermartabat. Hal ini sekaligus berarti larangan bagi mereka yang telah memperoleh nama adat untuk melakukan perbuatan tercela yang meresahkan masyarakat dan merendahkan harga diri. Dengan kata lain bahwa penyandang nama kebesaran yang bersumber dari adat dituntut untuk menempati posisi sebagai penjaga stabilitas Sosial baik dari gangguan perbuatan dirinya dan gangguan perbuatan orang lain.

## 2. Carem Ragem

Kemajemukan dan keragaman etnis, budaya dan agama yang seringkali tidak bisa menghindari keragaman sikap, pandangan, dan perilaku telah menjadi realitas sejarah pada masyarakat Lampung. Sehingga nilai budaya Lampung pun menyikapi hal tersebut secara akomodatif. Ditengah berbagai keragaman yang ada orang Lampung dituntut untuk mengakui keragaman itu sebagai sebuah kenyataan. Didalam filsafat sosial yang bersumber dari nilai budaya tradisional Lampung juga ditemukan adanya filsafat *Carem Ragem*, meskipun Filsafat Sosial ini hanya ditemukan pada masyarakat Lampung Abung (Pepadun). Menurut Effendi Sanusi, *Carem Ragem* artinya keharusan untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat ditengah keragaman pendapat, selera, sikap dan kebiasaan, serta perbedaan latar belakang suku, bahasa, adat istiadat dan agama.

---

<sup>76</sup> Punyimbang adat Pepadun (Pubian) Tiuh (Desa) Negeri Sakti, Lampung Selatan.

Secara internal, sebagaimana diungkapkan diatas, orang (etnis) Lampung sendiri terdiri dari kelompok masyarakat adat (jurai) Lampung Pepadun dan Pesisir (Sai Batin), yang juga realitasnya masih terbagi dalam sub-sub unit *jurai* yang disebut Buay. Jurai Pepadun terbagi kedalam Buay Abung Siwo Megou, Mego Pak Tulang Bawang, Buay limo, dan Pubian telu Suku. Sementara Masyarakat Lampung beradat (jurai) Pesisir terdiri dari Sekala Bekhak, Semaka, Teluk Melinting dan Khanau.<sup>77</sup>

Dengan demikian pengakuan terhadap keragaman memang berpijak pada realitas histories sosiologis internal etnis Lampung sendiri. Dan seiring dengan lanju mobilisasi penduduk yang menyebabkan migrasi baik yang dilakukan secara indifidual, berkelompok maupun yang sengaja di program oleh pemerintah, maka keragaman itu semakin menjadi realitas yang terhindari. Falsafah *Carem Ragem* Filsafat sosial yang terdapat dalam nilai budaya Lampung mengakui keragaman pandangan, pendapat, budaya, agama yang pada saat tertentu berimplikasi pada keragaman kelompok sosial, keragaman kelompok budaya dan agama. Pengakuan terhadap keragaman itu juga mengajarkan kearifan dalam menghadapi perbedaan. Secara teoritik, pengakuan terhadap keragaman ini merupakan modal awal bagi tumbuhnya sikap toleransi dan solidaritas, dimana kedua sikap tersebut merupakan sebuah keharusan dalam interaksi masyarakat yang dilatari oleh komposisi penduduk yang beragam.

### **C. Implementasi Nilai Kemuakhian (Persaudaraan)**

Dalam perspektif budaya Lampung seseorang dan keluarganya dapat diperlakukan dan diposisikan sebagai saudara (*puakhi*) baik karena keturunan, hubungan perkawinan, atau

---

<sup>77</sup>Bunyana Sholihin, "*Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Keagamaan*" (makalah Seminar), Puslit IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007.

proses adopsi (*angkonan*) .Saudara (*puakhi*) karena keturunan dimaksud hubungan kekerabatan disebabkan karena kedekatan hubungan keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Hubungan kekerabatan juga bisa terjadi karena perkawinan yang terjadi dengan salah satu anggota keluarga atau kerabat. Dan tidak hanya terbatas pada hal itu, kekerabatan juga terjadi melalui mekanisme adopsi (*angkonan*). Seseorang yang berasal dari suku (etnis) lain, karena sebab tertentu diangkat melalui prosedur resmi sebagai bagian dari saudara atau kerabat (*puakhi*. ) Pengangkatan sebagai saudara biasanya karena sebab perkawinan (seorang yang berasal dari etnis lain ingin melangsungkan perkawinan dengan orang lampung maka belum diterima kedudukannya dalam etnis Lampung sebelum terlebih dahulu diadopsi/diangkat sebagai bagian dari keluarga oleh seseorang dari etnis Lampung asli), hal seperti itu terutama berlaku pada masyarakat Lampung Pepadun.

Pengangkatan (*pengangkonan*) juga bisa berlaku atas a kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat hubungan dekat (pertemanan) yang telah terjadi dalam bentuk persaudaraan formal yang diresmikan oleh mekanisme adat Lampung. Dalam prakteknya orang Lampung memperlakukan orang yang telah diposisikan sebagai saudara (*puakhi*), sekalipun lewat mekanisme adosi adat sama dengan saudara karena keturunan atau karena hubungan perkawinan. Perbedaan hanya dalam hal-hal tertentu seperti dalam hak waris dll. Orang Lampung merasa harus terlibat dalam urusan saudaranya (*puakhi*), menolong dan membela, baik persaudaraan (*ke-muakhi-an*) itu karena keturunan, perkawinan, maupun karena *angkonan*, dalam suka dan duka. Keharusan untuk saling tolong menolong dan saling membela termanifestasi dalam bentuk pengorbanan harta, bahkan bila perlu dengan pengorbanan jiwa dan raga.

Menurut seorang informan, ketika seseorang telah masuk dalam lingkup *kemuakhian* (bagian dari keluarga orang Lampung) maka dia sepenuhnya diberlakukan sebagai bagian dari keluarga

marga, atau komunitas masyarakat (etnis) Lampung yang secara psikologis *ulun Lampung* (orang lampung) akan merasa lebih dekat, dibandingkan dengan orang yang belum secara formal menjadi bagian dari keluarga orang Lampung. Filsafat dan mekanisme hubungan Sosial yang terangkum dalam terma *kemuakhi-an* ini dapat menjadi titik masuk (*entry point*) dan jembatan penghubung bagi penduduk Lampung dari suku dan etnis lain untuk sepenuhnya menjadi bagian formal komunitas adapt Lampung, yang konsekwensinya disamping orang Lampung akan sepenuhnya memposisikannya sebagai bagian dari komunitasnya, juga secara pribadi ia akan tertuntut untuk memposisikan diri sebagai bagian dari komunitas (adapt) Lampung dengan segala konsekwensinya.

Hubungan *kemuakhian* akan lebih memupuk keintiman hubungan Sosial lebih dari hubungan Sosial yang didasari oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara dan pragmatis. Sekalipun pada kasus-kasus tertentu hubungan yang telah terbina dan diikat dalam hubungan *kemuakhian*, juga tidak menjadi jaminan kepastian terjalannya harmonitas antara orang-orang dalam ikatan itu. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh kenyataan terjadinya konflik antara sesama saudara (*puakhi*), yang biasanya dipicu oleh kepentingan-kepentingan pragmatis yang bernuansa materi, seperti perselisihan dalam pembagian harta warisan, dan lain-lain.

#### **D. Mekanisme penyelesaian konflik**

Konflik dalam realitasnya merupakan salah satu bentuk hubungan Sosial yang diwarnai oleh pertentangan antara satu dengan yang lain. Konflik antar indifidu dan kelompok sesama orang dari etnis Lampung, antara orang Lampung dengan orang yang bertar belakang etnis lain juga telah menjadi bagian dari bentuk interaksi Sosial. Karena itu kekayaan budaya Lampung merumuskan mekanisme penyelesaian konflik indifidu maupun



konflik Sosial yang dipicu oleh berbagai faktor. Jika karena sebab tertentu, sewaktu-waktu terjadi konflik antara individu atau antar kelompok maka ditempuh mekanisme penyelesaian konflik dibawah koordinasi para tokoh adat (*punyimbang*). Kedua belah pihak dipertemukan dan diminta untuk menceritakan duduk persoalannya.

Pemimpin adat (*Punyimbang*) menjadi mediator untuk terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak dengan meminta pihak yang dinyatakan bersalah meminta maaf dan meminta pihak lawan untuk berdamai. Pihak yang bersalah diberi sanksi adat berupa keharusan untuk Mengadakan upacara perdamaian dengan menyembelih hewan (kambing misalnya, yang disebut *Cepalo*) untuk dinikmati bersama dalam upacara peresmian (deklarasi) perdamaian tsb, dan disaat itu pula disepakati untuk membangun hubungan baru dalam bentuk persaudaraan (*kemuakhian*) (S. Muhsin, Tokoh Masyarakat Lampung Pesisir)

## **E. Budaya dan Konflik Sosial Keagamaan**

### **1. Konflik Internal Masyarakat (etnis) Lampung**

Konflik Internal pada masyarakat (etnis) Lampung terjadi pada acara-acara perkawinan atau upacara-upacara yang melibatkan aturan dan mekanisme adat Lampung. Ketegangan (konflik) terkadang terjadi antara kedua pihak dalam penerapan aturan-aturan adat istiadat seperti dalam prosesi pemberian gelar (*cakak pepadun*). Ketegangan yang merupakan benih konflik terjadi dalam proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam peristiwa perkawinan antara seorang gadis Lampung berlatar belakang adat Pepadun dan seorang bujang berlatar belakang adat Pesisir, atau berlatar belakang etnis lain. Ketegangan terjadi bukan karena perbedaan suku (etnis) yang belum bisa diterima dikalangan masyarakat etnis Lampung beradat Pepadun, tetapi pada tahap untuk mencapai kesepakatan kesepakatan dalam menerapkan ketentuan adat Pepadun yang

dirasakan berat oleh pihak lain. Dalam ketentuan adat Pepadun khususnya buay Abung, Pubian, Menggala (Tulang Bawang) dan lain-lainnya, seorang calon pengantin diharuskan terlebih dahulu memenuhi persyaratan membayar biaya pelaksanaan upacara penobatan gelar adat (*Cakak Pepadun*) sebelum melangsungkan perkawinan dengan gadis pepadun. Ketentuan ini seringkali dirasakan dan dinilai sebagai ketentuan yang menyulitkan dan mengada-ada oleh keluarga calon pengantin laki-laki dari komunitas adat Pesisir bahkan bagi etnis lain. Alotnya perundingan antara kedua belah pihak seringkali berujung dalam konflik, sekalipun dalam tensi yang berbeda-beda. Konflik yang paling sederhana dalam konteks proses perkawinan adalah dalam bentuk batalnya keinginan melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak, sekalipun dalam hal ini norma-norma adat Lampung (Pepadun) masih memberi ruang untuk pemberlakukan mekanisme yang tergolong darurat, seperti dengan jalan melakukan proses kawin lari.

Konflik dalam bentuk diatas terjadi antar keluarga kedua belah yang melangsungkan perkawinan, antara keluarga (yang melangsungkan perkawinan) dengan tokoh adat, maupun antara tokoh adat dengan tokoh adat lainnya. Ketegangan terkadang berlangsung dalam waktu yang lama dan melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi pengikut tokoh adat (*punyimbang*) yang terlibat konflik, demikian juga konflik terkadang terjadi dalam bentuk yang sederhana seperti tidak saling menegur dan menyapa, dan kadang-kadang juga berkembang menjadi benih pertikaian yang berkembang menjadi penyebab bentrokan fisik ketika ada pemicu lain yang menyebabkan perselisihan.

Dari penjelasan yang menggambarkan realitas konflik internal pada masyarakat Lampung diatas menyiratkan sebuah kenyataan bahwa aturan normative ketentuan adat istiadat Lampung terutama yang mengatur mekanisme pelaksanaan perkawinan dalam hal tertentu berbeda antara adat istiadat

Lampung pesisir dan Pepadun berbeda. Dalam pelaksanaannya perbedaan itu potensial menjadi pemicu konflik sekalipun hanya terjadi dalam batas keluarga kedua belah pihak. Namun demikian solidaritas kelompok (kelompok Pesisir) bisa saja menjadi jembatan penghubung bagi timbulnya konflik internal (Pubian versus Pesisir) yang bernuansa kelompok. Akar dari konflik seperti itu adalah ketidak-sepakatan terhadap norma adat yang berakibat berfungsinya norma adat yang merupakan unit kebudayaan sebagai pemicu konflik. Dalam kasus diatas norma adat justru berfungsi (*functional*) sebagai pemicu konflik Sosial.

Konflik internal yang dipicu oleh norma-norma budaya lampung juga terjadi pada jajaran internal satu *jurai* (kelompok adat), terutama dalam hubungan Sosial yang dilatari oleh perbedaan status Sosial akibat implementasi pemakaian gelar kebesaran adat (*adek*). Dalam prakteknya antar kelompok masyarakat yang memiliki tingkatan (posisi) Sosial yang berbeda-beda menurut adat itu dipisahkan baik secara fisik maupun psikologis. Dalam prosesi perkawinan yang sekaligus dilatari oleh oleh prosesi tradisi pemberian gelar kebesaran adat (*adek*), indifidu dan kelompok masyarakat dibedakan menurut gelar (*adek*) yang telah disandangnya. Mereka yang terutama karena factor ekonomi belum bisa meraih gelar adat, akan memperoleh kedudukan dan tugas yang terkesan rendah, seperti menjadi pelayan yang menyiapkan berbagai keperluan pesta, dan lain-lain. Ketidak-setaraan kedudukan yang berimplikasi pada pembedaan jenis tugas (fungsi) menjadi pemicu konflik sekalipun mungkin konflik itu hanya termanifestasi dalam bentuk sikap psikologis.

## **2. Konflik Eksternal**

### **a. Agama (Islam) dan Etnis Lampung**

Orang Lampung sangat identik dengan agama Islam dan nilai-nilai budaya Lampung diyakini oleh orang Lampung bersumber dari Islam. Sampai saat ini dalam pandangan

masyarakat (etnis) Lampung, adalah merupakan penyimpangan terhadap budaya Lampung jika ada anggota masyarakat (etnis) Lampung yang memeluk agama selain Islam, Seperti diungkapkan oleh Abadi, seorang penyimbang Masyarakat Pubian, bahwa “jika terdapat anggota keluarga yang memeluk agama selain Islam, maka ia akan mengalami sanksi pengucilan (isolasi) baik fisik maupun psikologis dari keluarga dan akan sulit diterima dilingkungan adat Lampung (status adatnya tidak diakui)”. Pandangan masyarakat Pubian (Pepadun). Pandangan masyarakat Lampung pepadun nampaknya bukan cerminan dari karakter masyarakat terpadun yang lebih tertutup, karena dalam hal agama pandangan masyarakat Pesisir juga tidak berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Ismail, salah seorang penyimbang masyarakat Pesisir, bahwa orang Lampung belum memberikan tempat bagi anggota keluarganya untuk menganut agama selain Islam. Prosesi adat yang dilakukan selalu disertai dengan nuansa ke-Islaman”. Dengan kata lain, orang Lampung mengidentifikasi diri dan kelompok mereka dengan identitas cultural berupa symbol Islam yang sekaligus menjadi symbol budaya yang sangat melekat. Identitas ini juga dijadikan sebagai garis ‘pembeda’ antara orang Lampung dengan suku (etnis) lain. Integrasi Islam dan budaya lampung secara simbolik terlihat dalam beberapa unsur kebudayaan Lampung. Antara lain seperti yang terlihat dalam kegiatan pengarakan pasangan pengantin dalam prosesi adat perkawinan. Dalam kegiatan ini regu arak-arakan yang mengiringi pengantin melantunkan shalawat nabi dan ucapan-ucapan yang bersumber dari ajaran Islam. Penobatan Gelar adat dikalangan masyarakat Pesisir selalu diiringi dengan pembacaan ayat-ayat suci alqur’an oleh kedua pasangan pengantin dan pendampingnya masing-masing, dilengkapi dengan pesan-pesan keagamaan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Dan sampai sekarang masih ditemukan sebuah sikap dikalangan remaja Lampung Pesisir, bahwa untuk menjaga prestise

kelompoknya para remaja dari tiap-tiap kelompok desa, mempersiapkan diri agar pada saatnya nanti bisa tampil optimal dalam membacakan ayat suci al-quran didepan kelompok masyarakat adat yang menyaksikan pernikahannya.

Demikian juga Integrasi Islam dan budaya Lampung sebagai identitas kelompok terlihat pada reaksi berupa perasaan terusik dan ketersinggungan serta reaksi yang berbentuk sikap dan tindakan sosial ketika ada aktifitas keagamaan agama yang tidak dianut oleh orang lampung dilakukan ditengah lingkungan sosial masyarakat lampung, sekalipun realitasnya keterikatan orang Lampung terhadap agamanya banyak yang hanya sebatas keterikatan simbolis. Seorang tokoh muda Lampung yang dalam kesehariannya tidak melaksanakan sholat secara aktif, namun memperlihatkan sikap tidak simpatik ketika ditanya tanggapannya terhadap penyebaran agama (lain) yang mempergunakan pendekatan budaya Lampung sebagai alat pendekatan. Namun demikian dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Lampung sudah terbiasa bergaul secara luas, baik dengan orang yang berasal dari etnis, budaya, bahasa dan agama yang sama maupun berbeda. Informan yang sama menjelaskan bahwa ia mempunyai beberapa teman dekat yang berbeda agama.

Pandangan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai kultural diatas tidak sepenuhnya berarti bahwa secara kultural masyarakat (etnis) Lampung menjadikan Islam sebagai substansi dari petunjuk prilaku dalam kehidupannya. Hal itu terlihat pada praktek tradisi keagamaan yang pada beberapa hal masih diwarnai oleh singkretisme. Seperti bisa dilihat pada tradisi *Ngumbai* dan *Ngebabali* yang masih menjadi bagian dari tradisi keagamaan sebagian masyarakat Lampung. Pada sebagian masyarakat Lampung lainnya, Islam hanya tercermin secara simbolis, dan keterikatan terhadap Islam terlihat semata sebagai keterikatan batin. Kedisiplinan dalam menjalankan aturan formal ke-Islaman yang nampak pada sebagian masyarakat Lampung,

agaknya bukan bentukan kultur Lampung yang dianggap Islam oleh penganut-pebganutnya.

Reaksi tidak simpatik terhadap agama lain, seperti tercermin dalam bentuk tindakan pengucilan terhadap anggota keluarga atau orang Lampung yang menganut agama lain,<sup>78</sup> seperti terlihat diatas secara teroritik merupakan sebuah mekanisme yang dipakai untuk mempertahankan identitas kelompok dan identitas etnis. Bagi orang Lampung peralihan agama dari Islam kepada agama lain bisa jadi merupakan ancaman terhadap kelestarian identitas cultural yang selama ini dipelihara secara turun temurun. Pilihan mengganti agama (pindah menganut agama lain selain Islam) berarti keputusan untuk mencabut identitas kulturalnya sendiri, dan mendeklarasikan perpishan dari identitas budaya (Lampung) yang selama ini dipakai. Dari perspektif ini keputusan adat untuk memberikan sangsi berupa pebcabutan dan tidak mengakui status adat yang bersangkutan seperti terungkap diatas, bisa dipahami sebagai mekanisme dalam mempertahankan identitas etnis (Lampung).

Ancaman terhadap identitas apapun, termasuk didalamnya identitas etnis memang secara alamiah merupakan pemicu konflik baik yang ada pada tataran potensi (laten), bahkan ketika tidak ditemukan penyelesaian dalam hal ini akan berkembang menjadi konflik terbuka (manifest). Kedatangan agama lain dengan berbagai simbolnya kedalam lingkungan pemukiman orang Lampung juga bisa dipahami sebagai ancaman terhadap

---

<sup>78</sup> Secara empiris sesungguhnya sulit untuk menemukan *Ulung Lampung* (orang Lampung) asli yang menganut agama selain Islam, sekalipun interaksi antara orang lampung dengan etnis lain (termasuk yang beragama lain) selain Islam telah berlangsung lama dan dalam banyak kegiatan untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup. Dalam kegiatan perdagangan umpamanya, sebagian pedagang Lampung berhubungan secara intensif dengan pedagang-pedagang beragama lain terutama dari keturunan Tiong Hoa. Namun demikian, bagi Orang Lampung identitas agama adalah hal yang dianggap sangat prinsip, sehingga memang dipandang sangat tercela jika berpindah ke agama selain Islam. Seperti kebanyakan orang tua muslim lainnya, orang tua yang memiliki anak gadis yang diketahui berhubungan dengan pemuda non muslim, akan berhadapan dengan ancaman-ancaman dari orang tua serta keluarga besarnya jika terus meneruskan hubungannya dengan orang yang pemuda yang belum beragama Islam.

identitas itu, sehingga wajar kalau timbul perasaan dan sikap tidak simpatik. Pada titik tertentu bahkan hal itu akan memicu timbulnya prasangka (*prejudice*) bahwa setiap identitas budaya selain Islam, akan merupakan ancaman terhadap identitas budaya etnis yang tidak lain dari symbol-simbol Islam itu sendiri.

## **b. Suasana Batin Orang Lampung terhadap pendatang**

Sejarah konflik antara etnis Lampung (asli) dan pendatang tercermin dalam beberapa peristiwa dalam sejarah. Konflik pertama berupa konflik yang terjadi antara Pangeran sabakingking dengan Ratu Darah Putih yang dipicu oleh ketidakjelasan siapa yang tua dan siapa yang muda diantara mereka berdua.<sup>79</sup> Konflik ini bisa difahami sebagai batu ujian dalam proses Islamisasi di daerah Lampung, dan dapat diselesaikan dengan mudah karena masyarakat Lampung pada waktu itu telah menganut Islam.<sup>80</sup> Namun disamping konflik data sejarah juga memberi penjelasan keterbukaan orang Lampung terhadap pendatang, yang membuahkan suasana damai. Sikap orang Lampung yang menerima kedatangan etnis lain diwilayah Lampung dengan ketulusan dan kelapangan jiwa tercermin dalam beberapa hal, *pertama*, Masuknya masyarakat transmigran dari pulau Jawa sejak pertama memang melalui pengesahan oleh tokoh-tokoh adat Lampung, *kedua*, Pemaknaan prinsip *Sang Bumi Rua jurai*. Secara historis sebenarnya sang Bumi Rua jurai bermakna Satu Bumi (wilayah) yang dihuni oleh dua jurai (klen), yakni *jurai* Pesisir dan *Jurai* Pepadun. Namun sejalan dengan perkembangan historis masyarakat Lampung yang berdampingan dengan pendatang dari berbagai suku dalam jumlah yang lebih banyak dari suku Lampung asli, maka kemudian dilakukan pengembangan interpretasi terhadap prinsip itu. *Sang Bumi Rua*

---

<sup>79</sup> Fachruddin, *Konflik mengakar sepanjang Abad*, Harian Lampung Post, edisi 19 September 2006.

<sup>80</sup> *I b i d.*

*Jurai* disisi lain juga dipahami sebagai “Bumi yang satu yang dihuni oleh dua kelompok etnis yakni etnis Lampung asli dan etnis Pendatang”, dan keduanya disebut *masyarakat Lampung*. Menurut Ali Imron, masyarakat (etnis) Lampung asli menerima pemaknaan seperti itu sebagai makna lain dari filosofi *Sang Bumi Rua Jurai*, dan tidak ada penolakan yang berarti dari masyarakat etnis Lampung terhadap pengertian ini. Orang Lampung dengan demikian memang sejak awal telah menyikapi masyarakat pendatang sebagai bagian dari masyarakat Lampung. Hanya saja tidak dapat ditutupi kenyataan bahwa secara psikologis masih ada perasaan orang Lampung bahwa mereka merupakan penduduk asli yang memiliki hak hidup secara wajar di tanah Lampung. Sehingga karenanya masyarakat Lampung yang terbilang pendatang seyogyanya memperlihatkan sikap toleran dan “mengerti”. Menurut Y. Syukur<sup>81</sup>, “Tidak ditutupi kenyataan bahwa terkadang timbul kecemburuan orang Lampung terhadap pendatang, terutama ketika kekuasaan politik dan sumber-sumber ekonomi dikuasai secara semena-mena tanpa memahami “perasaan” (suasana psikologis dan sosial) masyarakat Lampung.”.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi potensial menjadi pemicu konflik yang akan merambat menjadi konflik yang berdimensi ganda, termasuk konflik yang bernuansa sosial keagamaan. Karena isu perbedaan agama sering kali dengan gampang dieksploitasi untuk menjustifikasi kritik dan sikap perlawanan terhadap kondisi ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi, apalagi jika benih-benih cultural ketidak- siapan masyarakat dalam menerima perbedaan agama itu memang sudah ada.

Realitas peminggiran orang Lampung secara politik dan ekonomi terutama terutama dirasakan pada masa pemerintahan orde baru. Secara politik, Kepala-kepala daerah yang memimpin

---

<sup>81</sup> Tokoh adat Lampung Pubian (Pepadun).



Lampung hampir seluruhnya merupakan bagian dari etnis pendatang. Demikian juga ketidakadilan ekonomi, wilayah-wilayah dimana terdapat konsentrasi masyarakat asli Lampung, umumnya adalah kawasan yang termasuk kawasan tertinggal dan miskin secara ekonomi dan hampir tidak tersentuh perhatian dan kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut mengalami perubahan ketika terjadi perubahan iklim politik, pemberlakuan Undang-undang yang menyangkut otonomi daerah, dan demokratisasi politik yang berimplikasi pada keharusan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan sosial yang ada di daerah. Sekalipun dalam kenyataannya distribusi kekuasaan politik telah menjadi kenyataan, namun hal tersebut belum secara signifikan berimplikasi pada perwujudan keadilan ekonomi. Penduduk asli Lampung masih dilanda kemiskinan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kenyataan kawasan pemukiman orang-orang Lampung masih banyak yang berada di kawasan tertinggal baik dilihat dari ketersediaan fasilitas, ketersediaan SDM pembangunan maupun infrastruktur pokok yang menjamin berlangsungnya segala aktivitas ekonomi dengan lancar.

## BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Diskusi dan pembahasan tentang “Budaya Lampung dan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan”, sebagaimana dipaparkan di atas pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagian nilai budaya Lampung masih fungsional dan sebagian (kecil) lainnya sudah tidak lagi dijadikan sebagai sumber motivasi perilaku budaya masyarakat Lampung.
2. Nilai budaya Lampung yang masih menjadi sumber moral dan etika Sosial yang menjadi tuntunan dalam berinteraksi, baik antar sesama penduduk dari etnis Lampung maupun dengan kalangan etnis Lain adalah : *Pertama* berupa Filsafat *Piil Pesinggiri*, yang kemudian diimplementasikan secara rinci dalam nilai : *Sakai Sambayan*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, serta *Bejuluk Beadek*. *Piil Pesinggiri* adalah harga diri orang Lampung yang berlandaskan pada moral yang baik, memahami posisi, kewajiban dan tanggung jawab diri, dalam kehidupan bermasyarakat. *Sakai Sambayan* berarti keharusan manusia untuk bergotong royong dan saling membantu, berjiwa Sosial dan menanamkan ketulusan dalam bergaul. *Nemui Nyimah* berarti keharusan bagi manusia untuk bersikap sopan santun, terbuka terhadap sesama manusia baik secara

moral maupun material. *Nengah Nyappur* berarti keharusan bagi manusia untuk bergaul secara luas (tanpa diskriminasi), terbuka untuk menerima input pemikiran, berinisiatif dan memberikan kontribusi pendapat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan bersama. *Bejuluk Beadek* berarti keharusan untuk menyempurnakan hidup dengan menjaga martabat diri dan keluarga untuk tidak mengalami keterpurukan dalam pandangan masyarakat luas. Manusia harus bersikap dan berbuat baik, melakukan hal-hal yang positif dan produktif serta menghindari hal-hal yang negative, sejalan dengan kebesaran nama (*julukan*) yang dimiliki Carem Ragem yang berarti keharusan untuk mengakui dan menerima realitas keragaman yang terjadi ditengah kehidupan dan pergaulan masyarakat, keragaman yang terjadi dikalangan internal suku Lampung maupun keragaman eksternal (keragaman etnis, budaya, agama). *Kedua, Filsafat Kemuakhian (Persaudaraan)*. Persaudaraan dalam Budaya Lampung terjadi karena factor keturunan, hubungan perkawinan, serta karena hubungan dekat (intim) yang kemudian diresmikan dalam mekanisme adat yang disebut proses *angkonan* (adopsi). Hubungan *kemuakhian* dapat menjadi pintu masuk bagi etnis lain untuk dapat diterima sebagai bagian dari keluarga dan komunitas (etnis) Lampung secara formal. Harmonitas Sosial yang didasari hubungan *kemuakhian* (persaudaraan) dalam perspektif budaya Lampung adalah harmonitas yang tulus tanpa tendensi lain, kecuali motivasi persaudaraan itu sendiri. Penghayatan terhadap nilai-nilai Piil Pesinggiri disamping menuntun prilaku produktif yang mengembangkan harmonitas dan kohesi Sosial, juga menumbuhkan kearifan dalam menyikapi konflik (antar individu dan Sosial). Nilai budaya Lampung menetapkan mekanisme penyelesaian konflik Sosial dan membangun harmonitas hubungan individu, keluarga dan harmonitas sosial.

3. Konflik Sosial keagamaan terjadi dan potensial terjadi karena factor budaya (adat istiadat), factor agama dan factor politik dan ekonomi. Konflik yang dipicu oleh factor budaya terlihat dalam perselisihan penerapan ketentuan adat istiadat dalam proses perkawinan, dan dalam pemberian gelar (nama kebesaran adat). Demikian juga yang merupakan implikasi dari stratifikasi Sosial sebagai akses dari tingkatan kedudukan dalam pandangan adat. Sementara konflik antara orang Lampung dan etnis lain potensial terjadi karena faktor perbedaan agama, dimana orang Lampung umumnya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai identitas etnis dan identitas budayanya. Secara cultural, orang Lampung belum menerima kehadiran orang Lampung yang beragama lain dan kehadiran pelaksanaan peribadatan agama lain di lingkungan pemukiman orang Lampung yang masih homogen. Disamping kedua factor diatas konflik juga potensial terjadi karena ketidakadilan politik dan ekonomi. Ketidakadilan politik terutama dirasakan orang Lampung pada masa Pemerintahan orde baru, dimana ketidakadilan politik ini berimplikasi pada ketidakadilan ekonomi.

## **B. Rekomendasi**

Berpijak pada realitas masyarakat dan nilai budaya (Lampung) yang menjadi objek kajian, serta kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan maka diajukan rekomendasi sebagai berikut ;

1. Nilai-nilai budaya lokal (Lampung) yang menyimpan kekayaan falsafati untuk mewujudkan tata pergaulan antar etnis, kelompok sosial, agama dan budaya yang harmonis, perlu terus dilestarikan, diwariskan dan dikembangkan, untuk dijadikan salah satu asset budaya nasional dalam meredam dan menyelesaikan berbagai macam konflik sosial melalui pendekatan kearifan budaya lokal. (*local wisdom*).

2. Pengembangan budaya local perlu dilakukan melalui langkah pengkajian dan revitalisasi dan redisain, agar budaya local tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan budaya masyarakat yang terus terjadi.
3. Sejalan dengan rekomendasi pada poin 1 dan 2 di atas, maka pengkajian dan penelitian nilai budaya local ini perlu terus dilakukan dan dikembangkan secara lebih serius, dengan dukungan methodology yang akurat, kelembagaan profesional serta dukungan finansial yang memadai.
4. Pelestarian dan pengembangan budaya local seyogyanya dilakukan melalui gerakan pendidikan, dan ini terutama untuk mendukung upaya pewarisan kekayaan khazanah budaya local yang fungsional dalam mengatasi berbagai persoalan Sosial, budaya dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah Ratu Prawiranegara, *Pembinaan Hidup Antar Umat Beragama*, Jakarta, DEPAG RI 1982.
- Arief Makhya, “Budaya Lampung Sejalan Ajaran Islam”, dalam Canang No. 01 Edisi Januari 2002.
- Agus Pahrudin, *Pemetaan Kerukukan Kehidupan Umat Beragama di Kota Bandar Lampung*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2006.
- Ahmada Syahid dan Zainudin Daulay, *Riuh di Beranda Satu*, Puslitbang Depag RI.
- Adney, Bernard T., *Etika Sosial Lintas Budaya*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Ali Imron, *Pola Perkawinan Saibatin dulu dan sekarang*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi Press, 2002.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan konflik*, LKiS, Yogyakarta, 2005.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- A.W. Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalaan Agama Dewasa ini*, Jakarta, Rajawali Pers, 1989
- , *Universalitas dan Pembangunan*, Bandung, IKIP Bandung, 1971
- A.W. Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997

- Bunyana Sholihin, "Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Keagamaan" (makalah Seminar), Puslit IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007.
- Broersma, R., *De Lampongsche Districten*, Javasche Boekhandle & Drukkerij, Batavia, 1916.
- Dale Cannon, *Enam Cara Beragama*, (Jakarta: Diperta Depag RI, 2002)
- D. Hendropuspito, O.C. *Sosiologi Agama*, Jakarta, Kanisius, 1983.
- Depdikbud Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, Kanwil Depdikbud, Bandar Lampung, 1985.
- Depdikbud Lampung, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Kanwil Depdikbud, Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 1985/1986.
- Djohan Efendi, Et.ab. (ads) *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Monografi Hasil Dialog, Diskusi Panel Studi Kasus di Beberapa Tempat di Jawa*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Departemen Agama RI, 1983
- Fazlur al-Rahman, *Tema Pokok al-Quran*, Bandung, Pustaka, 1983
- Fachruddin dan Suharyadi, *Falsafah Pi'il Pasenggiri Sebagai Norma Tata Krama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Arian Jaya, Bandar Lampung, 1986.
- Fachruddin, Aqil Irham dan Suharyadi, *Upacara Canggot Agung: Aktualisasi Nilai-nilai Tradisional Daerah Lampung*, Depdikbud, Bandar Lampung, 1999.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, CV.
- Rajawali, Jakaarta, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Asal Usul Suku Bangsa Lampung*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1992.

- Hasan Sadly, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhtisar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1983.
- Husin Sayuti, et.al., *Sejarah Pembentukan Propinsi Lampung, Proyek Kerjasama Balitbang Provinsi Lampung dan Lembaga Penelitian Universitas Lampung*, 2001.
- Imam Tholikhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Modul: Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syahida, Jakarta.
- Jhon J. Macionis, *Society the Basics*, Prentice Hall, Upper Saddle River, US.
- K.Bertens, *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No.3. Vol.III, 1992 .
- Kiay Paksi, Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II: Mengenal Adat Lampung Pubian*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1955.
- Koencaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, PT Gramedia, 1987.
- Koencaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Pen. Univ., Jakarta, 1984.
- Kotamadya Bandar Lampung *Dalam Angka* 2003.
- Muhaimin, *Damai di Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2004)
- Ma'arif Jamuin, *Resolusi Konflik antar Etnik dan Agama*, Surakarta, CISCORE Indonesia, 2004.
- M. Ikhwan, et.al., *Wujud arti dan fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan asli Masyarakat lampung*, Bandar Lampung, Kanwil Depdikbud Prov. Lampung, 1996.
- M. Rasyidi, *Filsafat Agama*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986
- Moh Soleh Isre (ed), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Badan Litbang, Depag R.I., Jakarta, 2003.



- Nurcholis Madjid, *Ulumul Qura'n*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No.3. Vol. VI, 1995
- Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penyiaran Agama, Bantuan Kepada Lembaga Keagamaan Dan Pendirian Tempat-tempat Ibadat, Proyek Penerangan, Bimbingan Dan Da'wah/Khutbah Agama Islam Propinsi Lampung, 1981/1982.
- Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, *Sejarah Daerah Lampung*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
- Peursen, C.A. Van, *Strategi Kebudayaan* (Terj. Dick Hartoko), edisi kedua, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Sahibi Da'im, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta, Gunung Agung, 1983
- Syahrial Ali, *Peta Kerukunan di Lampung*, dalam Achmad Syahid, Zainuddin Daulay (ed.), "Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2001)
- Suryana Af, A. Toto dkk., *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung, 1997.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Y.V. Peassen, *Kerjasama Antar Agama dan Prospeknya, Kasus Sulawesi Utara*, dalam *Agama dan Tantangan Zaman*, jakarta, LP3, 1985

## Lampiran : Peta Propinsi Lampung

### PETA WILAYAH Provinsi Lampung Tahun 2006



# Budaya Lampung & Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan



Lampung sebagai miniatur Indonesia yang pluralis dan multikulturalistik. Berbagai suku, budaya dan agama ada di Lampung.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil penelitian, memaparkan secara memadai tentang kondisi budaya dan agama yang secara akulturasi menunjukkan harmoni antara agama dan budaya yang selama ini seakan rentan diterpa konflik karena perbedaan dan kesenjangan etnis, politik, sosial, ekonomi maupun permasalahan lain.

Realitas yang tak dapat disangkal, di beberapa daerah di Indonesia terdapat konflik yang terjadi. Konflik, itu dapat dipetakan atau memiliki anatomi tersendiri. Namun Alhamdulillah, masyarakat yang pluralistik dan multikulturalistik tersebut memiliki nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun untuk dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni melampaui batas-batas etnis, bahasa, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan agama.

Kearifan lokal (local indigenious) yang tumbuh subur di masyarakat Lampung perlu dikelola dengan baik untuk mewujudkan situasi yang harmoni, rukun, aman dan tenteram. Dengan demikian kearifan lokal bila dikelola dengan baik dapat dijadikan pemersatu (integrating) dan bila tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan perpecahan (disintegrating). Secara akademik, buku ini dapat dijadikan referensi untuk memahami budaya yang berkembang di Lampung.